



GOLD GENERATION
BPSDM PERHUBUNGAN

PROPRESTASI
Prestasi yang Berprestasi, Berprestasi yang Berprestasi, Berprestasi yang Berprestasi, Berprestasi yang Berprestasi, Berprestasi yang Berprestasi

*Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP)*

LKIP

BPSDMP 2024

Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Perhubungan

Tahun Anggaran 2024



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2024.

Memasuki Tahun 2024 yang merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan 2020-2024. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan terus berupaya meningkatkan perannya sebagai pengambil kebijakan, *think thank*, koordinator dan administrator untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyelesaikan permasalahan SDM Bidang Transportasi melalui kegiatan strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan melalui pendidikan dan pelatihan SDM Perhubungan. Berdasarkan hasil pencapaian tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2024, seluruh kebijakan, program dan kegiatan telah berhasil dilaksanakan dengan baik serta telah mencapai sasaran strategis, indikator dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Selanjutnya hasil pencapaian keberhasilan kinerja tersebut akan dijelaskan dalam Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (LKIP) Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (LKIP) disusun sebagai tindak lanjut INPRES Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memperhatikan Permenpan RB Nomor 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan juga disusun berdasarkan Permenhub Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya *good governance* di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, terutama mengatasi *critical point* terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas SDM bidang transportasi baik relevansinya maupun berdaya saing, penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional serta penyediaan prasarana melalui pengelolaan pendidikan modern berbasis teknologi, dimana hal ini selaras dengan hasil capaian kinerja tahun 2024.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai salah satu cara evaluasi yang obyektif, efisien dan efektif terhadap kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan capaian kinerja pada tahun yang akan datang. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan selanjutnya akan fokus pada berbagai upaya untuk memperoleh hasil cepat (*quick wins*) yang dapat menciptakan sumber daya manusia transportasi yang unggul, profesional

dan beretika guna mendorong pembangunan transportasi yang bersifat inklusi dan berkelanjutan.

Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami berharap masukan ataupun saran yang bersifat membangun dari semua pihak khususnya jajaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan guna lebih menyempurnakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Jakarta, Februari 2025

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**



Ir. SUBAGIYO, M.T

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19701110 199703 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

(Executive Summary)

Dalam rangka mewujudkan visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yaitu terpenuhinya sumber daya manusia transportasi dalam jumlah dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan berusaha mewujudkan tujuannya, yaitu mencetak tenaga ahli maupun terampil yang siap pakai demi memenuhi standar kompetensi, baik dalam bidang aparatur negara maupun dalam hal penyediaan operator sarana dan prasarana transportasi maupun sasaran utamanya, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan melalui pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perhubungan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menuangkannya dalam Rencana Strategis. Sasaran strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada tahun 2023 ada 3 (tiga) Sasaran Program yang dilengkapi dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Program (IKP).

Berdasarkan Sasaran Program yang telah ditetapkan, Badan Pengembangan SDM Perhubungan pada tahun 2024 pencapaian kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan telah tercapai tingkat keberhasilan yang baik, hal ini dapat dilihat dari tingkat capaian yang berhasil dicapai rata-rata 106,470% di mana terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Program (IKP) dengan tingkat pencapaian sebesar 105,821%, 110%, dan 103,589%.

Capaian Kinerja sesuai Sasaran strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu Indeks RB Kementerian Perhubungan mempunyai target sebesar 80,570 dan realisasi sebesar 85,260 sehingga capaiannya sebesar 105,821%;
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum
Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat *Class Action* oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan mempunyai target sebesar 0,1 dan realisasi sebesar 0,0 sehingga capaiannya sebesar 110%;

3. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi Yang Kompeten

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten mempunyai target sebesar 91,726% dan realisasi sebesar 95,018% sehingga capaiannya sebesar 103,589% yang terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

- Persentase Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi dengan target sebesar 97,441% dan realisasi sebesar 116,615% sehingga capaiannya sebesar 119,678%.
- Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Pembentukan dengan target sebesar 87,916% dan realisasi sebesar 80,619% sehingga capaiannya sebesar 91,700%.

Secara keseluruhan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada tahun 2024 mencapai tingkat keberhasilan yang sangat baik. Dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Program (IKP), 3 (tiga) Indikator Kinerja Program (IKP) telah mencapai diatas 100%.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | iii |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GRAFIK | ix |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| BAB I PENDAHULUAN | I – 1 |
| I.1 LATAR BELAKANG | I – 1 |
| I.2 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN | I – 3 |
| I.3 SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN | I – 18 |
| I.4 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN | I – 20 |
| a. Isu Strategis | I – 20 |
| b. Permasalahan | I – 22 |
| c. Arah Kebijakan Dan Strategi | I – 24 |
| I.5 SISTEMATIKA LAPORAN | I – 28 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | II – 1 |
| II.1 URAIAN SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN | II – 1 |
| II.2 PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN TAHUN 2024..... | II – 5 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | III – 1 |
| III.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA..... | III – 1 |
| III.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN TAHUN 2024..... | III – 2 |

| | | |
|---------------|--|---------------|
| a. | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan, Serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024..... | III – 2 |
| b. | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Tahun 2020-2024..... | III – 17 |
| c. | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 Terhadap Target Kinerja pada Tahun 2020-2024 dalam RENSTRA Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2020-2024..... | III – 23 |
| III.3 | ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA | III – 26 |
| III.4 | CAPAIAN KEBERHASILAN KINERJA LAINNYA..... | III – 30 |
| III.5 | REALISASI ANGGARAN BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN | III – 41 |
| a. | Alokasi Anggaran Tahun 2024 | III – 40 |
| b. | Analisis Dana Yang Tidak Terserap Tahun 2024 | III – 45 |
| III.6 | ANALISIS PERBANDINGAN JUMLAH LULUSAN PENDIDIKAN VOKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN DENGAN LEVEL NASIONAL | III – 46 |
| BAB IV | PENUTUP | IV – 1 |
| IV.1 | KESIMPULAN | IV – 1 |
| IV.2 | SARAN TINDAK LANJUT..... | IV – 2 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|------------|---|
| Tabel 1.1 | Kedudukan, Tugas, Fungsi, serta Struktur Organisasi BPSDM Perhubungan..... I-3 |
| Tabel 1.2 | Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024..... I-11 |
| Tabel 1.3 | Langkah Konkrit Pencapaian Visi Presiden dalam Sektor Perhubungan melalui Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024..... I-12 |
| Tabel 1.4 | <i>Customer Perspective</i> BPSDM Perhubungan 2020-2024..... I-15 |
| Tabel 1.5 | <i>Perspektif Internal Business Process</i> BPSDM Perhubungan 2020-2024..... I-16 |
| Tabel 1.6 | <i>Perspektif Learn & Growth</i> BPSDM Perhubungan 2020-2024..... I-17 |
| Tabel 1.7 | Komposisi Pegawai Badan Pengembangan SDM Perhubungan Berdasarkan Status PNS dan Non PNS Tahun 2024..... I-19 |
| Tabel 2.1 | Target RENSTRA Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan 2020 – 2024..... II-4 |
| Tabel 2.2 | Rencana Kinerja Tahun 2024 Badan Pengembangan SDM Perhubungan..... II-5 |
| Tabel 2.3 | Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan, 2024..... II-6 |
| Tabel 2.4 | Kegiatan Strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan, 2024..... II-9 |
| Tabel 3.1 | Realisasi Capaian Kinerja BPSDM Perhubungan Tahun 2024..... III-2 |
| Tabel 3.2 | Realisasi Dan Capaian IKP Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten..... III-12 |
| Tabel 3.3 | Realisasi Persentase Lulusan Diklat yang Bersertifikat Kompetensi..... III-13 |
| Tabel 3.4 | Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Pembentukan pada Tahun 2024... III-14 |
| Tabel 3.5 | Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Pembentukan pada Tahun 2020 s.d 2024..... III-16 |
| Tabel 3.6 | Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2020-2024..... III-18 |
| Tabel 3.7 | Perbandingan Target RENSTRA Tahun 2020-2024 dengan Capaian Kinerja Tahun 2020-2024..... III-25 |
| Tabel 3.8 | Realisasi dan Persentase Keuangan..... III-26 |
| Tabel 3.9 | Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan, 2024..... III-27 |
| Tabel 3.10 | Nilai Efisiensi BPSDM Tahun 2024..... III-28 |
| Tabel 3.11 | Capaian IKP dan IKK BPSDMP Tahun 2024..... III-30 |
| Tabel 3.12 | Jumlah Kerjasama BPSDM Perhubungan Tahun 2024..... III-37 |
| Tabel 3.13 | Realisasi Keuangan BPSDM Tahun 2024..... III-43 |
| Tabel 3.14 | Realisasi Anggaran di Satker/UPT BPSDM Perhubungan..... III-44 |
| Tabel 3.15 | Realisasi Anggaran Per Program BPSDM Perhubungan..... III-44 |
| Tabel 4.1 | Tindak Lanjut atas hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023..... IV-6 |

DAFTAR GRAFIK

| | Halaman |
|-------------|---|
| Grafik 3.1 | Realisasi IKP Indeks RB Kementerian Perhubungan Tahun 2024 Per Triwulan..... III-6 |
| Grafik 3.2 | Realisasi IKP Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan Tahun 2024 Per Triwulan..... III-7 |
| Grafik 3.3 | Realisasi IKP Tingkat Pemenuhan Transportasi Yang Kompeten Tahun 2024 Per Triwulan..... III-8 |
| Grafik 3.4 | Realisasi IKK Persentase Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi Tahun 2024 Per Triwulan..... III-8 |
| Grafik 3.5 | Realisasi IKK Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Pembentukan Tahun 2024 Per Triwulan..... III-9 |
| Grafik 3.6 | Perbandingan Kinerja IKP Indeks RB Kementerian Perhubungan, 2020-2024..... III-19 |
| Grafik 3.7 | Perbandingan Kinerja IKP Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan, 2020-2024..... III-20 |
| Grafik 3.8 | Perbandingan Kinerja IKP Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten, 2020-2024..... III-21 |
| Grafik 3.9 | Perbandingan Kinerja IKK Persentase Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi , 2020-2024..... III-22 |
| Grafik 3.10 | Perbandingan Kinerja IKK Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Pembentukan, 2020-2024..... III-23 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|------------|---|
| Gambar 1.1 | Susunan Organisasi BPSDM Perhubungan..... I-8 |
| Gambar 1.2 | Fokus Utama Kementerian Perhubungan..... I-12 |
| Gambar 1.3 | Kerangka Regulasi Pengembangan SDM Transportasi..... I-14 |
| Gambar 1.4 | Peta Strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan..... I-18 |
| Gambar 2.1 | Alur Kinerja BPSDM Perhubungan..... II-2 |
| Gambar 3.1 | Nilai Efisiensi Pada Aplikasi SMART Keluaran Sasaran Strategis BPSDM Perhubungan, 2024..... III-29 |
| Gambar 3.2 | Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi Vokasi di Seluruh Wilayah Indonesia..... III-48 |

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka memenuhi SDM Perhubungan yang handal dan kompeten, upaya konkretnya dilakukan melalui penyelenggaraan jalur-jalur pendidikan baik diklat pembentukan, diklat peningkatan kompetensi; dan diklat teknis lainnya, sebagaimana diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Transportasi yaitu sumber daya manusia di bidang transportasi yang harus memiliki Kompetensi di bidang transportasi sesuai dengan jenis kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan melalui jalur pendidikan formal dan non formal. Sumber daya manusia di bidang transportasi, meliputi:

- a. Sumber Daya Manusia di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Sumber Daya Manusia di Bidang Perkeretaapian;
- c. Sumber Daya Manusia di Bidang Pelayaran;
- d. Sumber Daya Manusia di Bidang Penerbangan; dan
- e. Sumber Daya Manusia di Bidang Multimoda Transportasi dan mencakup Sumber Daya Manusia yang menjalankan fungsi sebagai *regulator*, penyedia jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, BPSDM Perhubungan hadir untuk mewujudkan ketersediaan SDM dimaksud, melalui serangkaian pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, perencanaan, penempatan, perluasan kesempatan kerja, dengan sasaran jangka panjang mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera, berdaya saing, serta mendukung terwujudnya Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, sebagaimana dijabarkan dalam Visi Misi Pemerintah RI (2020-2024).

Proses mewujudkan visi dan misi BPSDM tertuang dalam rencana strategis BPSDM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, yang mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L). Rencana strategis yang disusun mengakomodir pemenuhan SDM Transportasi yang diusahakan selaras antara Kebutuhan SDM dengan pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi;

kebutuhan regulator, operator maupun industri, melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan.

Perencanaan yang konsisten perlu direalisasikan melalui serangkaian indikator kinerja yang tertuang dalam program strategis dalam usaha menciptakan kinerja Kementerian Perhubungan yang berdaya guna, berhasil guna serta berstandar internasional, sehingga tercapai *link and match* dengan kebutuhan dunia transportasi baik *safety*, *security* maupun *service*. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi maka program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan harus dapat dipertanggung jawabkan dalam arti bahwa penggunaan semua sumber daya yang ada harus dapat menghasilkan *output* yang dapat memberikan kontribusi secara maksimal terhadap kinerja Kementerian Perhubungan. Dengan menciptakan akuntabilitas kinerja melalui pelaporan Kinerja Organisasi merupakan pengejawantahan manajemen kinerja sektor publik BPSDM.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 maka disusunlah Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2024. Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan pencapaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan selama tahun 2024 dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2024. Laporan Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2024 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan maupun kurangberhasilan Badan Pengembangan SDM Perhubungan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama tahun anggaran 2024.

Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, memberikan mandat teknis bagaimana pelaporan kinerja mampu menghasilkan gambaran atas pencapaian arah Badan Pengembangan SDM

Perhubungan sepanjang tahun 2024. Berbagai program kerja dan kegiatan dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan suatu organisasi melalui pelaksanaan manajemen penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan berikut jajarannya yang mana harus dapat berjalan secara efektif, efisien, sesuai dengan rencana, standar dan semua ketentuan.

Laporan Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2024 adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2024 dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam rangka memenuhi visi dan Misi yang telah ditetapkan. Visi dan misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2020 - 2024.

I.2 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

Kedudukan, Tugas, Fungsi serta Struktur Organisasi BPSDM Perhubungan telah diatur dalam Pasal 663, 664, 665, 666 dari Peraturan Menteri Perhubungan No. 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan seperti yang akan disampaikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi, serta Struktur Organisasi BPSDM Perhubungan

| No. | Aspek Pengaturan | Pengaturan dalam PM 17 Tahun 2022 |
|-----|---|---|
| a. | Kedudukan BPSDM (Pasal 663) | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan dan BPSDM Perhubungan dipimpin oleh Kepala Badan. |
| b. | Tugas BPSDM (Pasal 664) | Menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi. |
| c. | Fungsi yang dilaksanakan oleh BPSDM Perhubungan (Pasal 665) | <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi; 2) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi; 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi; |

| No. | Aspek Pengaturan | Pengaturan dalam PM 17 Tahun 2022 |
|-----|---------------------------------|---|
| | | 4) Pelaksanaan administrasi BPSDM Perhubungan; dan 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri. |
| d. | Struktur Organisasi (Pasal 666) | 1) Sekretariat Badan; 2) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat; 3) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut; 4) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara; 5) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan. |

Sumber : PM 17/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor: PM 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan pengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, dalam pasal 663 menyatakan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi.

Dalam rangka memenuhi ketersediaan SDM Transportasi yang handal, profesional dan berkualitas tersebut diperlukan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang terarah, sesuai dengan karakteristik operasional yang dibutuhkan. Untuk itu perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di bidang perhubungan harus diprioritaskan sesuai amanat dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2007 sebagaimana dirubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 64 tahun 2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi.

Perubahan nomenklatur Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan menjadi Badan Pengembangan SDM Perhubungan di latar belakang oleh adanya 5 (lima) hal yaitu:

- a. Adanya 4 (empat) UU Transportasi :
 - 1) Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pengembangan SDM Perhubungan secara merata;

- 2) Setiap SDM Perhubungan wajib memiliki kompetensi;
 - 3) Pendidikan dan pelatihan SDM Perhubungan menjadi tanggung jawab pemerintah dengan melibatkan masyarakat (penyedia dan pengguna jasa);
 - 4) Dikenakan sanksi pidana penjara bagi mereka yang tidak memiliki kompetensi;
- b. Kondisi transportasi nasional;
 - c. SDM Transportasi (SDM Aparatur, SDM Non Aparatur dan Masyarakat sebagai pengguna dan penyedia jasa transportasi);
 - d. Komunikasi dan Koordinasi:

Komunikasi dan koordinasi antar sektor belum berjalan baik;

 - 1) Komunikasi dan koordinasi Kementerian Perhubungan dengan Dinas Perhubungan Propinsi dan Kabupaten/Kota belum berjalan dengan baik;
 - 2) Komunikasi dengan masyarakat penyedia dan pengguna jasa transportasi belum berjalan dengan efektif.
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Transportasi:
 - 1) Sumber daya yang dimiliki pemerintah dan swasta masih terbatas (sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan anggaran);
 - 2) Diklat transportasi dan penunjang untuk masyarakat belum merata ke seluruh wilayah;
 - 3) Diklat transportasi dan penunjang untuk aparatur masih sangat terbatas;
 - 4) Kursil dan metode diklat belum sepenuhnya sesuai dengan pemenuhan kompetensi (*knowledge, skill, and attitude*).

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
- b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam mengoptimalkan fungsi tersebut diatas, Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai 3 (tiga) unsur utama yaitu :

- a. Pendidikan :
 - 1) Pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan;

- 2) Tenaga kependidikan;
 - 3) Kurikulum dan silabus;
 - 4) Metode diklat;
 - 5) Kerjasama pendidikan dengan universitas/institut di dalam negeri dan luar negeri;
 - 6) Bantuan pengembangan pendidikan milik swasta/masyarakat.
- b. Pelatihan :
- 1) Sarana dan prasarana pelatihan;
 - 2) Tenaga/Instruktur pelatih;
 - 3) Materi/bahan pelatihan;
 - 4) Metode pelatihan;
 - 5) Penyebaran lokasi pelatihan;
 - 6) Kerjasama penyelenggaraan pelatihan dengan pemerintah daerah (PEMDA) dan asosiasi-asosiasi penyedia jasa dan profesi transportasi.
- c. Penyuluhan :
- 1) Materi/bahan penyuluhan;
 - 2) Tenaga penyuluh;
 - 3) Metode penyuluhan;
 - 4) Penyebaran lokasi penyuluhan;
 - 5) Kerjasama penyuluhan dengan pemerintah daerah dan asosiasi serta organisasi masyarakat.

Ketiga unsur tersebut di dalam pelaksanaannya harus didukung oleh Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang handal dan terintegrasi yaitu dengan dibentuknya Unit Informasi Teknologi (IT) BPSDM Perhubungan.

Sesuai dengan PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, susunan organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- b. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat;
- c. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut;
- d. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara; dan
- e. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan.

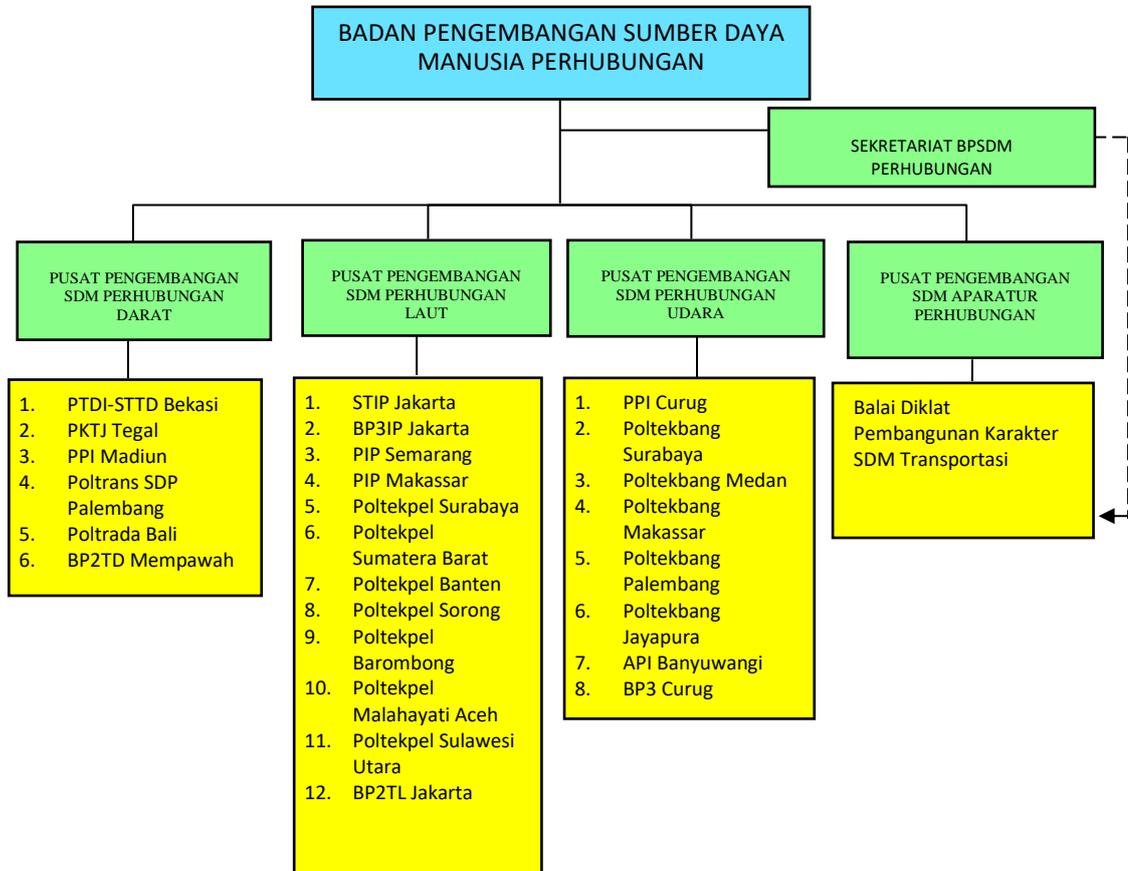
Sedangkan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Adapun pembinaan dalam administratif dilimpahkan kepada Sekretaris Badan Pengembangan SDM

Perhubungan, sedangkan pembinaan teknis dan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi dilimpahkan kepada Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan masing-masing.

Adapun Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Politeknik Transportasi Darat Indonesia - Sekolah Tinggi Transportasi Darat (PTDI-STTD) di Bekasi;
- b. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) di Jakarta;
- c. Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) di Curug;
- d. Balai Besar Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) di Jakarta;
- e. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang;
- f. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar;
- g. Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Surabaya;
- h. Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Sumatera Barat;
- i. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal;
- j. Politeknik Penerbangan (POLTEKBANG) Surabaya;
- k. Politeknik Transportasi (POLTRANS) Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SDP) Palembang;
- l. Politeknik Penerbangan (POLTEKBANG) Medan;
- m. Politeknik Penerbangan (POLTEKBANG) Makassar;
- n. Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun;
- o. Politeknik Transportasi Darat (POLTRADA) Bali;
- p. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Mempawah;
- q. Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Banten;
- r. Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Barombong;
- s. Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Sorong;
- t. Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Malahayati Aceh-Besar;
- u. Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Sulawesi Utara;
- v. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Jakarta;
- w. Politeknik Penerbangan (POLTEKBANG) Palembang;
- x. Politeknik Penerbangan (POLTEKBANG) Jayapura;
- y. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug;
- z. Akademi Penerbangan Indonesia (API) Banyuwangi; dan
- aa. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter (BP3K) SDM Transportasi Pasir Jambu.

Selanjutnya, untuk melihat garis kewenangan dan hirarki jabatan pada Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1.1 Susunan Organisasi BPSDM Perhubungan

Organisasi BPSDM bersama UPT/Satker darat, laut maupun udara dibawahnya bergerak menjalankan roda organisasi berlandaskan visi dan misi. Visi dan Misi BPSDM terbentuk guna membantu memperkokoh visi pembangunan nasional Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024, yaitu **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, yang dilakukan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- b. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- c. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan

- d. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
- e. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- f. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- g. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- h. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- i. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Visi misi presiden periode tahun 2020-2024 tersebut didukung oleh 5 prioritas kerja, sebagai berikut:

- a. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.
Interkoneksi infrastruktur dengan kawasan: industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, dan perikanan.
- b. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
Menjamin kesehatan ibu hamil dan anak usia sekolah dan Meningkatkan kualitas Pendidikan dan manajemen talenta.
- c. Undang Investasi Seluas-luasnya untuk Membuka Lapangan Pekerjaan.
Memangkas hambatan investasi.
- d. Reformasi Birokrasi.
Kecepatan melayani dan memberi izin, menghapus pola pikir linier, monoton, dan terjebak di zona nyaman, adaptif, produktif, inovasi, kompetitif.
- e. APBN yang Fokus dan Tepat Sasaran.
APBN dipastikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang bergerak maju memperkuat kehadiran Negara ditengah masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan yang terus menerus diusahakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan menjamin daya saing di pasar nasional maupun internasional, telah sejalan dengan agenda prioritas pembangunan untuk menunjukkan prioritas program pembangunan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Aspek peningkatan kualitas SDM, melalui capaian kinerja yang terus bergerak berlandaskan visi dan misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan, tetap berpedoman kepada Visi dan Misi Kementerian Perhubungan serta Perwujudan Visi Presiden (*Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan*

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong) dalam sektor transportasi yaitu dengan “Terwujudnya Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”. Hal tersebut merupakan cita-cita Kementerian Perhubungan dimana konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.

- a. **Konektivitas Nasional** adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara;
- b. **Handal** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah tanah air;
- c. **Berdaya Saing** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;
- d. **Nilai Tambah** diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (*national security* dan *sovereignty*) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (*sustainable development*) serta dapat berperan dalam pengembangan wilayah.

BPSDM Perhubungan hadir untuk membantu *Terwujudnya Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah* melalui peningkatan kualitas dan daya saing SDM Bidang Transportasi serta aspek pemenuhan SDM Transportasi yang professional dan beretika. Pergerakan yang terus menerus sejalan dengan Misi Kementerian Perhubungan yaitu:

- a. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
- b. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan;
- c. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;

- d. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
- e. Mewujudkan pengembangan pemanfaatan hasil inovasi teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

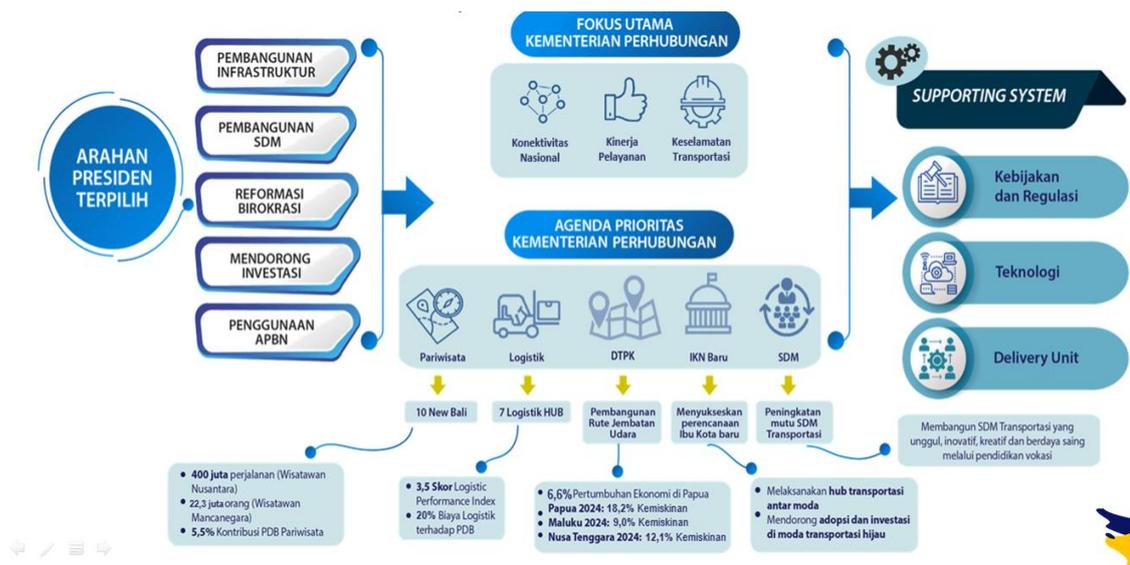
Misi tersebut kemudian diwujudkan menjadi sasaran strategis Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 - 2024

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA |
|----|---|---|
| 1 | Terwujudnya konektivitas nasional | IKSS 1 Rasio konektivitas nasional |
| 2 | Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan | IKSS 2 On Time Performance Layanan Transportasi |
| | | IKSS 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi |
| 3 | Meningkatnya keselamatan transportasi | IKSS 4 Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan |
| 4 | Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum | IKSS 5 Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum |
| 5 | Meningkatnya Kualitas SDM transportasi yang kompeten | IKSS 6 Tingkat pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten |
| 6 | Meningkatnya kualitas transportasi berkelanjutan | IKSS 7 Persentase penurunan emisi GRK sektor transportasi sebesar 5,13 juta ton CO ₂ pada tahun 2024 |
| 7 | Meningkatnya pengawasan dan pengendalian | IKSS 8 Opini BPK “Wajar Tanpa Pengecualian” |
| 8 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik | IKSS 9 Indeks RB Kementerian Perhubungan |

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020

Selengkapnya kompilasi secara lengkap memuat Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada Gambar 1.2 dan Tabel 1.3 dibawah ini.



Gambar 1.2 Fokus Utama Kementerian Perhubungan

Tabel 1.3 Langkah Konkrit Pencapaian Visi Presiden dalam Sektor Perhubungan melalui Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

| NO | MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS |
|----|--|---|--|--|--|
| 1 | Meningkatnya integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah | Meningkatnya konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi | Rasio konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi | Terwujudnya konektivitas nasional | Rasio konektivitas nasional |
| 2 | Meningkatnya kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan | Meningkatnya kinerja layanan transportasi | Indeks kinerja layanan transportasi | Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan | <ul style="list-style-type: none"> On Time Performance Layanan Transportasi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi |

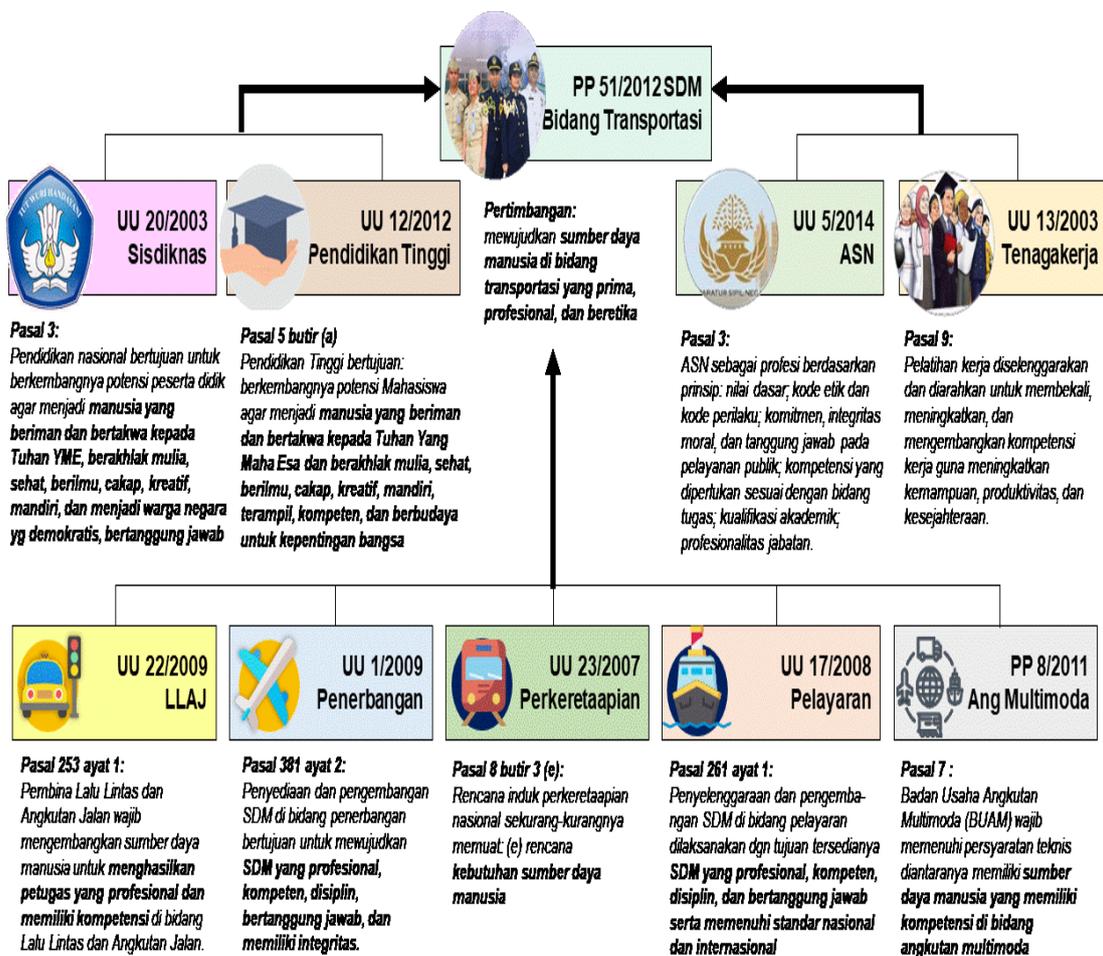
| NO | MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS |
|----|--|--|--|--|--|
| 3 | Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan Produktif. | Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi | Persentase penurunan tingkat kecelakaan pengguna jasa transportasi | Meningkatnya keselamatan transportasi Meningkatnya Kualitas SDM transportasi yang kompeten | Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan Tingkat pemenuhan SDM transportasi yang kompeten |
| 4 | Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara Konsisten | Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dengan Kategori "Sangat Baik" | Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum Meningkatnya pengawasan dan pengendalian Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik | Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum Opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian" Indeks RB Kementerian Perhubungan |
| 5 | Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim | Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi | Tingkat penggunaan Teknologi Transportasi yang ramah lingkungan | Meningkatnya kualitas transportasi berkelanjutan | Persentase penurunan emisi GRK sektor transportasi sebesar 5,13 juta ton CO2 pada tahun 2024 |

Penyusunan sasaran strategis Kementerian Perhubungan, menjadi pedoman dalam Penyusunan Visi dan Misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan, selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta penjabaran dari Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia serta Visi dan Misi Kementerian Perhubungan, juga menindaklanjuti amanat Undang-Undang di Bidang Transportasi dan Undang-Undang pendukung yaitu:

- a. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- b. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- d. Undang Undang nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- e. Undang Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

- f. Undang Undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan;
- g. Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- h. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi.

Dalam menindaklanjuti ke empat Undang-undang bidang transportasi, sebagaimana gambar 1 dibawah ini serta Undang-Undang pendukung seperti diatas, mengamanatkan bahwa Pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang transportasi (profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki integritas) yang memenuhi standar nasional dan internasional”



Gambar 1.3 Kerangka Regulasi Pengembangan SDM Transportasi

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta penjabaran dari Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia serta Visi dan Misi Kementerian Perhubungan, juga menindaklanjuti amanat Undang-Undang di Bidang Transportasi dan Undang-Undang pendukung, maka Visi dan Misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian Perhubungan adalah:

“BPSDM Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Terpenuhinya SDM Transportasi yang maju, mandiri, kompeten, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam mewujudkan konektivitas nasional untuk mendukung Visi dan Misi Kementerian Perhubungan: Konektivitas Nasional Yang Handal, Berdaya Saing Dan Memberikan Nilai Tambah”

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka telah dirumuskan Misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan mutu dan relevansi lulusan diklat transportasi;
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut diatas, maka tujuan strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan SDM transportasi yang maju, mandiri, berkompeten, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah;
- b. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pelaksanaan Diklat Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi;
- c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya dan Manajemen SDM Transportasi.

Berdasarkan pemetaan strategi sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dapat diperoleh sasaran strategis dan indikator kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebagai berikut:

a. Customer Perspective

Sasaran Program dalam *Customer Perspective* terdiri dari :

Tabel 1.4 Customer Perspective BPSDM Perhubungan 2020-2024

| SASARAN PROGRAM (SP) | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | SAT |
|---|--|--------|
| SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan | Indeks |

| SASARAN PROGRAM (SP) | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | SAT |
|--|---|----------|
| SP.WA.02. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum | IKP2. Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan | % |
| SP.DL.01. Meningkatkan Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten | IKP 3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten | % |
| | IKK.1 Jumlah Peserta Diklat Transportasi | Orang |
| | IKK 2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi yang bersertifikat Kompetensi | % |
| | IKK 3. Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi | % |
| | IKK 4. Persentase Utilitas Pemanfaatan sarana dan Prasarana Diklat SDM Perhubungan yang berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir | % |
| | IKK 5. Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan | Kegiatan |
| | IKK 6. Jumlah Penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan Internasional | Dokumen |
| | IKK 7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks |

b. Internal Business Process Perspective

Sasaran kegiatan dalam *perspektif internal business process* terdiri dari 4 (empat) sasaran kegiatan yang meliputi:

Tabel 1.5 Perspektif Internal Business Process BPSDM Perhubungan 2020-2024

| SASARAN KEGIATAN (SK) | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) | SAT |
|--|--|--------|
| SK.WA.03.01 Meningkatkan Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan BPSDM Perhubungan | IKK 8. Kualitas pelaksanaan kerjasama dan kemitraan BPSDMP | % |
| SK.WA.03.04. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur | IKK 9. Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP | Indeks |
| SK.DL.01.02. Meningkatkan Kualitas perencanaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta lembaga yang sesuai standar | IKK 10. Persentase Keterpaduan antara perencanaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang sesuai standar serta lembaga yang terakreditasi | % |

| SASARAN KEGIATAN (SK) | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) | SAT |
|--|--|-----|
| SK.DL.01.03. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi. | IKK 11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi | % |
| | IKK 12. Kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Transportasi | % |

c. Learn & Growth Perspective

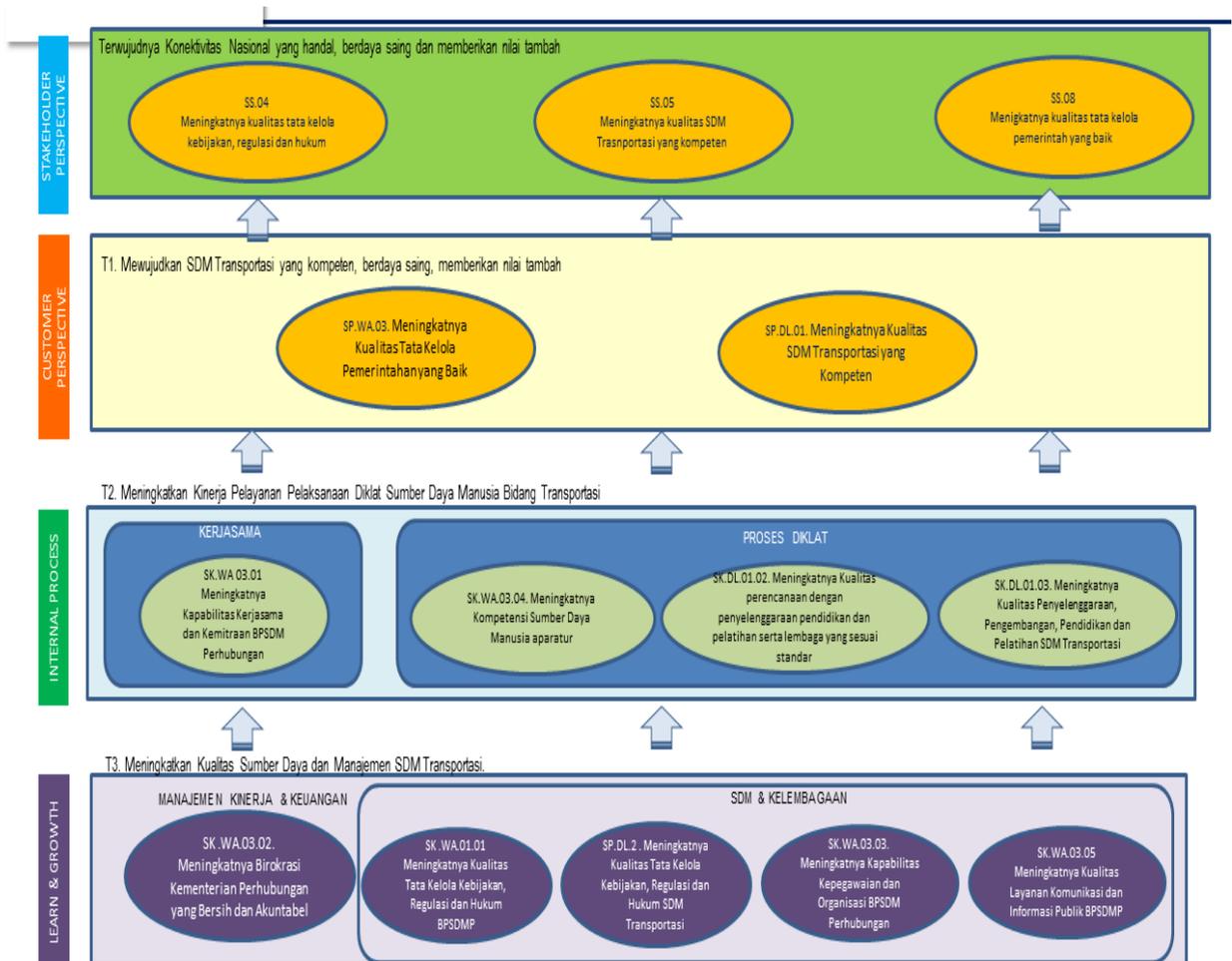
Sasaran kegiatan dalam *perspektif learn & growth* terdiri dari 5 (lima) sasaran kegiatan yang meliputi:

Tabel 1.6 Perspektif Learn & Growth BPSDM Perhubungan 2020-2024

| SASARAN KEGIATAN (SK) | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) | SAT |
|--|---|--------|
| SK .WA.03.02. Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel | IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDMP | Level |
| | IKK 14. Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP | Nilai |
| | IKK 15. Indeks Pengelolaan aset BPSDMP | Nilai |
| | IKK 16. Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP | Nilai |
| | IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP | Nilai |
| | IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP | Nilai |
| SK .WA.01.01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum BPSDMP | IKK 20. Indeks Reformasi Hukum BPSDMP | % |
| | IKK 21. Indeks Kualitas Kebijakan BPSDMP | % |
| SP.DL.2 . Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum SDM Transportasi | IKP 4. Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi | % |
| SK.WA.03.03. Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan | IKK 22. Indeks Kelembagaan BPSDMP | Nilai |
| | IKK 9. Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP | Indeks |
| | IKK 23. Indeks tata kelola manajemen ASN BPSDMP | Nilai |
| SK.WA.03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP | IKK 24. Indeks Kepemimpinan perubahan BPSDMP | Nilai |
| | IKK 25. Indeks SPBE Kementerian Perhubungan | Nilai |

| SASARAN KEGIATAN (SK) | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) | SAT |
|--|---|-------|
| SK.WA.03.02. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur | IKK.26 Jumlah Peserta Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang Kompeten | Orang |
| | IKK.27 Persentase Lulusan Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang Kompeten | % |

Secara lengkap dapat dilihat Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan melalui Gambar 1.4 Peta Strategis dibawah ini.



Gambar 1.4 Peta Strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan

I.3 SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

Dalam menjalankan tugasnya, pada tahun 2024 Badan Pengembangan SDM Perhubungan didukung oleh 3.778 orang pegawai berstatus ASN dari berbagai macam latar pendidikan. Komposisi pegawai Badan Pengembangan SDM Perhubungan dapat dilihat pada Tabel 1.7 berikut :

Tabel 1.7 Komposisi Pegawai Badan Pengembangan SDM Perhubungan Berdasarkan Status PNS Tahun 2024

| NO | K/L | JUMLAH PEGAWAI ASN 31 DESEMBER 2024 | | | |
|----|---|-------------------------------------|------|------|---|
| | | PNS | CPNS | PPPK | Jumlah Eksisting Pegawai ASN 31 Desember 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 1 | Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan | 121 | 0 | 8 | 129 |
| 2 | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat | 68 | 0 | 4 | 72 |
| 3 | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut | 61 | 0 | 7 | 68 |
| 4 | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara | 70 | 0 | 6 | 76 |
| 5 | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan | 105 | 0 | 7 | 112 |
| 6 | Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan | 120 | 1 | 24 | 145 |
| 7 | Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun | 104 | 2 | 7 | 113 |
| 8 | Politeknik Transportasi Darat Bali | 102 | 1 | 21 | 124 |
| 9 | Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD | 193 | 8 | 29 | 230 |
| 10 | Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang | 92 | 2 | 14 | 108 |
| 11 | Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran | 176 | 2 | 63 | 241 |

| NO | K/L | JUMLAH PEGAWAI ASN 31 DESEMBER 2024 | | | |
|----|---|-------------------------------------|------|------|---|
| | | PNS | CPNS | PPPK | Jumlah Eksisting Pegawai ASN 31 Desember 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 12 | Balai Besar Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran | 96 | 0 | 20 | 116 |
| 13 | Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar | 113 | 5 | 18 | 136 |
| 14 | Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang | 156 | 3 | 29 | 188 |
| 15 | Politeknik Pelayaran Banten | 109 | 3 | 34 | 146 |
| 16 | Politeknik Pelayaran Barombong | 105 | 4 | 17 | 126 |
| 17 | Politeknik Pelayaran Malahayati | 67 | 3 | 20 | 90 |
| 18 | Politeknik Pelayaran Sorong | 69 | 3 | 8 | 80 |
| 19 | Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara | 66 | 9 | 8 | 83 |
| 20 | Politeknik Pelayaran Sumatera Barat | 80 | 1 | 11 | 92 |
| 21 | Politeknik Pelayaran Surabaya | 119 | 3 | 50 | 172 |
| 22 | Politeknik Penerbangan Indonesia Curug | 211 | 9 | 17 | 237 |
| 23 | Politeknik Penerbangan Jayapura | 67 | 3 | 14 | 84 |
| 24 | Politeknik Penerbangan Makassar | 109 | 5 | 5 | 119 |
| 25 | Politeknik Penerbangan Medan | 89 | 1 | 14 | 104 |
| 26 | Politeknik Penerbangan Palembang | 92 | 2 | 16 | 110 |
| 27 | Politeknik Penerbangan Surabaya | 134 | 4 | 8 | 146 |
| 28 | Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi | 70 | 3 | 9 | 82 |

| NO | K/L | JUMLAH PEGAWAI ASN 31 DESEMBER 2024 | | | |
|---------------------|--|-------------------------------------|-----------|------------|---|
| | | PNS | CPNS | PPPK | Jumlah Eksisting Pegawai ASN 31 Desember 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 |
| 29 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah | 52 | 5 | 3 | 60 |
| 30 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta | 53 | 0 | 21 | 74 |
| 31 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug | 58 | 4 | 10 | 72 |
| 32 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi | 31 | 0 | 12 | 43 |
| JUMLAH TOTAL | | 3.161 | 90 | 539 | 3.778 |

Sumber Data: Bagian SDM BPSDMP 2024

I.4 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

a. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Badan Pengembangan SDM Perhubungan di masa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan /keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Dalam Undang-Undang di bidang Transportasi (Perkeretaapian, Pelayaran, Penerbangan dan Angkutan Jalan Raya), mengamanatkan bahwa Pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang transportasi (profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki integritas) yang memenuhi standar nasional dan internasional. Menghubungkan dengan kondisi saat ini, upaya terus menerus *continuous improvement* terus

dilakukan oleh Badan Pengembangan SDM Perhubungan guna mencetak SDM Transportasi yang handal, namun SDM Transportasi belum memenuhi kebutuhan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Ketidaktercapaian tersebut berkaitan erat dengan belum optimalnya optimalisasi sarana prasana, penggunaan teknologi informasi, tata kelola kelembagaan melalui penerapan Reformasi Birokrasi, dan aspek lainnya. Oleh karena itu Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk dapat memenuhi kebutuhan SDM Perhubungan (operator sarana dan prasarana penyelenggara transportasi, aparatur pemerintah pusat dan daerah), tidak hanya dari sisi jumlah (kuantitas) melainkan kualitas dan sebarannya.

Guna mewujudkan keseimbangan antara ketersediaan kuantitas SDM Transportasi dengan kualitasnya, Badan Pengembangan SDM Perhubungan selalu memperhatikan isu strategis yang muncul sebagaimana tercermin dalam perjalanan kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan selama ini, isu-isu yang harus segera diselesaikan meliputi :

1) Internal

a) Kebutuhan SDM

Dengan adanya percepatan pembangunan di bidang transportasi, maka diperlukannya pemenuhan kebutuhan SDM pada sektor penerbangan, darat, laut, udara dan kereta api. Hal ini perlu terus menerus dimonitor dan dilakukan evaluasi dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas SDM.

b) Berkembangnya Kelembagaan

Berkembangnya status kelembagaan secara tidak langsung akan menyediakan *pattern* berupa peningkatan kapasitas dan tuntutan untuk mewujudkannya. Hal ini juga merupakan bagian dari capaian BPSDM Perhubungan namun merupakan tugas bagi Badan Pengembangan SDM Perhubungan juga untuk mempersiapkan standar terutama arah perkembangan perubahan kelembagaan menjadi sebuah politeknik.

c) Percepatan Pendidikan Vokasi

Percepatan peningkatan taraf pendidikan SDM Indonesia lebih difokuskan kepada SDM Pendidikan Vokasi, sehingga diharapkan mampu menciptakan SDM yang unggul, spesifik, berkompeten dan

professional. Peningkatan kualitas pendidikan vokasi di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan menjadi suatu keharusan.

d) Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi membawa perubahan yang sangat cepat dalam pola hidup organisasi termasuk dunia pendidikan, penggunaan teknologi menjadi hal yang utama ketika kecepatan informasi telah melewati dunia tanpa batas.

2) Eksternal

a) Revolusi Industri 4.0

Merupakan wajah baru Lingkup lapangan kerja saat ini yang mengintegrasikan proses produksi secara virtual berbasis siber dan *artificial intelligence*. SDM Perhubungan dihadapi oleh responsivitas terhadap perkembangannya.

b) Persaingan Kerja lingkup ASEAN dan International

Persaingan kualitas SDM yang mampu bersaing dalam lingkup ASEAN dan dunia internasional.

b. Permasalahan

Analisis isu-isu strategis permasalahan (*new technology*, dan lain-lain) merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kerja BPSDM Perhubungan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Munculnya isu-isu strategis yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, perlu ditelaah kembali dan dibandingkan dengan kondisi yang dihadapi Badan Pengembangan SDM Perhubungan saat ini, apakah isu strategis tersebut relevan dengan permasalahan yang dihadapi dan memang memetakan kesinambungan kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Pencapaian kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan saat ini sudah mencapai hasil yang baik, namun dalam perjalanannya perkembangan dunia pendidikan sangat cepat semakin meningkatnya perubahan ekonomi global dan kecepatan informasi, sehingga masih perlu ditingkatkan terutama melihat pemetaan permasalahan yang dihadapi Badan Pengembangan SDM Perhubungan antara lain:

- 1) Sumber Daya Manusia
 - a) Masih belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik (dosen, instruktur, widyaiswara);
 - b) Masih belum terpenuhinya tenaga pendidik yaitu SDM pengasuh, penyuluh, laboran/teknisi/administrasi yang berwawasan global;
 - c) Masih belum optimalnya penguasaan SDM pendidik dan tenaga kependidikan terhadap teknologi yang *up-to-date*;
 - d) Belum tercukupinya *ratio* SDM pengasuh dengan peserta didik, pendidik dengan peserta didik;
 - e) Masih didapati lulusan pendidikan dan pelatihan UPT di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan belum dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja;
 - f) Terdapat penyebaran UPT diklat transportasi belum sepenuhnya berasaskan pada pemerataan di seluruh wilayah NKRI.

- 2) Sarana dan Prasarana
 - a) Kapasitas sarana dan prasarana diklat terbatas dan sebagian sudah *out of date*;
 - b) Utilitas sarana prasarana yang belum optimal.

- 3) Teknologi dan Informasi
 - a) Masih belum optimalnya pembaruan teknologi sarana pembelajaran (laboratorium, simulator), pemanfaatan teknologi pembelajaran (*e-learning* dan *distance learning*);
 - b) Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK dalam pelayanan dan manajemen diklat (*office automation, asset management, budgeting*);
 - c) Sistem diklat yang belum terintegrasi melalui sistem informasi yang terkomputerisasi.

- 4) Regulasi dan Kebijakan
 - a) Adanya kebijakan eksternal yang mempengaruhi kebijakan dalam negeri dan sulit untuk diantisipasi melalui peningkatan pengendalian bagi efektivitas pelaksanaan regulasi dan kebijakan di lapangan;
 - b) Belum sinergisnya antara struktur dan relevansi regulasi di bidang SDM transportasi dengan regulasi sub sektor.

- 5) Kelembagaan

- a) Sinkronisasi perencanaan SDM transportasi antar *stakeholder* (subsektor, Pemda, operator) dalam pelaksanaan program/kegiatan;
- b) Koordinasi antar institusi yang belum optimal dalam pengelolaan pembangunan SDM Nasional (Kemenristekdikti, KemenakerTrans);
- c) Belum optimalnya peningkatan penguatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);

6) Kinerja Pelayanan

- a) Belum selarasnya *link and match* kebutuhan SDM transportasi dan perubahan kurikulum ke depan yang berbasis teknologi informasi;
- b) Kurikulum silabi, bahan ajar dan metode diklat belum sepenuhnya sesuai dengan pemenuhan kompetensi (*knowledge, skill, and attitude*);
- c) Pola Pendidikan berbasis *boarding school* melalui pola pengasuhan sesuai tuntutan kompetensi dan perubahan yang lebih humanis, inovatif, dinamis, *safe and secure* serta saling asah, asih dan asuh belum merata;
- d) Belum optimalnya pengelolaan kelembagaan menjadi kampus berbasis *entrepreneurship*, memanfaatkan sumber daya seoptimal mungkin untuk menggerakkan roda perekonomian lembaga sebagai lembaga BLU.

7) Pendanaan

- a) Ketergantungan APBN di bidang SDM transportasi masih sangat besar (termasuk untuk membiayai berbagai usulan SDM daerah);
- b) Proporsi anggaran berdasarkan fungsi pendidikan yang belum berimbang;
- c) Perubahan kebijakan penganggaran (pemotongan, realokasi);
- d) Penerapan skema KPBU/KSO di bidang transportasi darat masih terbatas;
- e) Adanya kebutuhan pembiayaan afirmasi SDM tertinggal, terdepan, dan terluar;
- f) Perlunya peningkatan skema pembiayaan diklat bersumber Badan Layanan Umum (BLU).

c. Arah Kebijakan Dan Strategi

Berdasarkan sasaran pembangunan infrastruktur transportasi tahun 2015-2019 serta melihat permasalahan yang terjadi selama perodesasi pencapaian kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan, maka diperlukan arah

kebijakan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang dapat memberikan pola peningkatan kedepannya terhadap kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan terutama mengatasi permasalahan sebagaimana tersebut diatas, adapun arah dan kebijakan tersebut dapat di kelompokkan sebagai berikut :

- 1) Pemerataan kesempatan, keikutsertaan masyarakat di seluruh wilayah NKRI dalam memperoleh pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dibidang transportasi;
- 2) Mendorong peran swasta untuk ikut meningkatkan kontribusi dalam pengembangan SDM transportasi;
- 3) Peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas serta kinerja lembaga pendidikan dan pelatihan melalui penyempurnaan kelembagaan dan pembentukan PK BLU;
- 4) Penyediaan pendidik bersertifikat dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan;
- 5) Pengembangan kurikulum silabi sesuai dengan pengembangan IPTEK;
- 6) Pemanfaatan sistem informasi manajemen SDM transportasi dalam mendukung pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- 7) Pembiayaan kreatif melalui pengelolaan professional yang menitikberatkan kepada kerjasama pemerintah dan swasta dan inovasi pembiayaan lainnya.

Berdasarkan arah kebijakan diatas diperoleh strategi Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebagai berikut :

- 1) Menyusun *Man Power Planning* SDM Transportasi;
Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang jumlah dan kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia Perhubungan baik sumber daya manusia aparatur maupun non aparatur (masyarakat) yang akan digunakan sebagai data utama dalam penyelenggaraan berbagai program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan guna menyediakan dan mengembangkan sumber daya manusia Perhubungan sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Menyusun *Training Needs Analysis* (TNA) SDM Transportasi di tingkat Pusbang bekerja sama dengan subsektor lainnya;
Diklat transportasi yang selama ini dilaksanakan masih belum sepenuhnya terkoordinasi dengan subsektor khususnya dalam menggali kebutuhan SDM baik kompetensi maupun kuantitas yang dibutuhkan, sehingga penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan masih belum efektif,

efisien dan tepat sasaran. Untuk kedepannya BPSDMP mengharapkan program diklat menjadi salah satu komponen utama dalam penentuan *man power planning* SDM Pererhubungan, untuk itulah dibutuhkan penyusunan *Training Needs Analysis*.

- 3) Mengembangkan Kualitas dan Kapasitas Diklat SDM Transportasi;
Dalam upaya pengembangan kapasitas diklat dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana diklat melalui perbaikan, pembangunan, modernisasi dan optimalisasi sarana dan prasarana diklat. Perbaikan dan/atau pembangunan prasarana di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan dapat dilakukan secara sistematis, terencana, terukur dan berkelanjutan, dengan indikator terpenuhinya standar sarana prasarana sesuai konvensi nasional dan internasional.

Strategi pembangunan sarana dan prasarana diklat dilakukan berdasarkan pertimbangan akan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di wilayah NKRI baik untuk diklat transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian. Selain pembangunan kampus baru juga dilakukan pembangunan berupa pengembangan kampus di lingkungan UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan guna meningkatkan kapasitas dalam pencapaian target pemenuhan kebutuhan SDM Transportasi. Untuk menunjang terselenggaranya diklat tersebut, BPSDMP Perhubungan melakukan pengadaan, peningkatan dan rehabilitasi sarana diklat seperti alat praktek, simulator dan sarana penunjang lainnya yang berbasis IT khususnya elektronika seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- 4) Meningkatkan kualitas SDM;
Tenaga pengajar/pendidik dan kependidikan merupakan faktor penting dalam menggerakkan kapasitas diklat SDM Transportasi. Tenaga pengajar di lingkungan BPSDMP Perhubungan yang terdiri dari Dosen, Widyaiswara dan Instruktur serta tenaga kependidikan seperti administrasi, laboran dan teknisi perlu dilakukan *upgrading skill* dan kompetensi secara berkala guna mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan isu-isu transportasi dunia sehingga kualitas lulusan yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan perkembangan dunia transportasi. Perbaikan kualitas dosen dapat melalui (pemagangan, studi banding dan beasiswa S2/S3).
- 5) Meningkatkan pengelolaan lembaga diklat berbasis IT;

Strategi lain perlu dilakukan khususnya meningkatkan modernisasi pengelolaan lembaga diklat yang saat ini sudah banyak berbasis teknologi. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi di bidang transportasi yaitu :

- a) Mengubah metode pendidikan dengan mengedepankan sistem pendidikan *e-learning*, pemanfaatan teknologi informasi, serta membentuk LSP-1;
 - b) Mengubah pelayanan kepada peserta diklat dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kepada peserta diklat melalui layanan berbasis IT, meliputi pendaftaran, pembelajaran, *tracer* alumni dunia kerja, pengelolaan keuangan dan pelaporan;
 - c) Khusus pengelolaan keuangan baik penerapan efisiensi anggaran, maupun pengendalian resiko berbasis IT perlu diterapkan, agar tercipta akuntabilitas dan transparansi lembaga.
- 6) Menata Regulasi Penyelenggaraan Diklat SDM Transportasi;
Bentuk, struktur, sistem dan organisasi harus senantiasa menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan SDM Transportasi yaitu Restrukturisasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang disertai dengan penyiapan regulasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan SDM transportasi.

Salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan SDM transportasi melalui restrukturisasi kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang disertai dengan penyiapan regulasi. Restrukturisasi kelembagaan mencakup peningkatan status lembaga pendidikan serta pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di seluruh UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan, peningkatan Balai Pendidikan dan Pelatihan menjadi Pendidikan Tinggi (Politeknik/Akademi), dan eselonisasi atau penyempurnaan eselon (peningkatan eselon) untuk beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT), penyempurnaan organisasi sekolah tinggi menjadi institut dan juga harus terbuka terhadap organisasi multimoda transportasi dalam rangka ikut mendukung sistem logistik nasional serta pembentukan unit dalam organisasi yang secara khusus menangani dan mengelola kinerja pegawai Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

Restrukturisasi kelembagaan dapat terwujud melalui penyusunan dokumen peraturan baik aspek legal maupun dokumen aspek teknis lainnya guna mendorong percepatan strukturisasi kelembagaan lainnya.

7) Meningkatkan Kualitas Lulusan;

Badan Pengembangan SDM Perhubungan merupakan suatu organisasi yang bersifat dinamis, sehingga diperlukan upaya yang senantiasa memperhatikan dan menganalisis dinamika lingkungan strategis yang ada, baik isu strategis nasional dan isu strategis internasional.

Strategi lainnya untuk meningkatkan kualitas lulusan adalah :

- a) Perbaiki Kurikulum pada sekolah-sekolah dibawah Badan Pengembangan SDM Perhubungan dengan persentase pendidikan: 70% praktek dan 30% teori; dan menyelenggarakan Diklat Pemberdayaan Masyarakat untuk memperoleh sertifikat kompetensi maupun pelatihan bagi para lulusan dengan kategori masyarakat umum maupun SMK;
- b) Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;
- c) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana;
- d) Menerapkan *Total Quality Management in Education*.

8) Meningkatkan Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi;

Peningkatan penyerapan lulusan diklat dapat dilakukan dengan melakukan inventarisasi data lulusan diklat transportasi melalui penyusunan database lulusan diklat di lingkungan BPSDM Perhubungan, serta upaya promosi dan sosialisasi secara optimal dalam skala yang lebih luas. Komitmen bersama dan kerjasama dengan *stakeholder*, baik dalam skala nasional maupun internasional perlu dilakukan sebagai salah satu upaya percepatan penyerapan lulusan diklat transportasi.

9) Pengembangan Kerjasama Pemerintah Dan Swasta dalam Pengembangan SDM Transportasi;

Dalam penyelenggaraan pengembangan SDM transportasi masih terdapat kendala keterbatasan baik secara kualitas dan kuantitas SDM juga dari segi finansial, karena itu diperlukan solusi atas persoalan tersebut dengan melibatkan berbagai *stakeholder* , misalnya pihak swasta, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan *Non Governmental Organization* (NGO), serta dan lain-lain. Keterlibatan berbagai pihak ini memiliki peran penting untuk membantu mengingat tidak semua aktivitas pengembangan SDM mampu dikerjakan sendiri terutama dalam hal ketersediaan kuantitas, *skill* SDM dan finansial.

I.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2024 ini menyajikan pencapaian kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan selama tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan tahun 2024 sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang penjelasan umum organisasi, dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

b. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam Bab II ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam Perencanaan dan Perjanjian Kinerja (Dokumen Perjanjian Kinerja) pada tahun bersangkutan.

c. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 1) Tahapan Pengukuran Kinerja
- 2) Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Tahun 2024, dan analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024;
- b) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020-2024 terhadap target Perjanjian Kinerja pada Tahun 2020-2024;

- c) Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2020-2024 terhadap target kinerja pada tahun 2020-2024 dalam Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.
- 3) Analisis Efisiensi Sumber Daya
- 4) Capaian Keberhasilan Kinerja Lainnya Badan Pengembangan SDM Perhubungan
- 5) Realisasi Anggaran
 - a) Alokasi Total Anggaran Tahun 2024;
 - b) Analisis dana yang tidak terserap oleh Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

d. BAB IV PENUTUP

- 1) Kesimpulan (berisi Pencapaian Kinerja Unit Kerja dan Prestasi Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2024)
- 2) Saran tindak lanjut (sebagai Tindak Lanjut dari Komponen SAKIP)

e. LAMPIRAN - LAMPIRAN

Dalam memperjelas Laporan Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2024, dapat dilampirkan Tabel Capaian Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2024, Tabel Peraturan Perundangan yang dilegalkan Tahun 2024 (jika diperlukan), Tabel Rekapitulasi Realisasi Daya Serap Per Triwulan TA. 2024, Tabel Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2024, Tabel Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2024 dan Tabel Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 URAIAN SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

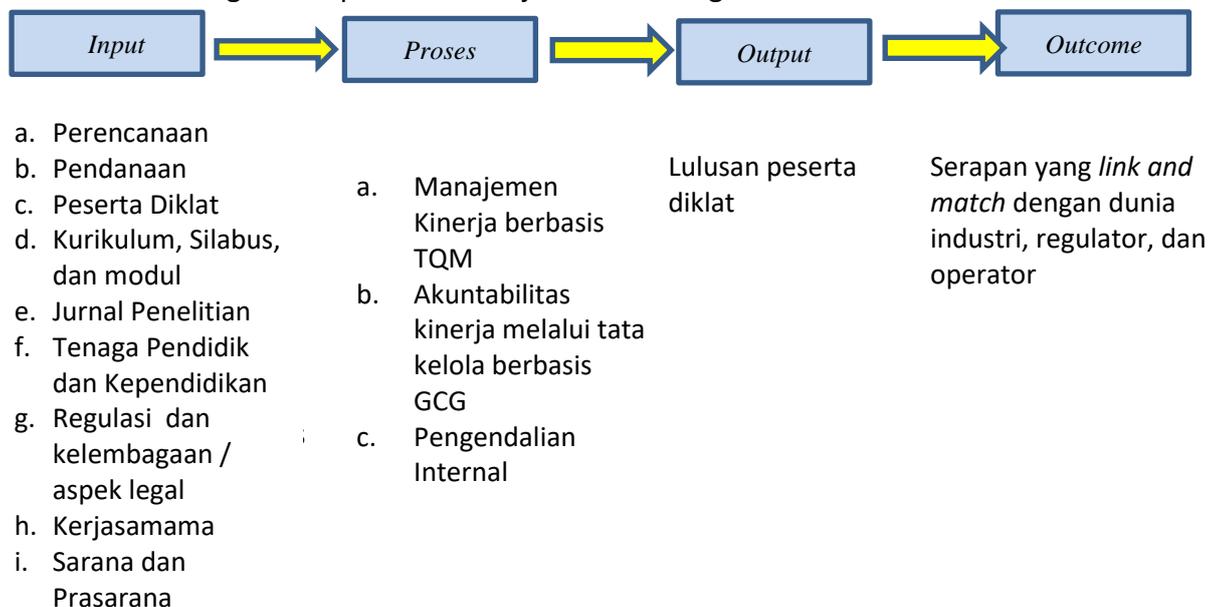
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Naskah Teknokratik RPJMN 2020-2024 yang disusun Bappenas, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, yang mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L). Rencana strategis yang disusun mengakomodir pemenuhan SDM transportasi yang diusahakan selaras antara kebutuhan SDM dengan pengembangan sarana dan prasarana transportasi, kebutuhan regulator, operator maupun industri, melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan.

RENSTRA K/L yang disusun oleh BPSDM Perhubungan selanjutnya diturunkan ke dalam pagu anggaran sebagai justifikasi kinerja anggaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Anggaran BPSDM Perhubungan yang semula masuk dalam dua fungsi berubah menjadi hanya satu fungsi, yaitu fungsi Pendidikan dan satu program yaitu “Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan” serta tetap dengan 8 (delapan) kegiatan yaitu :

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat;
- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut;
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara;
- d. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya;
- e. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan;
- f. Pendidikan Tinggi SDM Perhubungan Darat dan Perkeretaapian;
- g. Pendidikan Tinggi SDM Perhubungan Laut;
- h. Pendidikan Tinggi SDM Perhubungan Udara.

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang didukung oleh 8 (delapan) kegiatan meliputi matra darat, laut dan udara difokuskan pada aspek *outcome* yaitu serapa lulusan yang dapat diterima oleh dunia kerja baik

di regulator, industri, maupun operator. Melalui strategi-strategi sebagaimana terdapat pada BAB II, maka selanjutnya diturunkan sasaran-Sasaran Program yang dapat diukur melalui Indikator Kinerja Utama. Sasaran Program tersebut mengikut alur proses kinerja yang terbagi dalam *input*, *process* dan *output*. *Input* menggambarkan tentang perencanaan yang matang baik aspek makro yaitu perencanaan kebutuhan SDM yang kompatibel dengan jumlah sarana prasarana dari sub sektor, maupun keinginan dunia industri, serta perencanaan pola penerimaan peserta, termasuk anggaran, perencanaan peserta diklat yang diterima yang juga mempertimbangkan dari sisi kualitas penerimaan, ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasana, kurikulum dan modul, pola kerjasama, serta kelembagaan, sedangkan proses menitikberatkan pada akuntabilitas kinerja layanan termasuk keuangan dan tata kelola yang bersih (*Good Clean Government*) serta peningkatan kualitas yang berkesinambungan. Adapun alur kinerja adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Alur Kinerja BPSDM Perhubungan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020–2024 maka diperoleh Sasaran Program pada Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan termasuk Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang mengakibatkan penyesuaian terhadap Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) yang lebih berorientasi kepada capaian *outcome* sehingga lebih menggambarkan capaian kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

a. Target Kinerja pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengembangan SDM Perhubungan 2020 - 2024

Target Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan 2020 - 2024 yang telah di tuangkan dalam dokumen RENSTRA Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2020-2024 terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Program (IKP). Pada tahun 2022, Indikator Kinerja Program (IKP) Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat *Class Action* oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan baru ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) Badan Pengembangan SDM Perhubungan pada tahun 2022 sesuai dengan SK.59/BPSDMP-2022 tanggal 6 April 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2022.

Target Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan 2020 - 2024 yang telah di tuangkan dalam dokumen RENSTRA Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1 Target RENSTRA Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan 2020 – 2024

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) | SATUAN | TARGET | | | | | |
|----|---|---------------------------------|--|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| A | SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 1 | IKP1. Indeks RB Kementerian Perhubungan | Indeks | 78,00 | 79,00 | 79,50 | 80,00 | 80,50 |
| | | 2 | IKP2. Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran | % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | SP.WA.02. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum | 2 | IKP2. Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat <i>Class Action</i> oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan | Rasio | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| C | SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi Yang Kompeten | 3 | IKP3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten | % | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| | | a. | IKK2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi | % | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| | | b. | IKK3. Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi | % | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |

Sumber Data: Dokumen Rencana Strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan, 2020-2024

b. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2020-2024 yang terdiri dari sasaran, indikator kinerja serta target yang ditetapkan sebelum DIPA tahun anggaran 2024 ditetapkan.

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 Badan Pengembangan SDM Perhubungan

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) | TARGET | SATUAN |
|----|---|--|--------|--------|
| A | SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 1 IKP1. Indeks RB Kementerian Perhubungan | 80,500 | Indeks |
| B | SP.WA.02. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum | 2 IKP2. Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat <i>Class Action</i> oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan | 0,10 | Rasio |
| C | SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi Yang Kompeten | 3 IKP3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten | 85,000 | % |
| | | a. IKK2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi | 85,000 | % |
| | | b. IKK3. Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi | 85,000 | % |

Sumber Data: Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengembangan SDM Perhubungan, 2024

II.2 PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN TAHUN 2024

Pada konteks implementasi AKIP, Perjanjian Kinerja adalah rencana kinerja tahunan (*annual performance plan*) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2020-2024, yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan. Perjanjian Kinerja ini untuk merinci dan memperjelas target-target kinerja yang akan dicapai kurun waktu satu tahun serta untuk mempermudah terkait dengan sumber daya dan anggaran yang telah ditetapkan (pagu definitif).

Maksud Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan tahun 2024 adalah untuk mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dalam mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2020-2024, yang memuat 3 (tiga) Sasaran Program dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Program (IKP). Sesuai dengan SK.59/BPSDMP-2022 tanggal 6 April 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, terdapat perubahan sasaran dan indikator dari Dokumen RENSTRA dan dokumen RKT. Adapun perincian dari masing-masing Sasaran Program adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2024

| SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) | SATUAN | TARGET PK AWAL | TARGET PK REVISI |
|--|--|--------|----------------|------------------|
| SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 1 IKP1. Indeks RB Kementerian Perhubungan | Indeks | 80,500 | 80,570 |
| SP.WA.02. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum | 2 IKP2. Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan | % | 0,100 | 0,100 |
| SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi Yang Kompeten | 3 IKP3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten | % | 90,375 | 91,726 |
| | IKK2. Persentase Lulusan Diklat A. Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi | % | 93,077 | 97,441 |
| | 1) Jumlah Lulusan Diklat yang Bersertifikat Kompetensi: | Orang | 375.654 | 438.296 |
| | a. Jumlah lulusan Diklat yang dihasilkan oleh UPT dibawah Pusbang Darat | Orang | 21.021 | 21.359 |
| | - Lulusan Diklat Pembentukan | Orang | 1.693 | 1.693 |
| | - Lulusan Diklat Teknis | Orang | 5.006 | 5.505 |
| | - Lulusan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 616 | 522 |
| | - Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 13.648 | 13.558 |
| | - Lulusan Diklat Penjenjangan | Orang | 24 | 47 |

| SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) | SATUAN | TARGET PK AWAL | TARGET PK REVISI |
|-----------------|---|--------------|----------------|------------------|
| | - Lulusan Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Darat | Orang | 34 | 34 |
| | b. Jumlah lulusan Diklat yang dihasilkan oleh UPT dibawah Pusbang Laut | Orang | 340.135 | 401.689 |
| | - Lulusan Diklat Pembentukan | Orang | 3.809 | 2.931 |
| | - Lulusan Diklat Peningkatan | Orang | 2.256 | 23.807 |
| | - Lulusan Diklat Pemutakhiran | Orang | 9.174 | 12.710 |
| | - Lulusan Diklat Penyegaran/Revalidasi | Orang | 56.151 | 71.285 |
| | - Lulusan Diklat Teknis | Orang | 185.698 | 208.659 |
| | - Lulusan Diklat Penjenjangan | Orang | 9.159 | 11.674 |
| | - Lulusan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 1.164 | 1.659 |
| | - Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 72.663 | 68.903 |
| | - Lulusan Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Laut | Orang | 61 | 61 |
| | c. Jumlah lulusan Diklat yang dihasilkan oleh UPT dibawah Pusbang Udara | Orang | 14.498 | 15.248 |
| | - Lulusan Diklat Pembentukan | Orang | 905 | 891 |
| | - Lulusan Diklat Teknis | Orang | 3.269 | 5.397 |
| | Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 9.740 | 8.075 |
| | - Lulusan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 536 | 885 |
| | - Lulusan Diklat Penjenjangan | Orang | 48 | 0 |
| | 2) Jumlah Target Lulusan Diklat yang Bersertifikat Kompetensi: | Orang | 403.595 | 449.808 |
| | a. Jumlah lulusan Diklat yang dihasilkan oleh UPT dibawah Pusbang Darat | Orang | 23.125 | 23.384 |
| | - Lulusan Diklat Pembentukan | Orang | 2.467 | 2.467 |
| | - Lulusan Diklat Teknis | Orang | 5.601 | 6.044 |
| | - Lulusan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 626 | 532 |
| | - Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 14.350 | 14.260 |
| | - Lulusan Diklat Penjenjangan | Orang | 47 | 47 |
| | - Lulusan Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Darat | Orang | 34 | 34 |

| SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) | SATUAN | TARGET PK AWAL | TARGET PK REVISI |
|-----------------|--|--------|----------------|------------------|
| | b. Jumlah lulusan Diklat yang dihasilkan oleh UPT dibawah Pusbang Laut | Orang | 363.906 | 410.212 |
| | - Lulusan Diklat Pembentukan | Orang | 3.967 | 3.262 |
| | - Lulusan Diklat Peningkatan | Orang | 2.256 | 3.408 |
| | - Lulusan Diklat Pemutakhiran | Orang | 9.528 | 13.125 |
| | - Lulusan Diklat Penyegaran/Revalidasi | Orang | 61.327 | 77.196 |
| | - Lulusan Diklat Teknis | Orang | 199.014 | 225.434 |
| | - Lulusan Diklat Penjurangan | Orang | 9.538 | 12.517 |
| | - Lulusan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 1.267 | 1.766 |
| | - Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 76.945 | 73.440 |
| | - Lulusan Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Laut | Orang | 64 | 64 |
| | c. Jumlah lulusan Diklat yang dihasilkan oleh UPT dibawah Pusbang Udara | Orang | 16.564 | 16.212 |
| | - Lulusan Diklat Pembentukan | Orang | 906 | 891 |
| | - Lulusan Diklat Teknis | Orang | 5.334 | 6.351 |
| | Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 9.740 | 8.075 |
| | - Lulusan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 536 | 895 |
| | - Lulusan Diklat Penjurangan | Orang | 48 | 0 |
| | IKK3. Persentase Penyerapan B. Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi | % | 88,574 | 87,916 |
| | 1) Jumlah Lulusan Diklat Pembentukan pada tahun 2023 yang telah mendapat pekerjaan pada tahun 2024 ≤ 1 tahun | Orang | 4.977 | 4.940 |
| | 2) Jumlah keseluruhan lulusan Diklat Pembentukan pada tahun 2023 | Orang | 5.619 | 5.619 |

Sumber Data: Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan, 2024

Pada tahun 2024 ini Badan Pengembangan SDM Perhubungan melakukan revisi target kinerja, hal ini dikarenakan adanya penghematan/pemotongan dan pengurangan pagu dalam APBN-P serta penambahan BLU dan PNPB menjadi sebesar Rp. 4.196.255.953.000,-.

Kegiatan strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Revisi pada tahun 2024 sesuai tabel berikut ini :

Tabel 2.4 Kegiatan Strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan, 2024

| NO | KEGIATAN |
|-----------|---|
| 1 | PUSAT PENGEMBANGAN SDM APARATUR PERHUBUNGAN |
| 1 | Pengadaan Komputer Lab Komputer |
| 2 | Pengadaan AC Asrama C |
| 2 | BALAI DIKLAT PEMBANGUNAN KARAKTER SDM TRANSPORTASI |
| 1 | Pengadaan Rak Penyimpanan Barang Peserta Diklat |
| 3 | POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI |
| 1 | Pembangunan Gedung Bimbingan Ketarunaan |
| 2 | Perlengkapan Gedung Bimtar |
| 3 | Pembangunan Gedung Laboratorium |
| 4 | Peralatan Gedung Laboratorium |
| 5 | Dinding Penahan Tanah Gedung Laboratorium |
| 6 | Pembangunan Gedung Serbaguna |
| 7 | Peralatan Gedung Serbaguna |
| 8 | Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi |
| 4 | POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN TEGAL |
| 1 | Pengadaan Peralatan Pelengkap Gedung Workshop RSTJ |
| 1 | Perencanaan RIP PKTJ |
| 5 | POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD (PTDI-STTD) |
| 1 | Fasilitas Pembelajaran |
| 6 | POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN |
| 1 | Pengadaan Simulator High Speed Train dan Mass Rapid Transit |
| 2 | Pengadaan Peralatan Lab. Material Jalan Rel |
| 3 | Pengadaan Peralatan Simulator OCC System dengan Mock-up LRT Jabodebek |
| 4 | Pengadaan Furniture Lab Persinyalan dan PPKA |
| 5 | Pembangunan Gedung Lab Persinyalan dan PPKA |
| 6 | Manajemen Konstruksi |
| 7 | Pengadaan Buku Perpustakaan |
| 7 | POLITEKNIK TRANSPORTASI SDP PALEMBANG |
| 1 | ECDIS Simulator |
| 8 | BALAI DIKLAT TRANSPORTASI DARAT MEMPAWAH |
| 1 | Pembangunan Gedung Poliklinik |
| 2 | Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Klinik |
| 9 | POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG |
| 1 | Pengadaan Furniture Asrama |
| 10 | POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT |
| 1 | Pengembangan Smart Class |

| NO | KEGIATAN | |
|-----------|---|---|
| | 2 | Pembangunan Gedung Asrama C |
| | 3 | Jasa Manajemen Konstruksi Pengawasan Pembangunan Gedung Asrama C |
| | 4 | Review Master Plan dan DED |
| | 5 | Pengaspalan Jalan |
| | 6 | Pengadaan Perlengkapan Pembelajaran |
| 11 | POLITEKNIK PELAYARAN MALAHAYATI | |
| | 1 | Pembangunan Gedung Perpustakaan |
| | 2 | Penbanguan Gedung Gudang |
| | 3 | Pembangunan Main Entrace |
| 12 | POLITEKNIK PELAYARAN SULAWESI UTARA | |
| | 1 | High Voltage Simulator |
| | 2 | Smart English Laboratory |
| | 3 | Steam & Turbine Gas Simulator |
| | 4 | Instalasi Jaringan Internet (Dormitory 5 Lantai dan Kelas 5 Lantai) |
| | 5 | Instalasi Jaringan CCTV (Dormitory 5 Lantai dan Kelas 5 Lantai) |
| 13 | POLITEKNIK PELAYARAN SORONG | |
| | 1 | Pengadaan Buku IMO (Buku Buku Perpustakaan) |
| | 2 | Pengadaan Ranjang Taruna (Perlengkapan Asrama Taruna) |
| | 3 | Dokumen Master Plan Poltekpel Sorong |
| | 4 | Pengadaan Peralatan Laboratorium (PLC, Steam & Boiler, Kimia, Fisika) |
| 14 | POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN | |
| | 1 | Pekerjaan Fisik Pembangunan Ruang Kelas 2 |
| | 2 | Manajemen Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas 2 |
| 15 | POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG | |
| | 1 | Pengadaan Lab Ship Stabiliti |
| | 2 | Pengadaan Lab Electrical |
| 16 | POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR | |
| | 1 | Pengadaan Komputer Perpustakaan |
| | 2 | CCTV Area Kampus (Perlengkapan Unit Informatika) |
| | 3 | Alat Drum Band (Unit Olahraga Seni) |
| | 4 | Perlengkapan Peralatan Asrama |
| | 5 | Pekerjaan Fisik Pembangunan Jalan Kampus Terpadu (Tahap III) |
| | 6 | Pengawasan Konstruksi Pembangunan Jalan Kampus Terpadu (Tahap III) |
| | 7 | Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Gate |
| | 8 | Pengawasan Konstruksi Pembangunan Main Gate |
| 17 | POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA | |
| | 1 | Pengadaan Smart Port Simulation |
| | 2 | Pengadaan Genset 1000 KVA |
| | 3 | Pembangunan Ruang Kelas Gedung T Tahap III |
| | 4 | Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Gedung T |
| 18 | SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN | |
| | 1 | Lab Bahasa |
| 19 | BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN (BP3IP) | |
| | 1 | Electronic Laboratory |

| NO | KEGIATAN |
|-----------|--|
| 20 | PUSAT PENGEMBANGAN SDMP UDARA |
| 1 | Pekerjaan Parkiran Motor |
| 2 | Renovasi rumah dinas Eselon III |
| 3 | Renovasi rumah dinas pegawai |
| 21 | POLITEKNIK PENERBANGAN (POLTEKBANG) MEDAN |
| 1 | AC STANDING 5 PK |
| 2 | AC Split 2 PK (PIPA 10Mtr) |
| 3 | AC Split 2 PK (PIPA 5Mtr) |
| 22 | BALAI DIKLAT PENERBANGAN (BP3) CURUG |
| 1 | Laptop |
| 2 | Proyektor |
| 3 | Printer |
| 4 | Pengadaan PC |
| 5 | Penyusunan DED Penerangan Jalan Umum (ganti 3 kerjaan dibawah 100) |
| 23 | POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG (PPIC) |
| 1 | Rehabilitasi Hanggar 1 dan 2 |
| 2 | Konsultasi Pengawas Rehabilitasi Hanggar 1 dan 2 |
| 3 | Overhaul Pesawat Latih Sayap Tetap Single Engine (PK-ARA, PK-ARG, PK-ARM, PK-ARR) |
| 4 | Overhaul Pesawat Latih Sayap Tetap Single Engine (PK-ARC, PK-ARN, PK-ARO, PK-ART) |
| 5 | Pengadaan Penyulingan Air Minum untuk Taruna di Asrama Curug I |
| 6 | Asuransi Onseat (Fixed Wing dan Rotary) |
| 7 | Pengadaan Penerangan Jalan Kampus |
| 24 | POLITEKNIK PENERBANGAN (POLTEKBANG) MAKASSAR |
| 1 | Penggantian Peralatan Solar Cell |
| 2 | Pengadaan Peralatan Laboratorium Bangunan dan Landasan |
| 3 | Pengadaan Marching Band/drum band dan Pengadaan Peralatan Esktrakulikuler |
| 25 | AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI |
| 1 | Pengadaan X-Ray, WTMD, Peralatan Praktek Avsec dan DG |
| 2 | Pengadaan Fasilitas Penunjang Operasional Seaplane |
| 3 | Pengadaan Shop dan Tools Pesawat |
| 4 | Pengadaan Perlengkapan Olahraga Taruna |
| 5 | Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan |
| 6 | Review Masterplan dan DED |
| 7 | Pengadaan Suku Cadang Untuk Inspeksi Pesawat Latih Sayap Tetap (50 Jam dan 100 Jam) Multi Engine |
| 8 | Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi |
| 9 | Overhaul Pesawat Latih Single Engine |
| 10 | Asuransi Awak dan Pesawat Latih Cessna (Landplane), Cessna (Seaplane) dan Piper Seneca |
| 26 | POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA |
| 1 | Ambulans (Emergency) |
| 2 | Ambulans (transportasi) |
| 3 | Pengadaan Laboratorium Multimedia |
| 27 | POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG |
| 1 | Konstruksi Renovasi Gedung Prodi MBU |
| 2 | Jasa Konsultan Pengawas Renovasi Gedung Perkantoran Prodi Manajemen Bandar Udara |

| NO | KEGIATAN | |
|-----------|--|---|
| | 3 | Pengadaan bus sedang |
| 28 | POLITEKNIK PENERBANGAN JAYAPURA | |
| | 1 | Reviu DED Pagar Lahan Pendidikan Kampus |
| | 2 | Pengadaan Meubeulair Gedung Kelas A |
| | 3 | Biaya Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Kelas A |
| | 4 | Biaya Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Kelas A |
| | 5 | Pengadaan Peralatan Praktek Laboratorium Multimedia |
| | 6 | Instalasi CCTV dan Jaringan Fiber Optic |

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat BPSDMP adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Dosen BPSDMP dan Aparatur Kementerian Perhubungan;
- b. *Assessment* Dosen dan *Feedback* di Lingkungan BPSDM Perhubungan;
- c. Seleksi Penerimaan Calon Taruna (SIPENCATAR).

III.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan. Akuntabilitas kinerja meliputi pencapaian yang dapat menjawab permasalahan secara optimal, kinerja melalui pendekatan kuantitas dan kualitas. Akuntabilitas juga meliputi tata kelola yang bersih dan pengendalian internal, melalui penerapan metode pengukuran mutu terpadu yang tergambar dalam kualitas lulusan yang diterima dunia kerja dan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Pada dokumen Laporan Kinerja Tahun 2024 ini tidak hanya menampilkan capaian kinerja pada tahun 2024, namun mengacu pada Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dokumen laporan ini juga memuat data capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir sesuai dokumen RENSTRA BPSDM yaitu tahun 2020 s.d 2024, hal ini dimaksudkan agar pihak yang berkepentingan terhadap laporan kinerja ini mendapat kelengkapan informasi sebagai bahan evaluasi perbaikan /peningkatan kinerja institusi masa mendatang.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara menghitung prosentase capaian kinerja setiap Indikator Kinerja Program (IKP), dimana realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja adalah:

- a. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Tahun 2024, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian indikator kinerja kegiatan tahun 2024;
- b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020-2024 terhadap target Perjanjian Kinerja tahun 2020-2024;
- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020-2024 terhadap target kinerja pada tahun 2020-2024 dalam RENSTRA Badan Pengembangan SDM Perhubungan tahun 2020-2024.

III.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN TAHUN 2024

- a. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan, Serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024.**

Pada awal tahun 2024 telah ditetapkan target yang harus dicapai oleh Badan Pengembangan SDM Perhubungan, namun pada pelaksanaannya ada yang tidak mencapai target, mencapai target, bahkan melebihi target. Pengukuran kinerja dilakukan dengan melihat capaian realisasi dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang berbasis *outcome*.

Berdasarkan Indikator Kinerja Program (IKP) yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 Badan Pengembangan SDM Perhubungan ditargetkan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Transportasi Darat, Laut, Udara, dan Perkeretaapian dengan realisasi sebagaimana pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1 Realisasi Capaian Kinerja BPSDM Perhubungan Tahun 2024

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) | SATUAN | TARGET PK REVISI | REALISASI CAPAIAN TAHUN 2024 | | | | % CAPAIAN | |
|-----------------------------|--|---------------------------------|---|------------------|------------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|
| | | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| A | SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 1 | IKP1. Indeks RB Kementerian Perhubungan | % | 80,570 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 85,260 | 105,821 |
| Rata - Rata Capaian Sasaran | | | | | | | | | | 105,821 |

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) | | SATUAN | TARGET PK REVISI | REALISASI CAPAIAN TAHUN 2024 | | | | % CAPAIAN | |
|-----------------------------|---|---------------------------------|---|--|------------------|------------------------------|---------|---------|---------|-----------|--|
| | | | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| B | SP.WA.02. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum | 2 | IKP2. Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan | % | 0,100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,000 | |
| Rata - Rata Capaian Sasaran | | | | | | | | | | 110,000 | |
| C | SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi Yang Kompeten | 3 | IKP3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten | % | 91,726 | 50,419 | 73,605 | 80,158 | 95,018 | 103,589 | |
| | | | IKK2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi | % | 97,441 | 31,440 | 84,040 | 90,357 | 116,615 | 119,678 | |
| | | | Jumlah Lulusan Diklat yang Bersertifikat Kompetensi: | Orang | 438.296 | 119.223 | 263.768 | 406.432 | 524.544 | | |
| | | | a | Jumlah lulusan Diklat yang dihasilkan oleh UPT dibawah Pusbang Darat | Orang | 21.359 | 6.899 | 14.928 | 18.135 | 23.884 | |
| | | | - | Lulusan Diklat Pembentukan | Orang | 1.693 | 0 | 2.761 | 1.555 | 1.726 | |
| | | | - | Lulusan Diklat Teknis | Orang | 5.505 | 1.184 | 3.442 | 5.498 | 8.630 | |
| | | | - | Lulusan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 522 | 15 | 61 | 327 | 827 | |
| | | | - | Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 13.558 | 5.700 | 8.630 | 10.708 | 12.590 | |
| | | | - | Lulusan Diklat Penjurangan | Orang | 47 | 0 | 0 | 47 | 77 | |
| | | | - | Lulusan Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Darat | Orang | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | |
| | | | b | Jumlah lulusan Diklat yang dihasilkan oleh UPT dibawah Pusbang Laut | Orang | 401.689 | 109.048 | 241.365 | 375.603 | 484.614 | |
| | | | - | Lulusan Diklat Pembentukan | Orang | 2.931 | 367 | 1.523 | 2.211 | 3.115 | |
| | | | - | Lulusan Diklat Peningkatan | Orang | 23.807 | 2.186 | 6.970 | 12.751 | 18.993 | |
| | | | - | Lulusan Diklat Pemutakhiran | Orang | 12.710 | 3.007 | 5.503 | 7.957 | 11.294 | |
| | | | - | Lulusan Diklat Penyegaran/Revalidasi | Orang | 71.285 | 30.746 | 67.319 | 106.738 | 136.977 | |
| | | | - | Lulusan Diklat Teknis | Orang | 208.659 | 56.356 | 112.240 | 170.265 | 237.422 | |
| | | | - | Lulusan Diklat Penjurangan | Orang | 11.674 | 0 | 7.841 | 12.519 | 15.005 | |
| | | | - | Lulusan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 1.659 | 26 | 333 | 696 | 1.443 | |
| | | | - | Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 68.903 | 16.360 | 39.636 | 62.466 | 60.316 | |

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) | SATUAN | TARGET PK REVISI | REALISASI CAPAIAN TAHUN 2024 | | | | % CAPAIAN |
|----|-----------------|--|--------------|------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| | | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | |
| | | - Lulusan Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Laut | Orang | 61 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| | | c Jumlah lulusan Diklat yang dihasilkan oleh UPT dibawah Pusbang Udara | Orang | 15.248 | 3.276 | 7.475 | 12.694 | 16.046 | |
| | | - Lulusan Diklat Pembentukan | Orang | 891 | 0 | 0 | 890 | 891 | |
| | | - Lulusan Diklat Teknis | Orang | 5.397 | 793 | 1.966 | 4.222 | 5.998 | |
| | | Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 8.075 | 2.451 | 5.231 | 6.930 | 8.078 | |
| | | - Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 885 | 32 | 278 | 652 | 1.079 | |
| | | - Lulusan Diklat Penjurangan | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2) Jumlah Target Lulusan Diklat yang Bersertifikat Kompetensi: | Orang | 449.808 | 449.808 | 449.808 | 449.808 | 449.808 | |
| | | a Jumlah lulusan Diklat yang dihasilkan oleh UPT dibawah Pusbang Darat | Orang | 23.384 | 23.384 | 23.384 | 23.384 | 23.384 | |
| | | - Lulusan Diklat Pembentukan | Orang | 2.467 | 2.467 | 2.467 | 2.467 | 2.467 | |
| | | - Lulusan Diklat Teknis | Orang | 6.044 | 6.044 | 6.044 | 6.044 | 6.044 | |
| | | - Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | |
| | | - Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 14.260 | 14.260 | 14.260 | 14.260 | 14.260 | |
| | | - Lulusan Diklat Penjurangan | Orang | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| | | - Lulusan Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Darat | Orang | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| | | b. Jumlah lulusan Diklat yang dihasilkan oleh UPT dibawah Pusbang Laut | Orang | 410.212 | 410.212 | 410.212 | 410.212 | 410.212 | |
| | | - Lulusan Diklat Pembentukan | Orang | 3.262 | 3.262 | 3.262 | 3.262 | 3.262 | |
| | | - Lulusan Diklat Peningkatan | Orang | 3.408 | 3.408 | 3.408 | 3.408 | 3.408 | |
| | | - Lulusan Diklat Pemutakhiran | Orang | 13.125 | 13.125 | 13.125 | 13.125 | 13.125 | |
| | | - Lulusan Diklat Penyegaran/Revalidasi | Orang | 77.196 | 77.196 | 77.196 | 77.196 | 77.196 | |
| | | - Lulusan Diklat Teknis | Orang | 225.434 | 225.434 | 225.434 | 225.434 | 225.434 | |
| | | - Lulusan Diklat Penjurangan | Orang | 12.517 | 12.517 | 12.517 | 12.517 | 12.517 | |
| | | - Lulusan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | |

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) | SATUAN | TARGET PK REVISI | REALISASI CAPAIAN TAHUN 2024 | | | | % CAPAIAN |
|--|-----------------|---|----------|------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | |
| | | - Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 73.440 | 73.440 | 73.440 | 73.440 | 73.440 | |
| | | - Lulusan Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Laut | Orang | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| | | c Jumlah lulusan Diklat yang dihasilkan oleh UPT dibawah Pusbang Udara | Orang | 16.212 | 16.212 | 16.212 | 16.212 | 16.212 | |
| | | - Lulusan Diklat Pembentukan | Orang | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | |
| | | - Lulusan Diklat Teknis | Orang | 6.351 | 6.351 | 6.351 | 6.351 | 6.351 | |
| | | Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 8.075 | 8.075 | 8.075 | 8.075 | 8.075 | |
| | | - Lulusan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | |
| | | - Lulusan Diklat Penjurangan | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | b. Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Pembentukan | % | 87,916 | 63,072 | 66,649 | 73,358 | 80,619 | 91,700 |
| | | - Jumlah Lulusan Diklat Pembentukan pada tahun 2022 yang telah mendapat pekerjaan pada tahun 2023 ≤ 1 tahun | Orang | 4.940 | 3.544 | 3.745 | 4.122 | 4.530 | |
| | | - Jumlah keseluruhan lulusan Diklat Pembentukan pada tahun 2022 | Orang | 5.619 | 5.619 | 5.619 | 5.619 | 5.619 | |
| Rata - Rata Capaian Sasaran | | | | | | | | | 103,589 |
| Total Rata - Rata Capaian Sasaran | | | | | | | | | 106,470 |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai 3 (tiga) Sasaran Program yang terangkum di dalam 1 (satu) program dengan didukung oleh 3 (tiga) Indikator Kinerja Program (IKP). Sasaran Program tersebut telah mewakili *input, proses, output dan outcome* manajemen Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan pada tahun 2024.

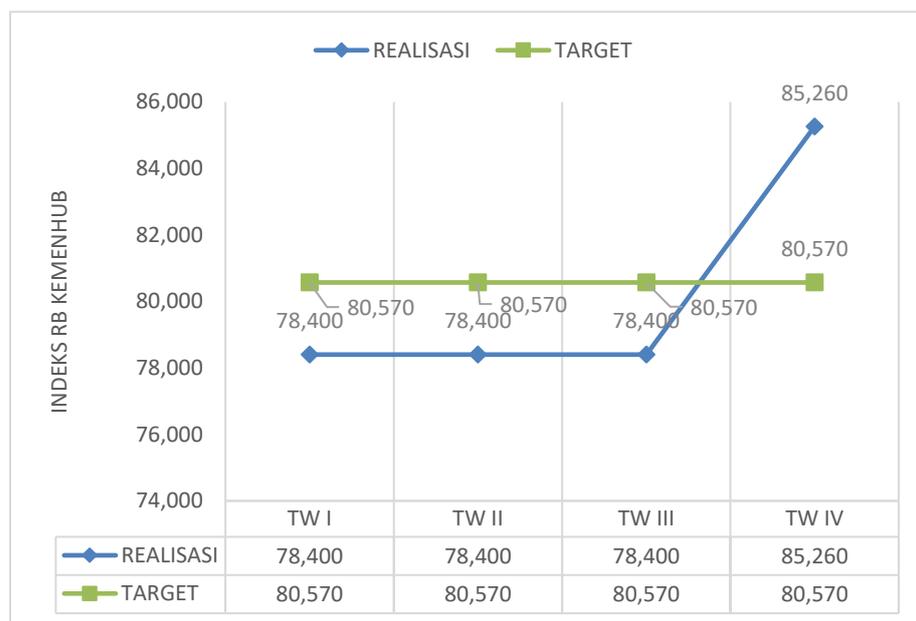
Sepanjang tahun 2024 BPSDM Perhubungan telah berhasil mencapai 3 (tiga) Indikator Kinerja Program (IKP) sesuai dan atau melebihi dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan 2 (dua) Indikator Kinerja Program (IKP) merupakan indikator yang baru sesuai dengan turunan dari Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Kementerian Perhubungan Tahun 2024. Rata-rata pencapaian target Indikator Kinerja Program (IKP) Badan Pengembangan

SDM Perhubungan Tahun 2024 ini adalah sebesar 106,470%. Rinciannya dapat dilihat sebagaimana berikut :

1) Sasaran Program (SP) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu sebagai berikut :

Indikator Kinerja Program (IKP) Indeks RB Kementerian Perhubungan.



Grafik 3.1 Realisasi IKP Indeks RB Kementerian Perhubungan Tahun 2024 Per Triwulan

Pada indikator kinerja utama “Indeks RB Kementerian Perhubungan” nilai target pada tahun 2024 sebesar 80,570. Realisasi nilai Indeks RB Kementerian Perhubungan adalah sebesar 85,260 sebagaimana bisa kita lihat pada Grafik 3.1. Dari realisasi ini dapat kita hitung bahwa capaian untuk indikator ini adalah sebesar 105,821%.

2) Sasaran Program (SP) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu sebagai berikut :

Indikator Kinerja Program (IKP) Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang mendapat *Class Action* oleh Masyarakat

dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang dikeluarkan/ditetapkan.

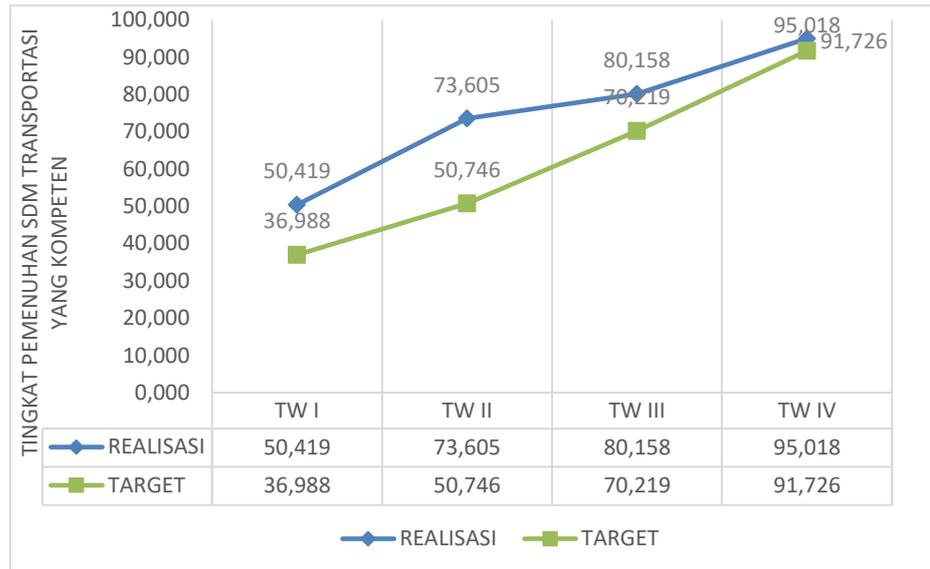


Grafik 3.2 Realisasi IKP Rasio Jumlah Permenhub yang mendapat Class Action Tahun 2024 Per Triwulan

Pada indikator kinerja “Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang mendapat *Class Action* oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang dikeluarkan/ditetapkan” nilai target pada tahun 2024 sebesar 0,10. Realisasi Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang mendapat *Class Action* oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang dikeluarkan/ditetapkan adalah sebesar 0,00 seperti tercantum dalam Grafik 3.2. Dari realisasi ini dapat kita hitung bahwa capaian untuk indikator ini adalah sebesar 110%.

3) Sasaran Program (SP) Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi Yang Kompeten

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten dan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu sebagai berikut :

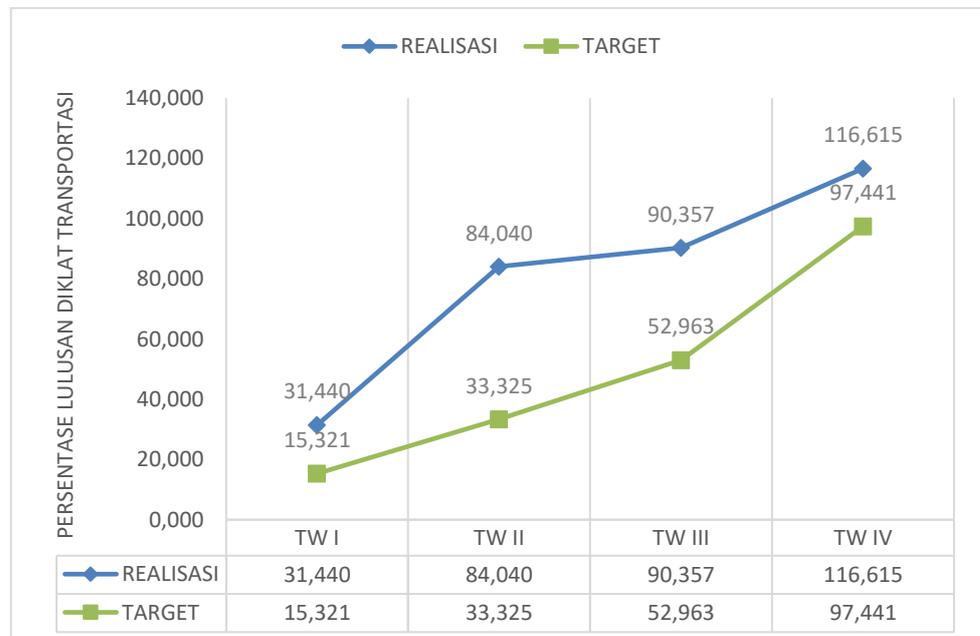


Grafik 3.3 Realisasi IKP Tingkat Pemenuhan Transportasi Yang Kompeten Tahun 2024 Per Triwulan

Pada indikator kinerja utama “Tingkat Pemenuhan Transportasi Yang Kompeten” nilai realisasi pada tahun 2024 sebesar 95,018% dari target sebesar 91,726% seperti pada Grafik 3.3 atau mencapai 103,589% dari target.

Pada IKP 3 ini terdiri dari 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu :

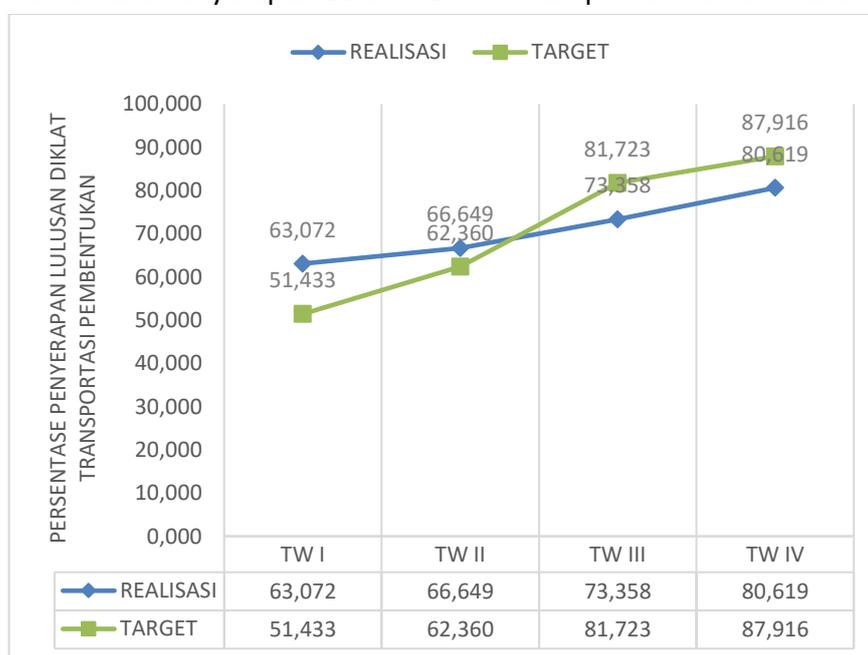
- a) Persentase Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi



Grafik 3.4 Realisasi IKK Persentase Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi Tahun 2024 Per Triwulan

Pada indikator kinerja “Persentase Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi” nilai realisasi pada tahun 2024 sebesar 116,615% dari target sebesar 97,441% seperti tergambar dalam Grafik 3.4 atau mencapai 119,678% dari target.

b) Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Pembentukan



Grafik 3.5 Capaian IKK Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Pembentukan Tahun 2024 Per Triwulan

Pada indikator kinerja “Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Pembentukan” nilai realisasi pada tahun 2024 sebesar 80,619% dari target sebesar 87,916% orang seperti tergambar dalam Grafik 3.5 atau mencapai 91,700% dari target.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Serta Alternatif Solusi terhadap Indikator Kinerja Program (IKP)

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian

Perhubungan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, dan sebagai dasar perencanaan program di tahun berikutnya.

Secara rinci analisis penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan pencapaian akuntabilitas kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi merupakan hasil pengukuran atas kinerja organisasi Kementerian Perhubungan dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian PAN-RB. Pada tahun 2024, Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan ditargetkan sebesar 80,570. Adapun realisasi kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2024 sebesar 85,260. Hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2024 merupakan nilai hasil revaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2023 yang semula adalah 77,45 dengan kategori BB, berubah menjadi sebesar 85,260 dengan kategori A-, sesuai dengan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN-RB Nomor B/646/RB.06/2024 perihal Perubahan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 tanggal 3 Oktober 2024, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 105,821%.

2) Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang mendapat *Class Action* oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang dikeluarkan/ditetapkan Nilai Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran BPSDM Perhubungan adalah sebesar 100%.

Indikator Kinerja Program (IKP) Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapatkan *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan diperoleh dari rasio jumlah peraturan Menteri Perhubungan yang mendapatkan "*class action*" atau gugatan dari masyarakat dibandingkan dengan jumlah Peraturan :

- a) Seluruh regulasi yang dikeluarkan oleh Kemenhub di "*class action*" oleh masyarakat;

b) Seluruh regulasi yang dikeluarkan oleh Kemenhub tidak di “*class action*” oleh masyarakat.

Dengan demikian, semakin rendah nilai rasio yang diperoleh, maka kinerja indikator ini semakin baik.

Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapatkan *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan diperoleh dengan rumus:
$$= (C_{reg} \times W_{reg}) + (C_{kaj} \times W_{kaj}) + (C_{kajst} \times W_{kajst})$$

Keterangan:

C_{reg} : Persentase regulasi Kemenhub yang implementatif

W_{reg} : Bobot regulasi Kemenhub yang implementatif, sebesar 65%

C_{kaj} : Persentase rumusan rekomendasi kebijakan pada (t-2) yang dimanfaatkan/diterima oleh Menhub, sub sektor dan *stakeholder*

W_{kaj} : Bobot rumusan rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan pada (t-2) yang dimanfaatkan/diterima oleh Menhub, sub sektor dan *stakeholder*

C_{kajst} : Persentase rekomendasi kebijakan isu strategis di bidang perhubungan yang dimanfaatkan/diterima oleh Menhub, sub sektor dan *stakeholder*

W_{kajst} : Bobot rekomendasi kebijakan isu strategis di bidang perhubungan yang dimanfaatkan/diterima oleh Menhub, sub sektor dan *stakeholder*

Pada tahun 2024, target Indikator Kinerja Program (IKP) Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapatkan *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan sebesar 0,10. Realisasi indikator kinerja ini pada triwulan IV tahun 2024 sebesar 0, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 110%.

Persentase capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan persentase capaian keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapatkan *Class Action* oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan sudah baik, yang ditandai dengan tidak adanya class action (gugatan) dari masyarakat terhadap

regulasi di bidang perhubungan atas peraturan yang menyangkut Badan Pengembangan SDM Perhubungan pada tahun 2024.

3) Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten

Terwujudnya hasil capaian IKP3 Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan rumus dan bobot pada manual IKU dengan nomor: SK.59/BPSDMP-2022 tanggal 6 April 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebagai berikut :

IKP3 Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten = (Cvokasi x Wvokasi) + (Ckompetensi x Wkompetensi)

Dimana :

Cvokasi : Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Pembentukan (IKK3)

Wvokasi : Bobot Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Pembentukan (60%)

Ckompetensi : Persentase Lulusan Diklat Transportasi yang Bersertifikat Kompetensi (IKK2)

Wkompetensi : Bobot Persentase Lulusan Diklat Transportasi yang Bersertifikat Kompetensi (40%)

Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten dapat diukur dari dua indikator yaitu Persentase Lulusan Diklat yang Bersertifikat Kompetensi dan Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Pembentukan yang dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten

| Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target PK Revisi | Realisasi (%) | Capaian (%) |
|--|---|------------------|---------------|-------------|
| Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten | Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten | 91,726 | 95,018 | 103,589 |
| | a. Persentase Lulusan Diklat Transportasi yang Bersertifikat Kompetensi | 97,441 | 116,615 | 119,678 |
| | b. Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi | 87,916 | 80,619 | 91,700 |

Untuk indikator dimaksud dapat dirinci sebagai berikut :

a) Persentase Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi

Persentase Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi merupakan jumlah realisasi lulusan diklat yang bersertifikat kompetensi dibandingkan dengan jumlah target lulusan diklat yang bersertifikat kompetensi, yang secara matematis dapat dihitung sebagai berikut:

Persentase Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi

$$= \frac{\text{Jumlah Realisasi Lulusan Diklat yang Bersertifikat Kompetensi}}{\text{Jumlah Target Lulusan Diklat yang Bersertifikat Kompetensi}} \times 100\%$$

Untuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Lulusan Diklat Yang Bersertifikat Kompetensi yang dihasilkan BPSDM Perhubungan tahun 2024 sesuai standar kompetensi dengan target persentase 97,441% yaitu target jumlah lulusan sebanyak 449.808 orang dan terealisasi sebanyak 524.544 orang sehingga terealisasi sebesar 116,615% atau tingkat capaiannya sebesar 119,678% dari target Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Tahun 2024 sebesar 97,441%, dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3 Realisasi Persentase Lulusan Diklat yang Bersertifikat Kompetensi

| No | Matra | Target Lulusan Tahun 2024 | | | Realisasi Lulusan Tahun 2024 | | |
|--------------|---|---------------------------|------------------------|----------------|------------------------------|------------------------|-----------------|
| | | Realisasi Lulusan (orang) | Target Lulusan (orang) | % | Realisasi Lulusan (orang) | Target Lulusan (orang) | % |
| 1 | SDM Transportasi Darat dan Perkeretaapian | 21.359 | 23.384 | 91,340% | 23.884 | 23.384 | 102,138% |
| 2 | SDM Transportasi Laut | 401.689 | 410.212 | 97,922% | 484.614 | 410.212 | 118,137% |
| 3 | SDM Transportasi Udara | 15.248 | 16.212 | 94,054% | 16.046 | 16.212 | 98,976% |
| TOTAL | | 438.296 | 449.808 | 97,441% | 524.544 | 449.808 | 116,615% |

Berdasarkan dengan tabel di atas, matra darat, laut maupun udara capaiannya sudah bagus dimana untuk matra darat capaiannya 102,138%, matra laut capaiannya 118,137% dan matra udara capaiannya 98,976%. Khususnya pada sekolah Matra Laut

capaiannya tinggi terjadi karena adanya penyelenggaraan Diklat Pelatihan Teknis (Short Course)/Pelatihan Ketrampilan Khusus Pelaut (PKKP) yang cukup besar pada akhir tahun sehingga capaiannya melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa permintaan akan sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi keahlian bidang Laut cukup tinggi sebagai efek dari pertumbuhan ekonomi sehingga arus perpindahan barang/jasa melalui jalur laut semakin berkembang. Secara keseluruhan untuk target triwulan IV tahun 2024 sebesar 97,441% telah tercapai melebihi targetnya yaitu sebesar 116,615%.

Kegiatan yang menunjang Indikator Kegiatan Kegiatan (IKK) dimaksud adalah penyelenggara Pendidikan Pembentukan/Awal, Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan, Pelatihan Teknis (*short course*)/Pelatihan Ketrampilan Khusus Pelaut, Pelatihan Lainnya, dan Pelatihan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM.

Tingginya permintaan diklat dari masyarakat untuk diklat di bidang Transportasi Laut dikarenakan adanya peraturan yang termuat dalam STCW 2010 Manila, bahwa setiap pelaut pemegang sertifikat STCW 1978 Amandemen 1995 dari tingkat dasar sampai dengan tingkat I, serta Pelatihan Ketrampilan Khusus Pelaut (PKKP) harus menyesuaikan sertifikatnya sehingga memperoleh sertifikat yang sesuai dengan konvensi internasional IMO-SCTW 1978 Amandemen 2010. Perbedaan jumlah Peserta dengan Jumlah Lulusan bukan karena banyak peserta yang tidak lulus, melainkan karena ada beberapa peserta yang masih melanjutkan studi. Khususnya Program Pendidikan Pembentukan yang memiliki masa studi 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun (Program Diploma III dan Diploma IV) serta Program Pendidikan/Pelatihan Penjenjangan yang memiliki masa studi 9 (sembilan) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.

b) Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Pembentukan

Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Pembentukan merupakan persentase jumlah lulusan Diklat Pembentukan Tahun 2023 yang telah mendapat pekerjaan pada Tahun 2024 dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun dari keseluruhan lulusan Diklat Pembentukan yang lulus pada Tahun 2023, yang secara matematis dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Pembentukan} \\ \text{Jumlah Lulusan Diklat Pembentukan pada tahun n} \\ \text{yang Telah Mendapat Pekerjaan pada tahun n+1} \leq 1 \text{ tahun} \quad \times 100\% \\ = \frac{\text{Jumlah Keseluruhan Lulusan Diklat Pembentukan pada tahun n}}{\text{Jumlah Lulusan Diklat Pembentukan pada tahun n}} \times 100\%$$

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Pembentukan tingkat capaiannya sebesar 91,700% yaitu tercapai 80,619% dari target 87,916%.

Pencapaian saat ini masih belum mencapai target yang ditetapkan, dan harus ditingkatkan kembali untuk tahun-tahun berikutnya. Berikut tabel rincian realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Pembentukan pada table 3.4 berikut :

Tabel 3.4 Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Pembentukan pada Tahun 2024

| No | Matra | Jumlah Lulusan Tahun 2023 (orang) | Jumlah daya serap lulusan pada Tahun 2024 (orang) | | | | % |
|--------------|---|-----------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | Pemerintah | Non Pemerintah | Total | Belum Bekerja | |
| 1 | SDM Transportasi Darat dan Perkeretaapian | 1.586 | 1.469 | 80 | 1.549 | 37 | 97,667% |
| 2 | SDM Transportasi Laut | 3.159 | 809 | 1.375 | 2.184 | 975 | 69,136% |
| 3 | SDM Transportasi Udara | 874 | 704 | 93 | 797 | 77 | 91,190% |
| TOTAL | | 5.619 | 2.982 | 1.548 | 4.530 | 1.089 | 80,619% |

Sumber: BPSDM Perhubungan, 2024

Persentase capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tersebut di atas berasal dari capaian peserta yang selesai belajar tahun 2023 dan memperoleh pekerjaan di tahun 2024. Hasil capaian mengindikasikan belum terserapnya lulusan sesuai target yang telah ditentukan. BPSDM Perhubungan telah melakukan beberapa langkah guna meningkatkan penyerapan lulusan diklat transportasi. Peningkatan penyerapan lulusan diklat merupakan hasil dari peningkatan komitmen bersama dan kerjasama dengan *stakeholder*, baik dalam skala nasional maupun internasional sebagai salah satu upaya percepatan penyerapan lulusan diklat transportasi, seperti BUMN maupun lembaga pemerintahan melalui pola pembibitan

maupun antar negara. Selain itu, dilakukan juga inventarisasi data lulusan diklat transportasi melalui penyusunan *database* lulusan diklat di lingkungan BPSDM Perhubungan dalam bentuk fitur *searching* alumni melalui aplikasi di tiap-tiap satker dan Monev BPSDM Perhubungan. Untuk jumlah lulusan diklat pembentukan tahun 2023 sebanyak 5.619 orang dan dilakukan *tracer study* pada tahun 2024.

Selain upaya perluasan penyerapan lulusan diatas, BPSDM juga melakukan pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengembangan SDM transportasi. Dalam penyelenggaraan pengembangan SDM transportasi masih terdapat kendala keterbatasan baik secara kualitas dan kuantitas SDM juga dari segi finansial, karena itu diperlukan solusi atas persoalan tersebut dengan melibatkan berbagai *stakeholder*, misalnya pihak swasta, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, *Non Governmental Organization* (NGO) dan lain-lain. Keterlibatan berbagai pihak ini memiliki peran penting untuk membantu mengingat tidak semua aktivitas pengembangan SDM mampu dikerjakan sendiri terutama dalam hal ketersediaan kuantitas, *skill* SDM dan finansial.

Berikut ini dapat dilihat perbandingan penyerapan lulusan di Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 selama 5 tahun terakhir yaitu pada tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5 Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Pembentukan pada Tahun 2020-2024

| NO | UNIT KERJA | 2020 | | | | | 2021 | | | | |
|--------------|-----------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | | JUMLAH LULUSAN | TERSERAP PEMERINTAH | TERSERAP NON-PEMERINTAH | SISA | % | JUMLAH LULUSAN | TERSERAP PEMERINTAH | TERSERAP NON-PEMERINTAH | SISA | % |
| 1 | SDM Transportasi Darat & KA | 718 | 406 | 175 | 137 | 80,92 | 880 | 616 | 112 | 152 | 82,73 |
| 2 | SDM Transportasi Laut | 3.161 | 247 | 2.276 | 638 | 79,82 | 3.160 | 42 | 2.025 | 1.093 | 65,41 |
| 3 | SDM Transportasi Udara | 983 | 247 | 237 | 634 | 49,24 | 1.156 | 202 | 188 | 766 | 33,74 |
| TOTAL | | 4.862 | 900 | 2.688 | 1.409 | 73,80 | 5.196 | 860 | 2.325 | 2.011 | 61,30 |

| NO | UNIT KERJA | 2022 | | | | | 2023 | | | | |
|--------------|-----------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | | JUMLAH LULUSAN | TERSERAP PEMERINTAH | TERSERAP NON PEMERINTAH | SISA | % | JUMLAH LULUSAN | TERSERAP PEMERINTAH | TERSERAP NON-PEMERINTAH | SISA | % |
| 1 | SDM Transportasi Darat & KA | 981 | 767 | 81 | 133 | 86,44 | 1.489 | 1.337 | 144 | 8 | 99,46 |
| 2 | SDM Transportasi Laut | 3.151 | 268 | 1.938 | 939 | 70,01 | 2.777 | 641 | 1.625 | 511 | 81,60 |
| 3 | SDM Transportasi Udara | 1.449 | 626 | 171 | 651 | 55,00 | 1.203 | 629 | 278 | 296 | 75,39 |
| TOTAL | | 5.581 | 1.661 | 2.190 | 1.723 | 69,00 | 5.469 | 2.607 | 2.047 | 1.723 | 85,10 |

| NO | UNIT KERJA | 2024 | | | | |
|--------------|-----------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| | | JUMLAH LULUSAN | TERSERAP PEMERINTAH | TERSERAP NON PEMERINTAH | SISA | % |
| 1 | SDM Transportasi Darat & KA | 1.586 | 1.469 | 80 | 37 | 97,677 |
| 2 | SDM Transportasi Laut | 3.159 | 809 | 1.375 | 975 | 69,136 |
| 3 | SDM Transportasi Udara | 874 | 704 | 93 | 77 | 91,190 |
| TOTAL | | 5.619 | 2.982 | 1.548 | 1.089 | 80,619 |

Bila dilihat dari realisasi penyerapan lulusan selama 5 tahun untuk semua matra belum mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang menjadi penyebab tidak tercapainya target serapan lulusan ini antara lain faktor ekonomi global yang tidak stabil sehingga mempengaruhi permintaan akan tenaga kerja sektor transportasi. Selain itu, perubahan tren dalam industri transportasi terkait pemanfaatan teknologi sangat mempengaruhi kebutuhan akan tenaga kerja. Selanjutnya, persaingan yang ketat dari tenaga kerja asing dengan biaya operasional yang lebih rendah dapat menjadi tantangan bagi lulusan dalam mendapatkan pekerjaan.

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh BPSDM Perhubungan terkait hal tersebut adalah:

- 1) Meningkatkan kerjasama dan menjalin komunikasi aktif dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian P2MI dalam rangka penyaluran lulusan diklat transportasi yang diselenggarakan oleh BPSDM Perhubungan;

- 2) Membentuk dan mengaktifkan Komite SKK Transportasi sebagai pusat koordinasi nasional untuk pengembangan kompetensi SDM di sektor transportasi dan logistik.
- 3) Membentuk Unit Usaha dan Penempatan Tenaga Kerja di Bidang Transportasi pada beberapa UPT BPSDMP sebagai wadah untuk meningkatkan peluang dalam penempatan tenaga kerja bidang transportasi baik di dalam maupun luar negeri.
- 4) Memaksimalkan inventarisasi data lulusan diklat transportasi melalui penyusunan database lulusan diklat di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan, serta upaya promosi dan sosialisasi secara optimal dalam skala yang lebih luas.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Tahun 2020-2024

Perbandingan realisasi dan target kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan selama 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berada pada tahap pembangunan nasional (Tahun 2020-2024). Setiap tahapan pembangunan nasional memiliki dokumen perencanaan yang memuat Indikator Kinerja Program (IKP) yang mengacu pada visi dan misi Presiden terpilih. Secara umum perbandingan dimaksud dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2020-2024

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) | | SATUAN | TARGET PK 2020-2024 | TAHUN 2020 | | | TAHUN 2021 | | | TAHUN 2022 | | | TAHUN 2023 | | | TAHUN 2024 | | |
|--|---|---------------------------------|--|--------|---------------------|------------|----------------|---------|------------|----------------|---------|------------|----------------|---------|------------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| | | | | | | TARGET PK | REALISASI | % |
| A | SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 1 | IKP1. Indeks RB Kementerian Perhubungan | Indeks | 79 | 78,000 | 0,000 | 0,000 | 79,000 | 78,390 | 99,228 | 80,570 | 79,200 | 98,300 | 77,000 | 78,400 | 101,818 | 80,570 | 85,260 | 105,821 |
| | | 2 | IKP2. Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran | % | 100 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Rata - Rata Capaian Sasaran | | | | | | | 0,000 | | | 99,228 | | | 98,300 | | | 101,818 | | | 105,821 | |
| B | SP.WA.02. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum | 2 | IKP2. Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat <i>Class Action</i> oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan | Rasio | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 110,000 | 0,100 | 0,000 | 110,000 | 0,100 | 0,000 | 110,000 |
| Rata - Rata Capaian Sasaran | | | | | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 110,000 | | | 110,000 | | | 110,000 | |
| C | SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi Yang Kompeten | 3 | IKP3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten | % | 89 | 88,256 | 91,336 | 103,490 | 85,852 | 87,840 | 102,316 | 91,726 | 95,314 | 103,912 | 89,170 | 110,100 | 123,472 | 91,726 | 95,018 | 103,589 |
| | | a. | IKK2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi | % | 95 | 93,140 | 117,640 | 126,304 | 93,880 | 127,650 | 135,971 | 97,441 | 134,782 | 138,322 | 92,780 | 147,610 | 159,097 | 97,441 | 116,615 | 119,678 |
| | | b. | IKK3. Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi | % | 86 | 85,000 | 73,800 | 86,824 | 80,500 | 61,300 | 76,149 | 87,916 | 69,002 | 78,486 | 86,770 | 85,100 | 98,075 | 87,916 | 80,619 | 91,700 |
| Rata - Rata Capaian Sasaran | | | | | | | 103,490 | | | 102,316 | | | 103,912 | | | 123,472 | | | 103,589 | |
| Total Rata - Rata Capaian Sasaran | | | | | | | 51,745 | | | 51,158 | | | 104,070 | | | 111,763 | | | 106,794 | |

Secara rinci analisis penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan pencapaian akuntabilitas kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks RB Kementerian Perhubungan;

Dapat diketahui selama 5 (lima) tahun terakhir ini (2020-2024) mengalami kenaikan di tahun 2024, pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) Indeks RB Kementerian Perhubungan, sesuai dengan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PAN-RB nomor B/646/RB.06/2024 tanggal 3 Oktober 2024 perihal Perubahan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 yaitu dengan nilai 85,26. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 3.6 di bawah ini:



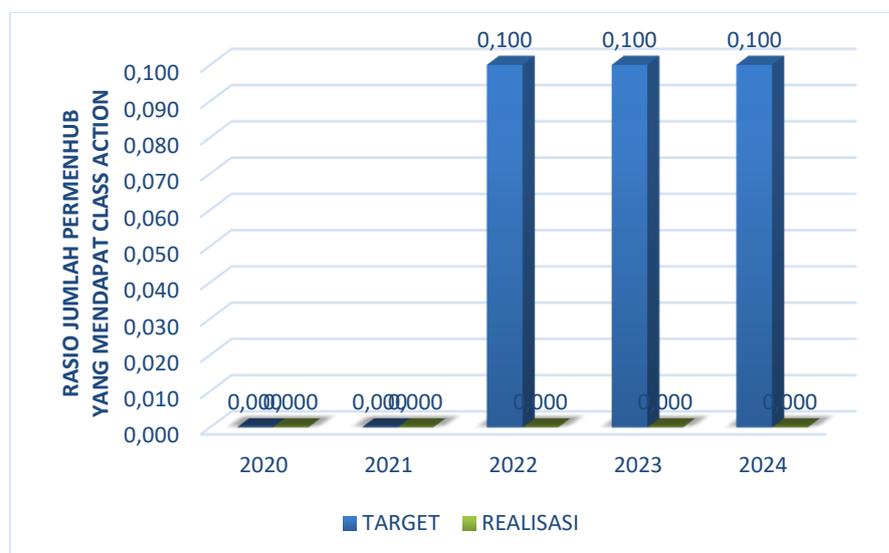
Grafik 3.6 Perbandingan Kinerja IKP Indeks RB Kementerian Perhubungan, 2020-2024

Secara kumulatif capaian Indeks Kinerja Program (IKP) Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 adalah sebesar 85,26, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Tahun 2020-2023, capaiannya adalah sebesar 105,821%.

2. Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat *Class Action* oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan
Indikator Kinerja Program (IKP) Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat *Class Action* oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan

baru ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) Badan Pengembangan SDM Perhubungan pada tahun 2022 sesuai dengan SK.59/BPSDMP-2022 tanggal 6 April 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2022.

Target kinerja sebesar 0,1 baru diterapkan pada triwulan IV tahun 2022, dikarenakan indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru di tahun 2022, yang ditetapkan sesuai SK.59 /BPSDMP-2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan BPSDM Perhubungan Tahun 2022 tanggal 6 April 2022 yang menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (Revisi) 2022 s.d 2024 Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 3.7 di bawah ini :



Grafik 3.7 Perbandingan Kinerja IKP Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat *Class Action* oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan, 2020-2024

Pada grafik di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapatkan *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan sudah baik, yang ditandai dengan tidak adanya *class action* (gugatan) dari masyarakat terhadap regulasi di bidang perhubungan atas peraturan yang menyangkut BPSDM Perhubungan pada tahun 2024 telah mencapai 110% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Tahun 2024.

3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten

Untuk Indikator Kinerja Program (IKP) Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten pada tahun 2024 tingkat capaiannya mengalami penurunan dari tahun 2023 dan 2022, namun mengalami peningkatan dari tahun 2021 dan 2020.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 3.8 di bawah ini:



Grafik 3.8 Perbandingan Kinerja IKP Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten, 2020-2024

Jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (PK) 2020-2024 sebesar 85% dengan capaian IKP Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten tahun 2020 sebesar 91,336%, tahun 2021 sebesar 87,840%, tahun 2022 sebesar 95,314%, tahun 2023 sebesar 110,100%, dan tahun 2024 sebesar 95,018% telah melampaui target Perjanjian Kinerja (PK) Revisi 2020-2024.

Pada IKP Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten terdiri dari 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu sebagai berikut :

- a. Persentase Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi
Persentase Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi merupakan salah satu indikator keberhasilan agar mewujudkan kualitas SDM yang berdaya saing, prima, profesional, dan beretika.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 3.9 di bawah ini:



Grafik 3.9 Perbandingan Kinerja IKK Persentase Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi, 2020-2024

Jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (PK) Revisi 2020-2024 sebesar 85% dengan capaian IKK Persentase Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu tahun 2020 sebesar 117,640%, tahun 2021 sebesar 127,650%, tahun 2022 sebesar 134,782%, tahun 2023 sebesar 147,610%, dan tahun 2024 sebesar 116,615% telah melampaui target Perjanjian Kinerja (PK) Revisi 2020-2024.

- b. Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Pembentukan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Pembentukan telah mencapai target yang ditetapkan, dan harus ditingkatkan kembali untuk tahun-tahun berikutnya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 3.10 di bawah ini:



Grafik 3.10 Perbandingan Kinerja IKK Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Pembentukan, 2020-2024

Jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (PK) 2020-2024 sebesar 85% dengan capaian IKK Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Pembentukan mengalami penurunan yaitu tahun 2020 sebesar 73,800%, tahun 2021 sebesar 61,300%, tahun 2022 sebesar 69,002% dan mengalami peningkatan tahun 2023 sebesar 85,10% telah melampaui target Perjanjian Kinerja (PK) Revisi 2020-2023, namun mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 80,619%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 Terhadap Target Kinerja pada Tahun 2020-2024 dalam RENSTRA Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2020-2024

Untuk melakukan evaluasi kinerja diperlukan Indikator Kinerja Program (IKP), yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya Indikator Kinerja Program (IKP) harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai atau berfungsi. Evaluasi kinerja ini mencakup:

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan;
2. Tingkat Pencapaian Sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing sasaran yang telah

ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Reviu Rencana Strategis (RENSTRA). Persentase tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Berikut perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2020-2024 dengan target jangka menengah RENSTRA Badan Pengembangan SDM Perhubungan tahun 2020-2024 pada tabel 3.7

Dari tabel 3.7 di bawah ini dapat diketahui bahwa kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan pada tahun 2024 telah berhasil mencapai 3 (tiga) dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Program (IKP) yang sesuai/melebihi dari target jangka menengah (RENSTRA) yang telah ditetapkan.

Tabel 3.7 Perbandingan Target RENSTRA Tahun 2020-2024 dengan Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) | SATUAN | TARGET RENSTRA 2020-2024 | TAHUN 2020 | | | TAHUN 2021 | | | TAHUN 2022 | | | TAHUN 2023 | | | TAHUN 2024 | | | |
|--|---|---------------------------------|--|--------------------------|------------|-----------|----------------|------------|-----------|----------------|------------|-----------|----------------|------------|-----------|----------------|------------|-----------|----------------|---------|
| | | | | | TARGET | REALISASI | % | |
| A | SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 1 | IKP1. Indeks RB Kementerian Perhubungan | Indeks | 80 | 78,000 | 0,000 | 0,000 | 79,000 | 78,390 | 99,228 | 80,000 | 79,200 | 99,000 | 80,000 | 78,400 | 98,000 | 80,500 | 85,260 | 105,913 |
| | | 2 | IKP2. Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran | % | 100 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Rata - Rata Capaian Sasaran | | | | | | | 0,000 | | | 99,228 | | | 99,000 | | | 98,000 | | | 105,913 | |
| B | SP.WA.02. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum | 2 | IKP2. Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat <i>Class Action</i> oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan | Rasio | 40 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 110,000 | 100,000 | 0,000 | 110,000 | 100,000 | 0,000 | 110,000 |
| Rata - Rata Capaian Sasaran | | | | | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 110,000 | | | 110,000 | | | 110,000 | |
| C | SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi Yang Kompeten | 3 | IKP3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten | % | 85 | 85,000 | 91,336 | 107,454 | 85,000 | 87,840 | 103,341 | 85,000 | 95,314 | 112,134 | 85,000 | 110,100 | 129,529 | 85,000 | 95,018 | 111,785 |
| | | a. | IKK2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi | % | 85 | 85,000 | 117,640 | 138,400 | 85,000 | 127,650 | 150,176 | 85,000 | 134,782 | 158,567 | 85,000 | 147,610 | 173,659 | 85,000 | 116,615 | 137,194 |
| | | b. | IKK3. Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi | % | 85 | 85,000 | 73,800 | 86,824 | 85,000 | 61,300 | 72,118 | 85,000 | 69,002 | 81,179 | 85,000 | 85,100 | 100,118 | 85,000 | 80,619 | 94,846 |
| Rata - Rata Capaian Sasaran | | | | | | | 107,454 | | | 103,341 | | | 112,134 | | | 129,529 | | | 111,785 | |
| Total Rata - Rata Capaian Sasaran | | | | | | | 35,818 | | | 67,523 | | | 107,045 | | | 112,510 | | | 109,233 | |

III.3 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Realisasi penyerapan DIPA T.A 2024 posisi 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 3.913.125.578.051,-** dari total pagu Badan Pengembangan SDM Perhubungan **Rp. 4.196.255.953.000,-** atau sebesar 93,253% dengan rincian sebagaimana pada tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8 Realisasi dan Persentase Keuangan

| JENIS BELANJA | PAGU DANA (Rp) | REALISASI (Rp) | PERSENTASE KEU (%) |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| Belanja Pegawai | 358.576.891.000 | 352.626.866.177 | 98,341% |
| Belanja Barang | 3.071.443.402.000 | 2.885.195.869.640 | 93,936% |
| Belanja Modal | 766.235.660.000 | 675.302.842.234 | 88,133% |
| Total | 4.196.255.953.000 | 3.913.125.578.051 | 93,253% |

Berdasarkan penyerapan anggaran tahun 2024 dapat ditentukan tingkat penyerapan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TP = \frac{\sum_{j=1}^n RA \text{ bulan ke } - j}{\sum_{j=1}^n RPD \text{ bulan ke } - j} \times 100\%$$

Keterangan:

TP : Tingkat Penyerapan

RPD bulan ke-*j* : Rencana Penarikan Dana bulan ke-*j*

RA bulan ke-*j* : Realisasi Anggaran bulan ke-*j*

n : jumlah bulan

Dari rumus tersebut dapat diperoleh hasil penghitungan seperti yang ditampilkan pada tabel 3.9 berikut ini :

Tabel 3.9 Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan, 2024

| NO | BULAN | RPD | RPD KUMULATIF | REALISASI ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN (KUMULATIF) | TK (Tingkat Penyerapan) |
|----|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | JANUARI | 51.103.219.131 | 51.103.219.131 | 45.108.606.346 | 45.108.606.346 | 88,270% |
| 2 | FEBRUARI | 207.180.507.132 | 258.283.726.263 | 174.715.244.720 | 219.823.851.066 | 85,109% |
| 3 | MARET | 344.728.475.582 | 603.012.201.845 | 302.500.779.372 | 522.324.630.438 | 86,619% |
| 4 | APRIL | 372.779.960.383 | 975.792.162.228 | 333.405.494.503 | 855.730.124.941 | 87,696% |
| 5 | MEI | 328.152.739.525 | 1.303.944.901.753 | 278.362.038.530 | 1.134.092.163.471 | 86,974% |
| 6 | JUNI | 398.212.848.505 | 1.702.157.750.258 | 356.049.506.100 | 1.490.141.669.571 | 87,544% |
| 7 | JULI | 358.409.456.114 | 2.060.567.206.372 | 302.002.445.280 | 1.792.144.114.851 | 86,973% |
| 8 | AGUSTUS | 357.103.766.429 | 2.417.670.972.801 | 304.354.430.998 | 2.096.498.545.849 | 86,716% |
| 9 | SEPTEMBER | 394.457.342.349 | 2.812.128.315.150 | 314.127.980.197 | 2.410.626.526.046 | 85,722% |
| 10 | OKTOBER | 446.072.781.976 | 3.258.201.097.126 | 365.748.173.332 | 2.776.374.699.378 | 85,212% |
| 11 | NOVEMBER | 566.218.737.571 | 3.824.419.834.697 | 362.974.617.891 | 3.139.349.317.269 | 82,087% |
| 12 | DESEMBER | 371.836.118.303 | 4.196.255.953.000 | 773.776.260.782 | 3.913.125.578.051 | 93,253% |

Dari pengalokasian anggaran dan penyerapan tersebut dapat diukur konsistensi antara perencanaan dan implementasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\sum_{j=1}^n RA \text{ bulan ke-}j}{\sum_{j=1}^n RPD \text{ bulan ke-}j} \times 100\% \right)}{n}$$

Keterangan:

- K : Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
- RPD bulan ke-*j* : Rencana Penarikan Dana bulan ke-*j*
- RA bulan ke-*j* : Realisasi Anggaran bulan ke-*j*
- n* : jumlah bulan

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut :

$$K = \frac{88,270\% + 85,109\% + 86,619\% + \dots + 85,212\% + 82,087\% + 92,253\%}{12}$$

$$K = 86,848\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2024 sebesar **86,848%**.

Selain nilai pengukuran konsistensi, perlu diketahui efisiensi dan nilai efisiensi terhadap pemanfaatan sumber daya yaitu pada tabel 3.10 sebagai berikut:

Tabel 3.10 Nilai Efisiensi BPSDM Tahun 2024

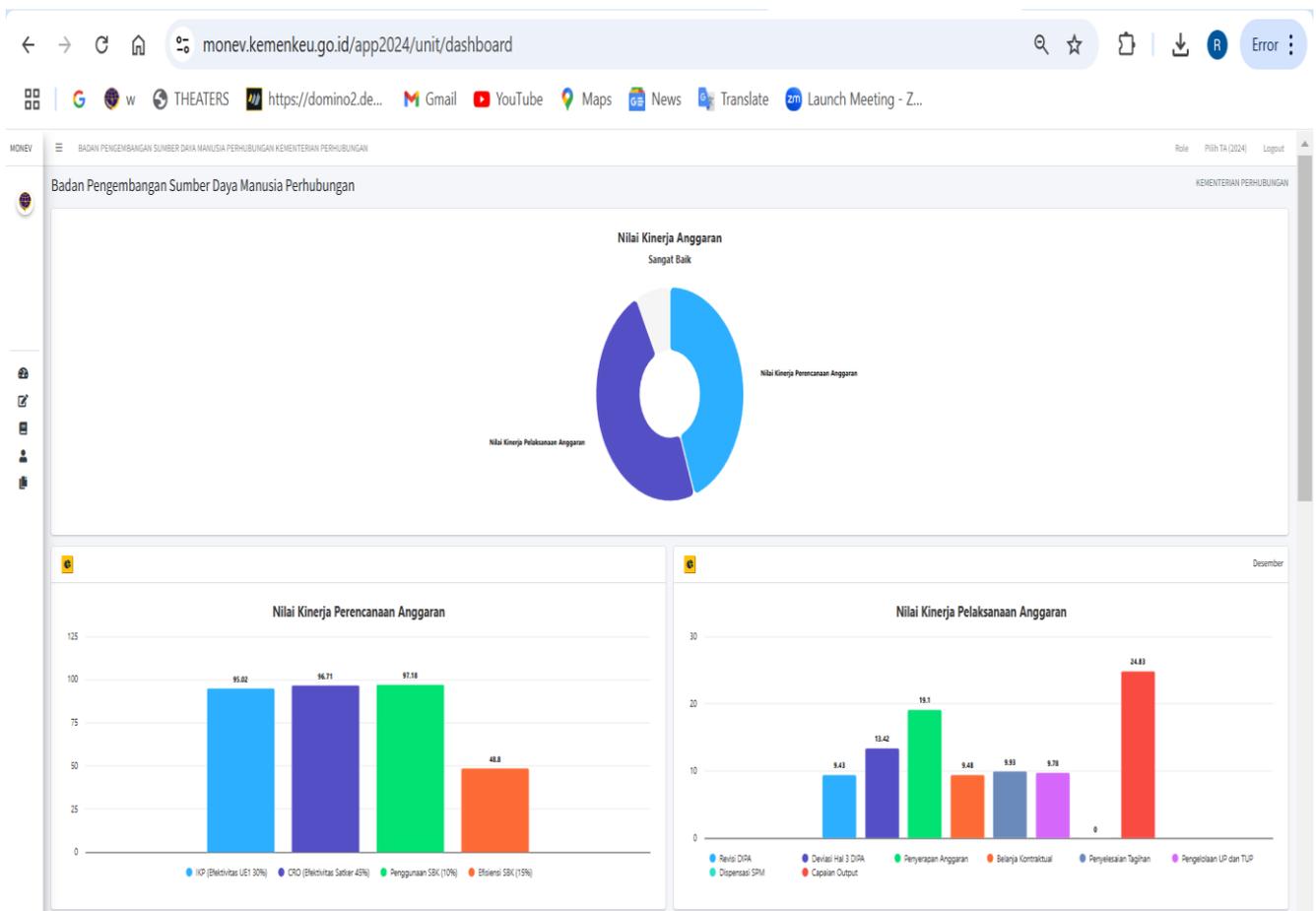
| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) | SATUAN | TARGET PK REVISI | REALISASI | CAPAIAN (%) | PAGU (Rp.) | REALISASI (Rp.) | REALISASI ANGGARAN PROGRAM/REALISASI VOLUME PROGRAM (A) | PAGU ANGGARAN PROGRAM/TOTAL VOLUME PROGRAM (B) | A/B | (1-A/B) x 100% | CAPAIAN | |
|----|---|---------------------------------|--|------------------|-----------|-------------|------------|-------------------|---|--|--------------------|----------------|---------|--------|
| A | SP.WA.03. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 1 | IKP1. Indeks RB Kementerian Perhubungan | Indeks | 85,260 | 85,260 | 100,000 | 1.344.217.592.000 | 1.316.173.711.894 | 30.874.354.020,502 | 31.495.257.544,517 | 0,980 | 1,971 | 97,914 |
| B | SP.WA.02. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum | 2 | IKP2. Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat <i>Class Action</i> oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan | Rasio | 0,100 | 0,000 | 110,000 | | | | | | | |
| | Jumlah Program Dukungan Manajemen | | | | 42,680 | 42,630 | 99,883 | | | | | | | |
| C | SP.DL.01. Meningkatkan Kualitas SDM Transportasi Yang Kompeten | 3 | IKP3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten | % | 91,726 | 95,018 | 103,589 | 2.823.809.401.000 | 2.568.715.645.264 | 27.033.989.825,759 | 30.785.267.001,723 | 0,878 | 12,185 | 90,966 |
| | | a. | IKK2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi | % | 97,441 | 116,615 | 119,678 | | | | | | | |
| | | b. | IKK3. Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi | % | 87,916 | 80,619 | 91,700 | | | | | | | |
| | Jumlah Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi | | | | 91,726 | 95,018 | 103,589 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Efisiensi (E) | | 7,078 | | |
| | | | | | | | | | | Nilai Efisiensi (NE) | | 67,696 | | |

Pada tahun 2024, 3 (tiga) Sasaran Program dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Program (IKP) Badan Pengembangan SDM Perhubungan dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan, dimana kinerja terealisasi dengan persentase penyerapan keuangan sebagaimana tabel 3.10 di atas. Efisiensi dan nilai efisiensi pada tabel diatas dihitung dengan membandingkan nilai realisasi volume output dan nilai realisasi anggaran, maka dapat dilihat apakah efisien atau tidak dalam penggunaan anggaran untuk menghasilkan realisasi output. Dapat dilihat bahwa berdasarkan tabel di atas dapat diketahui Efisiensi (E)

sebesar dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada tahun 2023 sebesar 7,078 dengan Nilai Efisiensi 67,696.

Untuk nilai efisiensi berdasarkan aplikasi monev kemenkeu, nilainya didapat dari Capaian Rincian Output (CRO) dan kesesuaian Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) maka didapat nilai efisiensi SBK sebesar 48,8. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini :

Gambar 3.1
Nilai Efisiensi Pada Aplikasi Monev Kemenkeu BPSDM Perhubungan Tahun 2024



Sumber : Aplikasi Monev Kemenkeu Tahun 2024

III.4 CAPAIAN KEBERHASILAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN LAINNYA

Capaian keberhasilan kinerja lainnya pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di lingkungan BPSDM Perhubungan

Pada tahun 2024 ini Badan Pengembangan SDM Perhubungan melakukan revisi target kinerja, hal ini dikarenakan adanya perubahan Indikator Kinerja pada RENSTRA Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2020-2024 serta perubahan anggaran pada DIPA Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang dikarenakan adanya pemotongan anggaran dan penambahan PNBPN dan BLU. Adapun untuk pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di lingkungan BPSDM Perhubungan dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut ini :

Tabel 3.11 Capaian IKP dan IKK BPSDMP Tahun 2024

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) | | SATUAN | TARGET PK 2024 BPSDMP | TARGET PK REVISI 2024 BPSDMP | REALISASI BPSDMP | CAPAIAN (%) |
|----|---|--|---|--------|-----------------------|------------------------------|------------------|-------------|
| 1 | SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | IKP 1 | Indeks RB Kementerian Perhubungan | Indeks | 80,500 | 80,570 | 85,260 | 105,821 |
| 2 | SP.WA.02. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum | IKP 2 | Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan | Rasio | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 110,000 |
| 3 | SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten | IKP 3 | Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten | % | 90,375 | 91,726 | 110,100 | 120,032 |
| | | IKK.1 | Jumlah Peserta Diklat Transportasi | Orang | 423.224 | 470.834 | 545.146 | 115,783 |
| | | - | Peserta Diklat Pembentukan | Orang | 26.717 | 25.724 | 23.847 | |
| | | - | Peserta Diklat Penjurangan | Orang | 9.654 | 14.005 | 20.948 | |

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) | | SATUAN | TARGET PK 2024 BPSDMP | TARGET PK REVISI 2024 BPSDMP | REALISASI BPSDMP | CAPAIAN (%) |
|----|-----------------|--|--|--------|-----------------------|------------------------------|------------------|----------------|
| | | - | Peserta Diklat Teknis | Orang | 209.949 | 240.093 | 253.273 | |
| | | - | Peserta Diklat Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 2.429 | 2.694 | 3.381 | |
| | | - | Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 101.035 | 95.175 | 80.986 | |
| | | - | Peserta Diklat Peningkatan | Orang | 2.256 | 2.256 | 14.255 | |
| | | - | Peserta Diklat Pemutakhiran | Orang | 9.528 | 13.362 | 11.295 | |
| | | - | Peserta Diklat Pengukuhan | Orang | 0 | 0 | 0 | |
| | | - | Peserta Diklat Penyegaran/Revalidasi | Orang | 61.327 | 77.196 | 137.008 | |
| | | - | Peserta Diklat Kerjasama | Orang | 0 | 0 | 0 | |
| | | - | Diklat Pembangunan Karakter | Orang | 0 | 0 | 0 | |
| | | - | Pendidikan Strata II Terapan Transportasi Laut | Orang | 329 | 329 | 153 | |
| | | IKK.2 | Persentase Lulusan Diklat Transportasi | % | 93,083 | 97,441 | 116,615 | 119,678 |
| | | a | Jumlah Lulusan Diklat Transportasi pada tahun 2022 | Orang | 375.677 | 438.296 | 524.544 | |
| | | - | Lulusan Diklat Pembentukan | Orang | 6.407 | 5.515 | 5.732 | |
| | | - | Lulusan Diklat Penjurangan | Orang | 9.254 | 11.721 | 15.082 | |
| | | - | Lulusan Diklat Teknis | Orang | 193.973 | 219.561 | 252.050 | |
| | | - | Lulusan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 2.316 | 3.066 | 3.349 | |
| | | - | Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 96.051 | 90.536 | 80.984 | |
| | | - | Lulusan Diklat Peningkatan | Orang | 2.256 | 23.807 | 18.993 | |
| | | - | Lulusan Diklat Pemutakhiran | Orang | 9.174 | 12.710 | 11.294 | |

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) | | SATUAN | TARGET PK 2024 BPSDMP | TARGET PK REVISI 2024 BPSDMP | REALISASI BPSDMP | CAPAIAN (%) |
|----|-----------------|--|---|--------|-----------------------|------------------------------|------------------|-------------|
| | | - | Lulusan Diklat Pengukuhan | Orang | 0 | 0 | 0 | |
| | | - | Lulusan Diklat Penyegaran/Revalidasi | Orang | 56.151 | 71.285 | 136.977 | |
| | | - | Lulusan Diklat Kerjasama | Orang | 0 | 0 | 0 | |
| | | - | Diklat Pembangunan Karakter | Orang | 0 | 0 | 0 | |
| | | - | Lulusan Diklat Teknis Fungsional | Orang | 0 | 0 | 0 | |
| | | - | Lulusan Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi | Orang | 95 | 95 | 83 | |
| | | b | Jumlah target lulusan Diklat Transportasi pada tahun 2022 | Orang | 403.595 | 449.808 | 449.808 | |
| | | - | Lulusan Diklat Pembentukan | Orang | 7.340 | 6.620 | 6.620 | |
| | | - | Lulusan Diklat Penjurangan | Orang | 9.633 | 12.564 | 12.564 | |
| | | - | Lulusan Diklat Teknis | Orang | 209.949 | 237.829 | 237.829 | |
| | | - | Lulusan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 2.429 | 3.193 | 3.193 | |
| | | - | Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 101.035 | 95.775 | 95.775 | |
| | | - | Lulusan Diklat Peningkatan | Orang | 2.256 | 3.408 | 3.408 | |
| | | - | Lulusan Diklat Pemutakhiran | Orang | 9.528 | 13.125 | 13.125 | |
| | | - | Lulusan Diklat Pengukuhan | Orang | 0 | 0 | 0 | |
| | | - | Lulusan Diklat Penyegaran/Revalidasi | Orang | 61.327 | 77.196 | 77.196 | |
| | | - | Lulusan Diklat Kerjasama | Orang | 0 | 0 | 0 | |
| | | - | Diklat Pembangunan Karakter | Orang | 0 | 0 | 0 | |
| | | - | Lulusan Diklat Teknis/Fungsional | Orang | 0 | 0 | 0 | |

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) | | SATUAN | TARGET PK 2024 BPSDMP | TARGET PK REVISI 2024 BPSDMP | REALISASI BPSDMP | CAPAIAN (%) |
|----|---|--|---|----------|-----------------------|------------------------------|------------------|-------------|
| | | - | Lulusan Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transprtasi | Orang | 98 | 98 | 98 | |
| | | IKK.3 | Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Pembentukan | % | 88,574 | 87,916 | 80,619 | 91,700 |
| | | a | Jumlah Lulusan Diklat Pembentukan pada tahun 2021 yang telah mendapat pekerjaan pada tahun 2022 ≤ 1 tahun | Orang | 4.977 | 4.940 | 4.530 | |
| | | b | Jumlah keseluruhan lulusan Diklat Pembentukan pada tahun 2021 | Orang | 5.619 | 5.619 | 5.619 | |
| | | IKK.4 | Persentase Utilitas Pemanfaatan sarana dan Prasarana Diklat SDM Perhubungan yang berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir | % | 78,068 | 80,750 | 84,642 | 104,820 |
| | | IKK 5. | Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan | Kegiatan | 268 | 528 | 427 | 80,871 |
| | | IKK 6. | Jumlah Penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan Internasional | Dokumen | 470 | 527 | 725 | 137,571 |
| | | a | Jumlah Target Penelitian pada Jurnal Nasional | Dokumen | 340 | 348 | 505 | |
| | | b | Jumlah Target Penelitian pada Jurnal Internasional | Dokumen | 130 | 179 | 220 | |
| | | IKK 7. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 3,102 | 3,291 | 3,508 | 106,594 |
| 4 | SK.WA.03.01 Meningkatkan Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP Perhubungan | IKK.8 | Kualitas pelaksanaan kerjasama dan kemitraan BPSDMP | % | 100,000 | 87,500 | 100,000 | 114,286 |
| | | a | Jumlah dokumen kerjasama yang telah ditindaklanjuti tahun (n) | Dokumen | 6 | 21 | 45 | |

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) | | SATUAN | TARGET PK 2024 BPSDMP | TARGET PK REVISI 2024 BPSDMP | REALISASI BPSDMP | CAPAIAN (%) | |
|----|--|--|--|---|-----------------------|------------------------------|------------------|-------------|---------|
| | | | b | Jumlah keseluruhan target dokumen kerjasama yang ditindaklanjuti pada tahun (n) dilingkup Sekretariat BPSDMP, Pusbang Aparatur dan BP3KSDMT | Dokumen | 6 | 24 | 45 | |
| 5 | SK.WA.03.02. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur | IKK 26. | Jumlah Peserta Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang Kompeten | | Orang | 11.790 | 13.783 | 13.783 | 100,000 |
| | | IKK 27. | Persentase Lulusan Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang Kompeten | | % | 84,996 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| | | | a | Jumlah Lulusan Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang Kompeten | Orang | 10.021 | 13.783 | 9.208 | |
| | | | b | Jumlah target Lulusan Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang Kompeten | Orang | 11.790 | 13.783 | 9.208 | |
| 6 | SK.DL.01.02.Meningkatnya Kualitas perencanaan pendidikan dan pelatihan serta lembaga yang sesuai standar | IKK.10 | Persentase Keterpaduan antara perencanaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang sesuai standar serta lembaga yang terakreditasi | | % | 87,625 | 92,645 | 103,360 | 111,565 |
| | | | a | Jumlah jenis Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan pada tahun (n) | | 439 | 781 | 523 | |
| | | | b | Jumlah keseluruhan jenis pendidikan dan pelatihan yang ditargetkan pada tahun (n) | | 501 | 843 | 506 | |
| 7 | SK.DL.01.03. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi. | IKK 11. | Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi | | % | 89,558 | 88,201 | 94,389 | 107,017 |

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) | | SATUAN | TARGET PK 2024 BPSDMP | TARGET PK REVISI 2024 BPSDMP | REALISASI BPSDMP | CAPAIAN (%) |
|----|--|--|---|---------|-----------------------|------------------------------|------------------|-------------|
| | | a | Jumlah Program Studi yang terakreditasi (minimal "B") atau sesuai standar | Prodi | 223 | 299 | 286 | |
| | | b | Total keseluruhan Program Studi pada lembaga diklat di bawah naungan BPSDM Perhubungan. | Prodi | 249 | 339 | 303 | |
| | | IKK 12. | Kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Transportasi | % | 95,107 | 90,429 | 85,969 | 95,068 |
| | | a | Jumlah dokumen kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang telah ditindaklanjuti tahun (n) | Dokumen | 311 | 274 | 386 | |
| | | b | Jumlah keseluruhan target dokumen kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang ditindaklanjuti pada tahun (n) di lingkup Satker/UPT matra darat, laut dan Udara | Dokumen | 327 | 303 | 449 | |
| 8 | SK .WA.03.03. Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel | IKK.13 | Indeks Maturitas SPIP BPSDMP | Level | 3,15 | 3,771 | 3,382 | 89,684 |
| | | IKK.14 | Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP | Nilai | 90,57 | 88,260 | 79,520 | 90,097 |
| | | IKK.15 | Indeks Pengelolaan aset BPSDMP | Nilai | 81,00 | 81,478 | 90,205 | 110,711 |
| | | IKK.16. | Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP | Nilai | 90,16 | 88,687 | 89,401 | 100,805 |
| | | IKK.17 | Indeks Perencanaan BPSDMP | Nilai | 85,44 | 86,143 | 87,921 | 102,064 |
| | | IKK.18 | Nilai SAKIP BPSDMP | Nilai | 80,00 | 77,900 | 77,900 | 100,000 |
| | | IKK.19 | Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran BPSDMP | Nilai | 74,85 | 74,591 | 81,066 | 108,681 |
| 9 | SK .WA.01.01 Meningkatnya Kualitas Tata | IKK.20 | Indeks Reformasi Hukum BPSDMP | Nilai | 76 | 76 | 76 | 100,000 |

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) | | SATUAN | TARGET PK 2024 BPSDMP | TARGET PK REVISI 2024 BPSDMP | REALISASI BPSDMP | CAPAIAN (%) |
|----|---|--|--|------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|-------------|
| | Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum BPSDMP | IKK.21 | Kualitas Kebijakan BPSDMP | % | 100,000 | 100,000 | 100,00 | 100,000 |
| | | a | Jumlah Kebijakan yang dihasilkan tahun (n) pada lembaga Pusbang Aparatur | | 2 | 2 | 2 | |
| | | b | Total target keseluruhan target Kebijakan yang dihasilkan tahun (n) pada lembaga Pusbang Aparatur. | | 2 | 2 | 2 | |
| 10 | SK.DL.01.04. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum SDM Transportasi | IKK 22 | Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi | % | 100,000 | 99,524 | 97,701 | 98,169 |
| | | a | Jumlah NSPK lembaga diklat transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang dihasilkan | | 198 | 209 | 170 | |
| | | b | Total keseluruhan target NSPK lembaga diklat di bawah naungan BPSDMP Perhubungan. | | 198 | 210 | 174 | |
| 11 | SK.WA.03.04. Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan | IKK 23. | Indeks Kelembagaan BPSDMP | Nilai | 80 | 79,698 | 79,698 | 100,000 |
| | | IKK 9.2. | Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP | Nilai | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 100,000 |
| | | IKK 24. | Indeks tata kelola manajemen ASN BPSDMP | Nilai | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,000 |
| 12 | SK.WA.03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP | IKK 25. | Indeks SPBE BPSDMP | % | 96,800 | 97,458 | 96,396 | 98,911 |
| | | a | Jumlah sistem informasi yang di update/dapat diakses tahun (n) | Sistem Informasi | 242 | 230 | 214 | |
| | | b | Jumlah keseluruhan sistem informasi pada tahun (n) | Sistem Informasi | 250 | 236 | 222 | |

b. Jumlah Kerjasama (MOU) di lingkungan BPSDM Perhubungan

Jumlah kerjasama (MOU) yang telah dilaksanakan di tahun 2024 dimana dalam hal ini merupakan salah satu wujud *Crosscutting* di Badan Pengembangan SDM Perhubungan guna meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi seperti pada tabel 3.12 sebagai berikut :

Tabel 3. 12 Jumlah Kerjasama BPSDM Perhubungan Tahun 2024

| No. | Kerjasama | Nomor Pihak Kesatu | Nomor Pihak Kedua |
|-----|--|------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Kesepakatan Bersama antara Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser tentang Pengembangan SDM Perhubungan melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Kabupaten Paser | UM.208/2/23 Set.BPSDMP-2024 | 019.8/04/KS/2024 |
| 2. | Kesepakatan Bersama antara <i>International Test Center</i> dengan Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan tentang Peningkatan Kompetensi dan Kefasihan Berbahasa Inggris bagi SDM di Bidang Perhubungan | 1223/ITC-BPSDMPKMTB/III/2024 | HK.201/2/1/Set.BPSDMP/2024 |
| 3. | Kesepakatan Bersama antara Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pengembangan SDM Perhubungan melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Kabupaten Bengkulu Utara | UM.207/3/3 Set.BPSDMP-2024 | 500.11.1/07/DISHUB/2024 |
| 4. | Kesepakatan Bersama antara Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Binjai tentang Pengembangan SDM Perhubungan melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Kota Binjai | HK.201/1/4/Set.BPSDMP/2024 | 100.3.7-150/ADD/II/2024 |
| 5. | Kesepakatan Bersama antara Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kabupaten Enrekang tentang Pengembangan SDM Perhubungan melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Kabupaten Enrekang | UM.207/2/22/Set.BPSDMP-2024 | 100.4.7/8/SETDA/II/2024 |
| 6. | Kesepakatan Bersama antara Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Pagar Alam tentang Pengembangan SDM Perhubungan melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Kota Pagar Alam | UM.207/2/24/Set.BPSDMP-2024 | 01/KPA/2024 |
| 7. | Kesepakatan Bersama antara Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang Pengembangan SDM | UM.201/3/4/Set.BPSDMP-2024 | 100.3.7.1/3500/KB/B.POD-III/2024 |

| No. | Kerjasama | Nomor Pihak Kesatu | Nomor Pihak Kedua |
|-----|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| | Perhubungan melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Provinsi Kalimantan Timur | | |
| 8. | Kesepakatan Bersama antara Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kabupaten Jepara tentang Pengembangan SDM Perhubungan melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Kabupaten Jepara | UM.207/2/21/ Set.BPSDMP- 2024 | 02/KSB/I/2024 |
| 9. | Nota Kesepahaman <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> antara Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan dengan Universitas Hasanudin tentang Pengembangan SDM, Teknologi, dan Manajemen di Bidang Transportasi | HK.201/1/13/S et.BPSDMP/20 24 | 06654/UN4.1/ HK.07/2024 |
| 10. | Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Banda Aceh dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Kota Banda Aceh | HK.201/1/1/12 /Set.BPSDMP/ 2024 | 02/Kesber/202 4 |
| 11. | Kesepakatan Bersama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Kabupaten Kampar | HK.201/1/1/18 /Set. BPSDMP/2024 | 415/BUP- KPR/KSB/2024 /12 |
| 12. | Kesepakatan Bersama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Kabupaten Bombana | HK.201/1/19/ Set.BPSDMP- 24 | 890/537/2024 |
| 13. | Kesepakatan Bersama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Dumai Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Kota Dumai | HK.201/1/12 Set.BPSDMP- 24 | 415.4/KS/KB/2 024/003 |

| No. | Kerjasama | Nomor Pihak Kesatu | Nomor Pihak Kedua |
|-----|--|------------------------------|--------------------------|
| 14. | Kesepakatan Bersama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dengan PT MRT Jakarta (PERSERODA) tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Perkeretaapian | HK.201/12/16/Set.BPSDMP-2024 | 027/MRT-CON/HK.05.00 |
| 15. | Kesepakatan Bersama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Mojokerto Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Kota Mojokerto | HK.201/2/3/Set.BPSDMP/2024 | 100.3.7/8/417.101.1/2024 |
| 16. | Kesepakatan Bersama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Kabupaten Kapuas | HK.201/2/14/Set.BPSDMP/2024 | 100.3.7/430/SETDA.2024 |
| 17. | Kesepakatan Bersama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dengan PT MARKIJA BERDAYA BERSAMA tentang Penyelenggaraan Pemagangan bagi Taruna/Taruni Perguruan tinggi Vokasi Kementerian Perhubungan | HK.201/13/4/Set.BPSDMP/2024 | 085/MBB/NK-EXT/IV/2024 |
| 18. | Kesepakatan Bersama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Magelang Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Kota Magelang | HK.201/1/25/set.BPSDMP-2024 | 130.13/7/111 Tahun 2024 |
| 19. | Kesepakatan Bersama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Provinsi Gorontalo | HK.201/3/12/Set.BPSDMP/2024 | 279/PEMKESRA/KB/V/2024 |
| 20. | Letter Of Intent For The Training Of Trainer (T.O.T) On Mental Health Management For Seafarers between The Human Resources Development Agency On Transportation Of The | | |

| No. | Kerjasama | Nomor Pihak Kesatu | Nomor Pihak Kedua |
|-----|---|--------------------|-------------------|
| | Republic Of Indonesia And The International Transport Workers' Federation | | |

c. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Taruna (SIPENCATAR) di lingkungan BPSDM Perhubungan

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga, bahwa Kementerian/Lembaga penyelenggara sekolah kedinasan diwajibkan untuk menerbitkan SK Penetapan Taruna dan Taruni Pola Pembibitan Kementerian Perhubungan Tahun 2024 serta melaporkannya kepada Menteri PAN-RB dan Kepala BKN.

Peserta yang dinyatakan lulus menjadi calon Taruna dan Taruni Jalur Pola Pembibitan Tahun 2024 sebanyak 598 (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan), namun peserta yang melaksanakan daftar ulang dan dinyatakan memenuhi persyaratan serta mengikuti Masa Dasar Pembentukan Taruna (Madatukar) sejumlah 594 (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat) orang.

Secara umum pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna (SIPENCATAR) Kementerian Perhubungan Tahun 2024 berjalan dengan cukup baik dan lancar, namun masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan SIPENCATAR yang lebih baik di tahun berikutnya.

d. Program beasiswa Rintisan Gelar Pascasarjana (S-2) *Double Degree* di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan

Badan Pengembangan SDM Perhubungan juga melaksanakan program beasiswa Rintisan Gelar Pascasarjana (S-2) *Double Degree* di beberapa perguruan tinggi dalam negeri yang bekerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri. Adapun dalam rentang waktu 2020 sampai dengan 2024 telah terlaksana sejumlah 252 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Universitas Gadjah Mada (UGM) sejumlah 49 orang terdiri dari 39 orang *double degree* dan 10 orang *single degree*;
2. Universitas Indonesia (UI) sejumlah 44 orang terdiri dari 30 orang *double degree* dan 14 orang *single degree*;
3. Institut Teknologi Bandung (ITB) sejumlah 44 orang terdiri dari 37 orang *double degree* dan 5 orang *single degree*;
4. Institut Teknologi Surabaya (ITS) sejumlah 3 orang *single degree*;
5. Institut Teknologi Sepuluh Nopember sejumlah 50 terdiri dari 41 orang *double degree* dan 9 orang *single degree*;

6. Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sejumlah 5 orang *single degree*;
7. Institut Pertanian Bogor (IPB) sejumlah 1 orang *single degree*;
8. Universitas Negeri Surabaya sejumlah 4 orang *single degree*;
9. PTDI-STTD sejumlah 25 orang *single degree*;
10. STIP sejumlah 14 orang *single degree*.

III.5 REALISASI ANGGARAN BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN TAHUN 2024

Sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan, pagu yang semula diperoleh Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah Rp.3.708.986.474.000,-. Seiring berjalannya anggaran tersebut terdapat pengurangan pagu dari realokasi antar eselon I sebesar Rp.900.000.000,-, pengurangan pagu dari penyesuaian pagu PNB/BLU pada 5 (lima) Satker sebesar Rp.28.449.536.000,- dan pencantuman pagu PNB/BLU dari terlampauinya target penerimaan PNB/BLU sebesar Rp440.420.045.000,-, pencantuman pagu PNB/BLU dari penggunaan atas saldo awal BLU sebesar Rp71.669.967.000,- dan luncheon pagu SBSN 2023 sebesar Rp4.529.003.000,- sehingga pagu akhir Badan Pengembangan SDM Perhubungan TA.2024 menjadi Rp.4.196.255.953.000,-.

Dari total anggaran Rp. 4.196.255.953.000,- terserap sebesar Rp.3.913.125.578.051,- atau sebesar 93,25% (*unaudited*).

a. Alokasi Anggaran Tahun 2024

1) Pagu Anggaran Awal TA. 2024

Total Alokasi dana dalam DIPA TA. 2024 Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebesar **Rp. 3.708.986.474.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

a) Rincian Per sumber dana:

| | | | |
|-------------|---|-----|---------------------|
| (1) RM | : | Rp. | 2.323.701.057.000,- |
| (2) PNB/BLU | : | Rp. | 13.605.424.000,- |
| (3) BLU | : | Rp. | 1.189.173.024.000,- |
| (4) SBSN | : | Rp. | 182.506.969.000,- |

b) Alokasi perjenis belanja sebagai berikut:

| | | | |
|---------------------|---|-----|-------------------|
| (1) Belanja Pegawai | : | Rp. | 349.277.066.000,- |
|---------------------|---|-----|-------------------|

| | | | |
|--------------------|---|-----|---------------------|
| (2) Belanja Barang | : | Rp. | 2.668.664.844.000,- |
| - RM | : | Rp. | 1.465.886.396.000,- |
| - PNBP | : | Rp. | 13.605.424.000,- |
| - BLU | : | Rp. | 1.189.173.024.000,- |
| (3) Belanja Modal | : | Rp. | 691.044.564.000,- |
| - RM | : | Rp. | 508.537.595.000,- |
| - PNBP | : | Rp. | 0,- |
| - BLU | : | Rp. | 0,- |
| - SBSN | : | Rp. | 182.506.969.000,- |

2) Revisi Pagu Anggaran TA. 2024

Selama Tahun Anggaran 2024 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan mengusulkan 5 (lima) kali revisi anggaran kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan 2 (dua) revisi anggaran kewenangan Direktorat Pelaksanaan Anggaran (Dit.PA) dengan rincian sebagai berikut:

- a) Usulan Revisi Anggaran Lanjutan Pelaksanaan Proyek Surat Berharga Syariah Negara Tahun Anggaran (TA) 2023 ke TA 2024 pada Satuan Kerja Politeknik Transportasi Darat Bali senilai Rp4.529.003.000,- berdasarkan surat usulan nomor: KU.002/1/2/Set.BPSDMP/2024 tanggal 26 Januari 2024 perihal Usulan Revisi Anggaran Lanjutan Pelaksanaan Proyek Surat Berharga Syariah Negara Tahun Anggaran (TA) 2023 ke TA 2024 pada Satuan Kerja Politeknik Transportasi Darat Bali;
- b) Revisi Anggaran Pergeseran Antar Rincian Output (RO) Prioritas Nasional (PN) Antar Satker senilai Rp772.500.000,- berdasarkan surat usulan nomor: KU.002/1/10 Set.BPSDMP/2024 tanggal 22 Mei 2024 perihal Perubahan Usulan Revisi Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun Anggaran 2024;
- c) Revisi Relaksasi Blokir *Automatic Adjustment* senilai Rp246.525.776.000,- pada 30 Satker berdasarkan surat usulan nomor: KU.002/1/21/Set.BPSDMP/2024 tanggal 1 Juli 2024 perihal Usulan Rencana Penghapusan Blokir *Automatic Adjustment* di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun Anggaran 2024;
- d) Revisi Pergeseran Anggaran Antar Eselon I senilai Rp900.000.000,- pada 2 Satker berdasarkan surat usulan nomor: KU.002/3/6/Set.BPSDMP/2024 tanggal 25 Oktober 2024 perihal Revisi Anggaran Antar Unit Eselon I

dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan di Lingkungan Sekretariat Jenderal TA. 2024;

- e) Revisi Penyesuaian Pagu PNBP BLU senilai (Rp27.242.357.000) berdasarkan surat usulan nomor: KU.102/1/22/Set.BPSDMP/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal Perubahan atas Penyesuaian Pagu Penggunaan dan Pagu Belanja PNBP BLU Tahun Anggaran 2024;
- f) Revisi Anggaran Belanja Pegawai Antar Satker senilai Rp1.882.033.000,- berdasarkan surat usulan nomor: KU.002/3/9/Set.BPSDMP/2024 tanggal 7 November 2024 perihal Usulan Revisi Anggaran Pergeseran antar Satker di Lingkungan BPSDM Perhubungan Tahun Anggaran 2024;
- g) Revisi pergeseran anggaran belanja pegawai dan operasional antar satker senilai Rp3.424.437.000,- dan Rp8.198.194.000,- berdasarkan surat usulan nomor: KU.002/3/4/Set.BPSDMP/2024 tanggal 23 Oktober 2024 perihal Usulan Revisi Anggaran Pergeseran antar Satker di Lingkungan BPSDM Perhubungan Tahun Anggaran 2024.

Sehingga Total Pagu DIPA Akhir Badan Pengembangan SDM Perhubungan TA.2024 setelah adanya refocussing/penghematan dan pengurangan pagu serta penambahan pagu PNBP/BLU menjadi sebesar **Rp4.196.255.953.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

- Alokasi perjenis belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai : Rp. 358.576.891.000,-
 - b. Belanja Barang : Rp. 3.071.443.402.000,-
 - c. Belanja Modal : Rp. 766.235.660.000,-

3) Realisasi Penyerapan Anggaran TA. 2024

Realisasi penyerapan DIPA T.A 2024 posisi 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 3.913.125.578.051,-** dengan rincian dalam tabel 3.13 berikut:

Keuangan = 93,25%

Fisik = 99,53%

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran BPSDM Perhubungan

| JENIS BELANJA | PAGU DANA (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PERSENTASE KEUANGAN |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Belanja Pegawai | 358.576.891.000 | 352.626.866.177 | 98,34% |
| Belanja Barang | 3.071.443.402.000 | 2.885.195.869.640 | 93,94% |
| Belanja Modal | 766.235.660.000 | 675.302.842.234 | 88,13% |
| Total | 4.196.255.953.000 | 3.913.125.578.051 | 93,25% |

Untuk realisasi anggaran tahun 2024 per program kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut :

Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Per Program BPSDM Perhubungan

| Program | Pagu | Realisasi | Persentase |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Pendidikan dan Pelatihan Vokasi | 2.844.414.286.000 | 2.596.867.140.577 | 91,297% |
| Dukungan Manajemen | 1.351.841.667.000 | 1.316.258.437.474 | 97,368% |
| Grand Total | 4.196.255.953.000 | 3.913.125.578.051 | 93,253% |

Adapun rincian realisasi anggaran setiap Satker/UPT di Lingkungan BPSDM Perhubungan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut :

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran di Satker/UPT BPSDM Perhubungan

| NO | SATKER | PAGU | REALISASI | % |
|----|--|-----------------|-----------------|-------|
| 1 | POLITEKNIK PELAYARAN SULAWESI UTARA | 118.276.275.000 | 118.154.981.479 | 99,90 |
| 2 | BALAI DIKLAT PEMBANGUNAN KARAKTER SDM TRANSPORTASI | 43.055.657.000 | 42.693.246.515 | 99,16 |
| 3 | BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN | 126.998.391.000 | 124.701.817.417 | 98,19 |
| 4 | POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN | 189.517.302.000 | 185.106.348.273 | 97,67 |
| 5 | POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI | 179.612.946.000 | 174.367.809.907 | 97,08 |
| 6 | BALAI DIKLAT TRANSPORTASI LAUT | 86.005.818.000 | 82.935.016.638 | 96,43 |
| 7 | PUSAT PENGEMBANGAN SDMP UDARA | 34.353.079.000 | 32.861.836.392 | 95,66 |
| 8 | PUSAT PENGEMBANGAN SDMP LAUT | 28.401.863.000 | 27.041.974.717 | 95,21 |
| 9 | POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG | 235.638.859.000 | 223.764.750.608 | 94,96 |
| 10 | POLTEKPEL SURABAYA | 234.147.769.000 | 222.224.305.171 | 94,91 |
| 11 | POLITEKNIK TRANSPORTASI SDP PALEMBANG | 93.991.531.000 | 88.498.923.407 | 94,16 |
| 12 | POLITEKNIK PELAYARAN MALAHAYATI | 107.368.483.000 | 100.704.737.189 | 93,79 |
| 13 | POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD | 169.128.003.000 | 158.221.243.360 | 93,55 |
| 14 | POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR | 357.115.205.000 | 333.289.446.254 | 93,33 |
| 15 | POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN TEGAL | 102.470.115.000 | 95.503.816.740 | 93,20 |
| 16 | PUSAT PENGEMBANGAN SDM APARATUR PERHUBUNGAN | 130.692.815.000 | 121.591.757.972 | 93,04 |
| 17 | POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG | 206.928.307.000 | 192.251.016.127 | 92,91 |
| 18 | BALAI DIKLAT TRANSPORTASI DARAT MEMPAWAH | 49.702.089.000 | 46.072.126.891 | 92,70 |
| 19 | AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI | 137.459.134.000 | 127.083.576.342 | 92,45 |
| 20 | POLITEKNIK PELAYARAN SORONG | 86.981.118.000 | 80.132.682.034 | 92,13 |

| NO | SATKER | PAGU | REALISASI | % |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 21 | POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG (PPIC) | 238.904.097.000 | 219.982.597.622 | 92,08 |
| 22 | SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN | 284.049.348.000 | 259.309.153.108 | 91,29 |
| 23 | POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG | 86.165.542.000 | 78.390.606.261 | 90,98 |
| 24 | POLITEKNIK PENERBANGAN JAYAPURA | 99.634.790.000 | 90.549.055.609 | 90,88 |
| 25 | POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN | 231.167.423.000 | 209.275.559.655 | 90,53 |
| 26 | POLTEKPEL SUMATERA BARAT | 153.197.056.000 | 138.598.128.224 | 90,47 |
| 27 | BALAI DIKLAT PENERBANGAN (BP3) CURUG | 48.820.708.000 | 43.792.555.890 | 89,70 |
| 28 | PUSAT PENGEMBANGAN SDMP DARAT | 25.427.510.000 | 22.701.596.410 | 89,28 |
| 29 | SEKRETARIAT BPSDM PERHUBUNGAN | 70.250.089.000 | 62.257.684.464 | 88,62 |
| 30 | POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR | 78.042.742.000 | 68.565.981.945 | 87,86 |
| 31 | POLITEKNIK PENERBANGAN MEDAN | 66.366.299.000 | 58.295.309.730 | 87,84 |
| 32 | POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA | 96.385.590.000 | 84.211.855.900 | 87,37 |
| BPSDMP | | 4.196.255.953.000 | 3.913.131.498.251 | 93,25 |

Sumber Data: Bagian Keuangan Sekretariat BPSDM Perhubungan

b. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Badan Pengembangan SDM Perhubungan

1) Analisis Kegiatan Yang Tidak Terlaksana

Pada tahun anggaran 2024 Badan Pengembangan SDM Perhubungan tidak terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan.

2) Sisa Dana Kegiatan

Sisa dana kegiatan sumber dana RM selama tahun anggaran 2024 (data sampai dengan 31 Desember 2024) adalah sebesar Rp. 9.092.749.109,-, yang terdiri dari:

- (1) Sisa Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 5.950.024.823,-
- (2) Sisa Kegiatan Belanja Barang sebesar Rp. 2.836.792.551,- dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Belanja Keperluan Perkantoran sebesar Rp. 266.588.192,-;
 - b) Honor Operasional Satuan Kerja sebesar Rp. 96.283.300,-;
 - c) Belanja Bahan sebesar Rp. 636.142.643,-;
 - d) Honor Output Kegiatan sebesar Rp. 1.316.980.636,-;
 - e) Belanja Barang Non Operasional Lainnya Rp. 461.521.529,-;
 - f) Belanja Persediaan Barang Konsumsi sebesar Rp. 2.408.104,-;
 - g) Belanja Jasa Konsultan sebesar Rp. 3.622.811,-;
 - h) Belanja Jasa Profesi sebesar Rp. 489.078.957,-;
 - i) Belanja Jasa Lainnya sebesar Rp. 115.897.452,-;
 - j) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 17.397.648,-;

- k) Belanja Barang Lainnya sebesar Rp. 115.897.452,-;
- (3) Sisa Kegiatan Belanja Modal sebesar Rp. 305.931.735,-, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 88.373.431,-;
 - b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 136.749.774,-;
 - c) Belanja Modal Jaringan, Irigasi dan Jembatan sebesar Rp. 80.808.530,-.

3) Sisa Kontrak

Kegiatan Badan Pengembangan SDM Perhubungan sepanjang tahun 2024 tidak terdapat sisa kontrak.

4) Anggaran yang Diberi Tanda Bintang/Blokir

Kegiatan Badan Pengembangan SDM Perhubungan sampai dengan 31 Desember 2024, terdapat yang diberi tanda bintang/diblokir sejumlah Rp269.914.981.000,-, antara lain kegiatan sebagai berikut :

- (a) Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi sebesar Rp7.852.719.000,-;
- (b) Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan sebesar Rp3.285.247.000,-;
- (c) Pendidikan Transportasi sebesar Rp241.722.573.000,-;
- (d) Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi sebesar Rp2.000.291.000,-;
- (e) Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum SDM Transportasi sebesar Rp14.617.364.000,-;
- (f) Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik SDM Transportasi sebesar Rp3.140.000,-;
- (g) Legislasi dan Litigasi SDM Transportasi sebesar Rp49.641.000,-;
- (h) Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama SDM Transportasi sebesar Rp84.006.000,-.

5) Sisa Dana PNBPN / BLU

Sisa dana penggunaan PNBPN/BLU pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebesar Rp. 2.200.833.402,- yang terdiri dari:

- (a) Sisa Belanja Barang BLU/PNBPN sebesar Rp. 2.182.433.809,-;
- (b) Sisa Belanja Modal BLU/PNBPN sebesar Rp. 18.399.593,-.

6) Sisa Dana SBSN

Sisa Belanja Modal SBSN sebesar Rp. 2.221.811.438,-.

III.6 ANALISIS PERBANDINGAN JUMLAH LULUSAN PENDIDIKAN VOKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN DENGAN LEVEL NASIONAL

Jumlah lulusan pendidikan vokasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2024 yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) perguruan tinggi yang meliputi 1 (satu) sekolah tinggi dan 21 (dua puluh satu) politeknik yang tersebar di seluruh Indonesia adalah 5.732 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta 406 orang;
2. Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug 190 orang;
3. Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI) STTD Bekasi 895 orang;
4. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang 456 orang;
5. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar 431 orang;
6. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal 235 orang;
7. Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali 172 orang;
8. Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan (Poltektrans SDP) Palembang 196 orang;
9. Politeknik Pelayaran (Poltekel) Surabaya 559 orang;
10. Politeknik Pelayaran (Poltekel) Sumatera Barat 152 orang;
11. Politeknik Pelayaran (Poltekel) Banten 207 orang;
12. Politeknik Pelayaran (Poltekel) Barombong 149 orang;
13. Politeknik Pelayaran (Poltekel) Sorong 148 orang;
14. Politeknik Pelayaran (Poltekel) Malahayati 94 orang;
15. Politeknik Pelayaran (Poltekel) Sulawesi Utara 133 orang;
16. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Surabaya 224 orang;
17. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Jayapura 63 orang;
18. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Palembang 116 orang;
19. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Medan 95 orang;
20. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Makassar 159 orang;
21. Akademi Penerbangan Indonesia (API) Banyuwangi 44 orang;
22. Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun 228 orang.

Jika dibandingkan dengan jumlah lulusan pendidikan vokasi seluruh Indonesia berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi pada web portal :

<https://data.kemdikbud.go.id/dataset/p/peserta-didik-2/jumlah-lulusan-perguruan-tinggi-perguruan-tinggi-vokasi>

Yang diunggah per tanggal 15 Oktober 2024 berjumlah 134.496 orang seperti pada gambar 3.2 dibawah ini.

Gambar 3.2
Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi Vokasi di Seluruh Wilayah Indonesia

Informasi Dataset

Dataset Diunggah : 15 Oktober 2024
 Pemilik Data : Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
 Jadwal Pembaruan : Tahunan
 Format Dataset : XLSX

Bagikan Tautan Unduh Dataset

Preview Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Vokasi
 Semua Wilayah • 2023 • Semua Jenjang

| No | A | B | C | D | E |
|----|----|----|----|-------------------|----------------|
| 28 | 25 | 71 | 71 | Sulawesi Utara | 2.306 |
| 29 | 26 | 72 | 72 | Sulawesi Tengah | 882 |
| 30 | 27 | 73 | 73 | Sulawesi Selatan | 7.681 |
| 31 | 28 | 74 | 74 | Sulawesi Tenggara | 1.014 |
| 32 | 29 | 75 | 75 | Gorontalo | 9.332 |
| 33 | 30 | 76 | 76 | Sulawesi Barat | 150 |
| 34 | 31 | 81 | 81 | Maluku | 810 |
| 35 | 32 | 82 | 82 | Maluku Utara | 448 |
| 36 | 33 | 91 | 94 | Papua | 1.003 |
| 37 | 34 | 92 | 91 | Papua Barat | 956 |
| 38 | | | | Indonesia | 134.496 |

Sumber : Web portal Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, 2024

maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan memiliki persentase jumlah lulusan pendidikan vokasi 4,26% terhadap jumlah lulusan pendidikan vokasi di seluruh wilayah Indonesia. Nilai ini dapat diartikan bahwa kontribusi jumlah lulusan pendidikan vokasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebesar 4,26% terhadap jumlah lulusan Pendidikan vokasi di seluruh wilayah Indonesia.

BAB IV | PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2024 telah terlaksana dengan baik hal ini diindikasikan dengan tingkat capaian dari kinerja kegiatan maupun sasaran dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 106,470%. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran adalah sudah terdapat upaya penguatan kelembagaan baik *top and down* dengan melibatkan unsur tim kepatuhan internal lainnya dan subsektor lainnya, sarana pendukung komunikasi untuk memastikan koordinasi dan kerja sama yang baik di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan pembinaan tetap berjalan secara *continuous improvement*. Adapun sasaran strategis yang telah mencapai atau melebihi target adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu Indeks RB Kementerian Perhubungan mempunyai target sebesar 80,570 dan realisasi sebesar 85,260 sehingga capaiannya sebesar 105,821%;
- b. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum
Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat *Class Action* oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan mempunyai target sebesar 0,1 dan realisasi sebesar 0,0 sehingga capaiannya sebesar 110%;
- c. Meningkatkan Kualitas SDM Transportasi Yang Kompeten
Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten mempunyai target sebesar 91,726% dan realisasi sebesar 95,018% sehingga capaiannya sebesar 103,589% yang terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:
 - 1) Persentase Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi dengan target sebesar 97,441% dan realisasi sebesar 116,615% sehingga capaiannya sebesar 119,678%.

- 2) Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Pembentukan dengan target sebesar 87,916% dan realisasi sebesar 80,619% sehingga capaiannya sebesar 91,700%.

Sepanjang Tahun 2024 Badan Pengembangan SDM Perhubungan telah berhasil mencapai 3 (tiga) Indikator Kinerja Program (IKP) sesuai dan atau melebihi dengan target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan pada tahun 2024 mencapai tingkat keberhasilan yang sangat baik.

IV.2 SARAN TINDAK LANJUT

Untuk meningkatkan kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan di tahun 2024 dan pencapaian target sesuai RENSTRA 2020-2024, diperlukan langkah-langkah konkrit yang terdiri dari :

a. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan Badan Pengembangan SDM Perhubungan telah melakukan perencanaan kinerja dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan namun upaya optimal perlu ditingkatkan agar relevansi antara perencanaan dan realisasi serta prognosa tahun berikutnya dapat terpetakan dengan baik, untuk itu yang perlu diperhatikan dalam perencanaan di tahun 2024:

- 1) Perencanaan kinerja perlu memperhatikan pencapaian kuantitas dan kualitas lulusan diklat bidang SDM Transportasi melalui :
 - a) Perencanaan kinerja perlu memperhatikan pengembangan kurikulum, silabi sesuai dengan perkembangan IPTEK, perkembangan dunia industri, regulator dan operator;
 - b) Perencanaan kinerja perlu memperhatikan penyediaan pendidik dan kependidikan dan tenaga pakar/ahli yang bersertifikat sesuai kebutuhan dan beban kerja yang dapat menguasai perkembangan *update* teknologi pembelajaran dan sistem informasi diklat serta memberikan berikan saran dan masukan serta keilmuan untuk peningkatan pendidikan vokasi di Badan Pengembangan SDM Perhubungan kedepannya;
 - c) Perencanaan kinerja perlu memperhitungkan aspek regulasi, kelembagaan dan tata kelola terutama dari eksternal yang dapat mempengaruhi realisasi capaian jumlah peserta diklat serta internal meliputi model pendaftaran/seleksi peserta dan proses pembelajaran serta evaluasi;

- d) Perencanaan kinerja juga harus mengoptimalkan pembiayaan yang kreatif melalui pengelolaan professional yang menitikberatkan kepada kerjasama pemerintah dan swasta dan inovasi pembiayaan lainnya;
 - e) Perencanaan kinerja perlu memperhitungkan pola pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya seoptimal mungkin penguasaan teknologi, pola pendidikan berbasis *boarding school* melalui pola pengasuhan sesuai tuntutan kompetensi dan perubahan yang lebih humanis inovatif, dinamis, *safe and secure* serta saling asah, asih dan asuh;
- 2) Perencanaan Kinerja perlu memperhatikan aspek pengendalian internal maupun eksternal dalam mengawal akuntabilitas dan meningkatkan jaminan pengendalian sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan:
- a) Perencanaan kinerja diharapkan sudah memperhatikan aspek pengendalian dalam efektifitas pelaksanaan regulasi dan kebijakan dilapangan dan penguatan pengelolaan pendidikan melalui penerapan *good corporate governance* termasuk SAKIP dan SPIP;
 - b) Perencanaan kinerja sudah harus memperhitungkan penguatan fungsi pengasuhan, pengawas internal, penjaminan mutu, penguatan fungsi Pusat Pengembangan SDM Perhubungan dan Dewan Pengawas (DEWAS), koordinasi pusat dan *stakeholder*;
 - c) Perencanaan kinerja perlu mempertimbangkan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas serta kinerja lembaga diklat melalui penyempurnaan kelembagaan dan pembentukan PK BLU, dan pengelolaan BLU sebagai lembaga berbasis *entrepreneur*.
- 3) Perencanaan kinerja perlu memperhatikan peningkatan serapan lulusan, dengan memperhatikan:
- a) Sinergisitas dengan kebutuhan subsektor lainnya dalam rangka memetakan kebutuhan SDM bagi para lulusan peserta diklat Badan Pengembangan SDM Perhubungan secara tepat, dimana lulusan pendidikan dan pelatihan pada UPT di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja baik regulator, industri maupun operator baik dari aspek keselamatan maupun keamanan matra darat, laut, dan udara;

- b) Perencanaan kinerja perlu memperhatikan pengembangan kurikulum, silabi sesuai dengan perkembangan IPTEK, perkembangan dunia industri, regulator dan operator;
 - c) Perencanaan Kinerja perlu memperhitungkan peningkatan peran serta lembaga sertifikasi, pengawasan serta monitoring evaluasi dalam relevansi dunia pendidikan vokasi.
- 4) Perencanaan kinerja perlu memperhatikan aspek pemerataan pendidikan dalam rangka peningkatan pengabdian masyarakat, melalui:
- a) Perencanaan kinerja yang mempertimbangkan pemerataan kesempatan pendidikan dalam bentuk program afirmasi, pemberdayaan, agar pemerataan kesempatan, keikutsertaan masyarakat di seluruh wilayah NKRI dalam memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di bidang transportasi;
 - b) Perencanaan kinerja yang membantu pemberdayaan revitalisasi SMK Vokasi sebagai semangat Badan Pengembangan SDM Perhubungan dalam memberikan kesempatan SMK Vokasi untuk berkembang.

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan, program, kebijakan, anggaran dan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum pengukuran kinerja di Badan Pengembangan SDM Perhubungan telah dilakukan dengan sangat baik, meskipun demikian untuk kedepannya agar ditingkatkan lagi serta dilakukan penyempurnaan, melalui analisis dan evaluasi pada monitoring secara triwulan dan menekankan pada *outcome*, agar dapat diantisipasi ketidaktercapaian Indikator Kinerja Program (IKP) sedari awal. Terkait dengan peningkatan serapan lulusan, perlu direalisasikan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melakukan pertemuan dengan subsektor terkait untuk memperoleh informasi yang *valid* terhadap ketercukupan SDM atau penambahan lapangan pekerjaan atau bertambahnya operator penerbangan baik *Airline* atau *Air Chart* maupun perbaikan regulasi untuk pengembangan lulusan;
- 2) Melakukan kajian menyeluruh terutama terkait kurikulum apakah sudah sesuai atau *link and match* dengan kebutuhan industri dan regulator;

- 3) Melakukan kerjasama ikatan dinas calon lulusan dengan perusahaan pelayaran khususnya perusahaan tempat praktek darat maupun praktek laut;
- 4) Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah/kota untuk melakukan program pola pembibitan;
- 5) Meningkatkan anggaran untuk *tracer* alumni bidang ketarunaan, pengasuhan, kerjasama dan alumni melalui penggunaan teknologi informasi.

c. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah merupakan refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan dalam bentuk suatu laporan. Agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) lebih berguna untuk umpan balik (*feedback*) bagi pihak-pihak yang berkepentingan, format dan isi substansi laporan kinerja perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan. Pelaporan memberikan analisis yang *integrative* untuk mengambil kebijakan dan perencanaan strategis ke depannya.

d. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja adalah kegiatan analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi/unit kerja pemerintah. Informasi pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) harus dilakukan reviu secara berkala, sehingga dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan serta penilaian pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Evaluasi kinerja tahun 2024 memberikan pijakan awal untuk peningkatan kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan tahun 2025, dengan menitikberatkan pada pencapaian kuantitas dan kualitas peserta diklat, pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas, sarana dan prasarana yang *up to date*, pemerataan kesempatan pendidikan bagi masyarakat luas, serta pemenuhan kurikulum dan silabus yang relevan dengan kebutuhan industri, regulator maupun operator.

e. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Capaian kinerja Badan Pengembangan SDM

Perhubungan cukup baik, ini dapat dilihat dari rata-rata capaian sebesar 106,470%, mengalami penurunan dari tahun 2023 yang sebesar 111,76%.

Selain itu, Badan Pengembangan SDM Perhubungan telah menindaklanjuti Surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor: PS.302/7/1/ITJEN/2024 tanggal 1 Agustus 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dengan rincian sesuai tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2023

| NO | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | |
|----|---|---------------|---|
| 1 | Pengesahan Perjanjian Kinerja untuk tingkat Eselon I Tahun berikutnya paling lambat 25 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan dan diterima. | 1 | Pengesahan Perjanjian Kinerja untuk tingkat Eselon I Tahun berikutnya akan dilaksanakan paling lambat 25 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan dan diterima. Data Dukung: - |
| 2 | Perjanjian Kinerja revisi dilaksanakan atas dasar evaluasi capaian kinerja. | 2 | Perjanjian Kinerja revisi akan dilaksanakan atas dasar evaluasi capaian kinerja. Data Dukung: - |
| 3 | Sasaran Program dan Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta memenuhi seluruh kriteria SMART | 3 | Sasaran Program dan Indikator Kinerja tahun 2025 akan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta memenuhi seluruh kriteria SMART. Pada saat ini, telah disusun konsep Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program BPSDM Perhubungan Tahun 2025-2029. Data Dukung: - |
| 4 | Penyusunan pedoman pengukuran kinerja (Manual IKU) agar dapat menggambarkan sasaran yang akan dicapai. | 4 | Menyusun pedoman pengukuran kinerja (Manual IKU) yang dapat menggambarkan sasaran yang akan dicapai. Data Dukung: - |

| NO | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT |
|----|--|--|
| 5 | Pada dokumen Laporan Kinerja, menjelaskan capaian dengan perhitungan sesuai manual IKU dan data yang relevan. | <p>5 Menjelaskan capaian dengan perhitungan sesuai manual IKU dan data yang relevan pada dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Monitoring Capaian Kinerja.</p> <p>Data Dukung: Laporan Monitoring Capaian Kinerja triwulan I dan II tahun 2024;</p> |
| 6 | Monitoring terhadap capaian, agar menguraikan saran/upaya dalam pencapaian target periode berikutnya | <p>6 Menguraikan saran/upaya dalam pencapaian target pada periode berikutnya pada Laporan Monitoring Capaian Kinerja, Monitoring Renaksi atas PK dan LAKIP.</p> <p>Data Dukung: a. Laporan Monitoring Capaian Kinerja triwulan I dan II tahun 2024; b. Monitoring Renaksi Atas PK Bulan Januari s.d. Juli Tahun 2024</p> |
| 7 | Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai salah satu panduan dalam penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas organisasi dan penyesuaian anggaran guna memastikan terdapat kaitan antara langkah yang diambil dari hasil kerja yang dicapai. | <p>7 Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai salah satu panduan dalam penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas organisasi dan penyesuaian anggaran guna memastikan terdapat kaitan antara langkah yang diambil dari hasil kerja yang dicapai, dengan upaya sebagai berikut: mencantumkan narasi terkait penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas organisasi dan penyesuaian anggaran dalam sub bab saran pada Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan dan Laporan Kinerja yang menjelaskan apakah saran dimaksud pada periode sebelumnya telah ditindaklanjuti.</p> <p>Data Dukung: Laporan Monitoring Capaian Kinerja triwulan I dan II tahun 2024;</p> |
| 8 | Agar hasil evaluasi akuntabilitas internal dapat memberikan dampak nyata sebagai bahan perbaikan capaian kinerja lebih baik untuk periode sebelumnya. | <p>8 Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas internal sebagai bahan perbaikan capaian kinerja pada periode berikutnya, dengan upaya sebagai berikut:</p> |

| NO | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT |
|----|-------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> – menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP internal; – memantau capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya; – memperhatikan ketepatan waktu pencapaian kinerja terhadap target waktu yang telah ditetapkan dalam Renaksi atas PK, dan – memprioritaskan efisiensi SDM dan anggaran. <p>Data Dukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 ke BPSDM Perhubungan; b. Laporan Monitoring Capaian Kinerja triwulan I dan II tahun 2024. |

LAMPIRAN 1
FORMULIR CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Instansi : Kementerian Perhubungan
Unit Eselon I : Badan Pengembangan SDM Perhubungan
Tahun Anggaran : 2024

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) | SATUAN | TARGET PK REVISI | REALISASI | % CAPAIAN |
|---|---|---|--------|------------------|-----------|-----------|
| A | SP.WA.03. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 1 IKP1. Indeks RB Kementerian Perhubungan | Indeks | 80,570 | 85,260 | 105,821 |
| B | SP.WA.02. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum | 2 IKP2. Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan | % | 0,100 | 0,000 | 110,000 |
| C | SP.DL.01. Meningkatkan Kualitas SDM Transportasi Yang Kompeten | 3 IKP3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten | % | 91,726 | 95,018 | 103,589 |
| | | a. IKK2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi | % | 97,441 | 116,615 | 119,678 |
| | | 1) Jumlah Lulusan Diklat yang Bersertifikat Kompetensi: | Orang | 438.296 | 524.544 | |
| | | a Jumlah lulusan Diklat yang dihasilkan oleh UPT dibawah Pusbang Darat | Orang | 21.359 | 23.884 | |
| | | - Lulusan Diklat Pembentukan | Orang | 1.693 | 1.726 | |
| | | - Lulusan Diklat Teknis | Orang | 5.505 | 8.630 | |
| | | - Lulusan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 522 | 827 | |
| | | - Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 13.558 | 12.590 | |
| | | - Lulusan Diklat Penjurangan | Orang | 47 | 77 | |
| | | - Lulusan Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Darat | Orang | 34 | 34 | |
| | | b Jumlah lulusan Diklat yang dihasilkan oleh UPT dibawah Pusbang Laut | Orang | 401.689 | 484.614 | |
| | | - Lulusan Diklat Pembentukan | Orang | 2.931 | 3.115 | |
| | | - Lulusan Diklat Peningkatan | Orang | 23.807 | 18.993 | |
| | | - Lulusan Diklat Pemutakhiran | Orang | 12.710 | 11.294 | |
| | | - Lulusan Diklat Penyebaran/Revalidasi | Orang | 71.285 | 136.977 | |
| | | - Lulusan Diklat Teknis | Orang | 208.659 | 237.422 | |
| | | - Lulusan Diklat Penjurangan | Orang | 11.674 | 15.005 | |
| | | - Lulusan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 1.659 | 1.443 | |
| | | - Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 68.903 | 60.316 | |
| | | - Lulusan Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Laut | Orang | 61 | 49 | |
| | | c Jumlah lulusan Diklat yang dihasilkan oleh UPT dibawah Pusbang Udara | Orang | 15.248 | 16.046 | |
| | | - Lulusan Diklat Pembentukan | Orang | 891 | 891 | |
| | | - Lulusan Diklat Teknis | Orang | 5.397 | 5.998 | |
| | | - Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 8.075 | 8.078 | |
| | | - Lulusan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 885 | 1.079 | |
| | | - Lulusan Diklat Penjurangan | Orang | 0 | 0 | |
| | | 2) Jumlah Target Lulusan Diklat yang Bersertifikat Kompetensi: | Orang | 449.808 | 449.808 | |
| | | a Jumlah lulusan Diklat yang dihasilkan oleh UPT dibawah Pusbang Darat | Orang | 23.384 | 23.384 | |
| | | - Lulusan Diklat Pembentukan | Orang | 2.467 | 2.467 | |
| | | - Lulusan Diklat Teknis | Orang | 6.044 | 6.044 | |
| | | - Lulusan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 532 | 532 | |
| | | - Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 14.260 | 14.260 | |
| | | - Lulusan Diklat Penjurangan | Orang | 47 | 47 | |
| | | - Lulusan Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Darat | Orang | 34 | 34 | |
| | | b. Jumlah lulusan Diklat yang dihasilkan oleh UPT dibawah Pusbang Laut | Orang | 410.212 | 410.212 | |
| | | - Lulusan Diklat Pembentukan | Orang | 3.262 | 3.262 | |
| | | - Lulusan Diklat Peningkatan | Orang | 3.408 | 3.408 | |
| | | - Lulusan Diklat Pemutakhiran | Orang | 13.125 | 13.125 | |
| | | - Lulusan Diklat Penyebaran/Revalidasi | Orang | 77.196 | 77.196 | |
| | | - Lulusan Diklat Teknis | Orang | 225.434 | 225.434 | |
| | | - Lulusan Diklat Penjurangan | Orang | 12.517 | 12.517 | |
| | | - Lulusan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 1.766 | 1.766 | |
| | | - Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 73.440 | 73.440 | |
| | | - Lulusan Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Laut | Orang | 64 | 64 | |
| | | c Jumlah lulusan Diklat yang dihasilkan oleh UPT dibawah Pusbang Udara | Orang | 16.212 | 16.212 | |
| | | - Lulusan Diklat Pembentukan | Orang | 891 | 891 | |
| | | - Lulusan Diklat Teknis | Orang | 6.351 | 6.351 | |
| - Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 8.075 | 8.075 | | | |
| - Lulusan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 895 | 895 | | | |
| - Lulusan Diklat Penjurangan | Orang | 0 | 0 | | | |
| b. Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Pembentukan | % | 87,916 | 80,619 | 91,700 | | |
| - Jumlah Lulusan Diklat Pembentukan pada tahun 2023 yang telah mendapat pekerjaan pada tahun 2024 ≤ 1 tahun | Orang | 4.940 | 4.530 | | | |
| - Jumlah keseluruhan lulusan Diklat Pembentukan pada tahun 2023 | Orang | 5.619 | 5.619 | | | |

| PROGRAM | ANGGARAN |
|--|---------------------|
| Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan | |
| 1. Jumlah Anggaran Tahun 2024 | Rp3.708.986.474.000 |
| 2. Pagu Revisi Tahun 2024 | Rp4.196.255.953.000 |
| 3. Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2024 | Rp3.913.125.578.051 |

LAMPIRAN 2
FORMULIR CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 (PER TRIWULAN)

Instansi : Kementerian Perhubungan
Unit Eselon I : Badan Pengembangan SDM Perhubungan
Tahun Anggaran : 2024

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) | SATUAN | TARGET PK REVISI | REALISASI CAPAIAN TAHUN 2024 | | | | % CAPAIAN |
|---|---|---|---------|------------------|------------------------------|---------|---------|---------|----------------|
| | | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | |
| A | SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 1 IKP1. Indeks RB Kementerian Perhubungan | % | 80,570 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 85,260 | 105,821 |
| Rata - Rata Capaian Sasaran | | | | | | | | | 105,821 |
| B | SP.WA.02. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum | 2 IKP2. Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan | % | 0,100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,000 |
| Rata - Rata Capaian Sasaran | | | | | | | | | 110,000 |
| C | SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi Yang Kompeten | 3 IKP3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten | % | 91,726 | 50,419 | 73,605 | 80,158 | 95,018 | 103,589 |
| | | a. IKK2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi | % | 97,441 | 31,440 | 84,040 | 90,357 | 116,615 | 119,678 |
| | | 1) Jumlah Lulusan Diklat yang Bersertifikat Kompetensi: | Orang | 438.296 | 119.223 | 263.768 | 406.432 | 524.544 | |
| | | a Jumlah lulusan Diklat yang dihasilkan oleh UPT dibawah Pusbang Darat | Orang | 21.359 | 6.899 | 14.928 | 18.135 | 23.884 | |
| | | - Lulusan Diklat Pembentukan | Orang | 1.693 | 0 | 2.761 | 1.555 | 1.726 | |
| | | - Lulusan Diklat Teknis | Orang | 5.505 | 1.184 | 3.442 | 5.498 | 8.630 | |
| | | - Lulusan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 522 | 15 | 61 | 327 | 827 | |
| | | - Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 13.558 | 5.700 | 8.630 | 10.708 | 12.590 | |
| | | - Lulusan Diklat Penjenjangan | Orang | 47 | 0 | 0 | 47 | 77 | |
| | | - Lulusan Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Darat | Orang | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | |
| | | b Jumlah lulusan Diklat yang dihasilkan oleh UPT dibawah Pusbang Laut | Orang | 401.689 | 109.048 | 241.365 | 375.603 | 484.614 | |
| | | - Lulusan Diklat Pembentukan | Orang | 2.931 | 367 | 1.523 | 2.211 | 3.115 | |
| | | - Lulusan Diklat Peningkatan | Orang | 23.807 | 2.186 | 6.970 | 12.751 | 18.993 | |
| | | - Lulusan Diklat Pemutakhiran | Orang | 12.710 | 3.007 | 5.503 | 7.957 | 11.294 | |
| | | - Lulusan Diklat Penyebaran/Revalidasi | Orang | 71.285 | 30.746 | 67.319 | 106.738 | 136.977 | |
| | | - Lulusan Diklat Teknis | Orang | 208.659 | 56.356 | 112.240 | 170.265 | 237.422 | |
| | | - Lulusan Diklat Penjenjangan | Orang | 11.674 | 0 | 7.841 | 12.519 | 15.005 | |
| | | - Lulusan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 1.659 | 26 | 333 | 696 | 1.443 | |
| | | - Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 68.903 | 16.360 | 39.636 | 62.466 | 60.316 | |
| | | - Lulusan Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Laut | Orang | 61 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| | | c Jumlah lulusan Diklat yang dihasilkan oleh UPT dibawah Pusbang Udara | Orang | 15.248 | 3.276 | 7.475 | 12.694 | 16.046 | |
| | | - Lulusan Diklat Pembentukan | Orang | 891 | 0 | 0 | 890 | 891 | |
| | | - Lulusan Diklat Teknis | Orang | 5.397 | 793 | 1.966 | 4.222 | 5.998 | |
| | | - Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 8.075 | 2.451 | 5.231 | 6.930 | 8.078 | |
| | | - Lulusan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 885 | 32 | 278 | 652 | 1.079 | |
| | | - Lulusan Diklat Penjenjangan | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2) Jumlah Target Lulusan Diklat yang Bersertifikat Kompetensi: | Orang | 449.808 | 449.808 | 449.808 | 449.808 | 449.808 | |
| | | a Jumlah lulusan Diklat yang dihasilkan oleh UPT dibawah Pusbang Darat | Orang | 23.384 | 23.384 | 23.384 | 23.384 | 23.384 | |
| | | - Lulusan Diklat Pembentukan | Orang | 2.467 | 2.467 | 2.467 | 2.467 | 2.467 | |
| | | - Lulusan Diklat Teknis | Orang | 6.044 | 6.044 | 6.044 | 6.044 | 6.044 | |
| | | - Lulusan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | |
| | | - Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 14.260 | 14.260 | 14.260 | 14.260 | 14.260 | |
| | | - Lulusan Diklat Penjenjangan | Orang | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| - Lulusan Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Darat | Orang | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | | | |
| b. Jumlah lulusan Diklat yang dihasilkan oleh UPT dibawah Pusbang Laut | Orang | 410.212 | 410.212 | 410.212 | 410.212 | 410.212 | | | |
| - Lulusan Diklat Pembentukan | Orang | 3.262 | 3.262 | 3.262 | 3.262 | 3.262 | | | |
| - Lulusan Diklat Peningkatan | Orang | 3.408 | 3.408 | 3.408 | 3.408 | 3.408 | | | |
| - Lulusan Diklat Pemutakhiran | Orang | 13.125 | 13.125 | 13.125 | 13.125 | 13.125 | | | |
| - Lulusan Diklat Penyebaran/Revalidasi | Orang | 77.196 | 77.196 | 77.196 | 77.196 | 77.196 | | | |
| - Lulusan Diklat Teknis | Orang | 225.434 | 225.434 | 225.434 | 225.434 | 225.434 | | | |
| - Lulusan Diklat Penjenjangan | Orang | 12.517 | 12.517 | 12.517 | 12.517 | 12.517 | | | |
| - Lulusan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | | | |
| - Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 73.440 | 73.440 | 73.440 | 73.440 | 73.440 | | | |
| - Lulusan Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Laut | Orang | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | | | |
| c Jumlah lulusan Diklat yang dihasilkan oleh UPT dibawah Pusbang Udara | Orang | 16.212 | 16.212 | 16.212 | 16.212 | 16.212 | | | |
| - Lulusan Diklat Pembentukan | Orang | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | | | |
| - Lulusan Diklat Teknis | Orang | 6.351 | 6.351 | 6.351 | 6.351 | 6.351 | | | |
| - Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 8.075 | 8.075 | 8.075 | 8.075 | 8.075 | | | |
| - Lulusan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | | | |
| - Lulusan Diklat Penjenjangan | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| b. Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Pembentukan | % | 87,916 | 63,072 | 66,649 | 73,358 | 80,619 | 91,700 | | |
| - Jumlah Lulusan Diklat Pembentukan pada tahun 2022 yang telah mendapat pekerjaan pada tahun 2023 ≤ 1 tahun | Orang | 4.940 | 3.544 | 3.745 | 4.122 | 4.530 | | | |
| - Jumlah keseluruhan lulusan Diklat Pembentukan pada tahun 2022 | Orang | 5.619 | 5.619 | 5.619 | 5.619 | 5.619 | | | |
| Rata - Rata Capaian Sasaran | | | | | | | | | 103,589 |
| Total Rata - Rata Capaian Sasaran | | | | | | | | | 106,470 |

| PROGRAM | ANGGARAN |
|---|---------------------|
| Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhub | |
| 1. Jumlah Anggaran Tahun 2024 | Rp3.708.986.474.000 |
| 2. Pagu Revisi Tahun 2024 | Rp4.196.255.953.000 |
| 3. Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2024 | Rp3.913.125.578.051 |

LAMPIRAN 3
CAPAIAN KINERJA (2020-2024) DENGAN TARGET PK (2020-2024)

Instansi : Kementerian Perhubungan
Unit Eselon I : Badan Pengembangan SDM Perhubungan
Tahun Anggaran : 2024

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) | SATUAN | TARGET PK 2020-2024 | TAHUN 2020 | | | TAHUN 2021 | | | TAHUN 2022 | | | TAHUN 2023 | | | TAHUN 2024 | | | |
|--|---|------------------------------------|--|---------------------|------------|-----------|--------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | TARGET PK | REALISASI | % | TARGET PK | REALISASI | % | TARGET PK | REALISASI | % | TARGET PK | REALISASI | % | TARGET PK | REALISASI | % | |
| A | SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 1 | IKP1. Indeks RB Kementerian Perhubungan | Indeks | 79 | 78,000 | 0,000 | 0,000 | 79,000 | 78,390 | 99,228 | 80,570 | 79,200 | 98,300 | 77,000 | 78,400 | 101,818 | 80,570 | 85,260 | 105,821 |
| | | 2 | IKP2. Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran | % | 100 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Rata - Rata Capaian Sasaran | | | | | | | 0,000 | | | 99,228 | | | 98,300 | | | 101,818 | | | 105,821 | |
| B | SP.WA.02. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum | 2 | IKP2. Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat <i>Class Action</i> oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan | Rasio | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 110,000 | 0,100 | 0,000 | 110,000 | 0,100 | 0,000 | 110,000 | |
| | | Rata - Rata Capaian Sasaran | | | | | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 110,000 | | | 110,000 | | |
| C | SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi Yang Kompeten | 3 | IKP3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten | % | 89 | 88,256 | 91,336 | 103,490 | 85,852 | 87,840 | 102,316 | 91,726 | 95,314 | 103,912 | 89,170 | 110,100 | 123,472 | 91,726 | 95,018 | 103,589 |
| | | a. | IKK2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi | % | 95 | 93,140 | 117,640 | 126,304 | 93,880 | 127,650 | 135,971 | 97,441 | 134,782 | 138,322 | 92,780 | 147,610 | 159,097 | 97,441 | 116,615 | 119,678 |
| | | b. | IKK3. Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi | % | 86 | 85,000 | 73,800 | 86,824 | 80,500 | 61,300 | 76,149 | 87,916 | 69,002 | 78,486 | 86,770 | 85,100 | 98,075 | 87,916 | 80,619 | 91,700 |
| Rata - Rata Capaian Sasaran | | | | | | | | 103,490 | | | 102,316 | | | 103,912 | | | 123,472 | | | 103,589 |
| Total Rata - Rata Capaian Sasaran | | | | | | | | 51,745 | | | 51,158 | | | 104,070 | | | 111,763 | | | 106,794 |

LAMPIRAN 4
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024, TARGET RENSTRA , RKT DAN PK TAHUN 2024

Instansi : **Kementerian Perhubungan**
Unit Eselon I : **Badan Pengembangan SDM Perhubungan**
Tahun Anggaran : **2024**

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) | SATUAN | TARGET RENSTRA | TARGET RKT | TARGET PK | REALISASI | % CAPAIAN |
|----|---|--|--------|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| A | SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 1 IKP1. Indeks RB Kementerian Perhubungan | Indeks | 80,000 | 80,500 | 80,570 | 85,260 | 105,821 |
| B | SP.WA.02. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum | 2 IKP2. Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat <i>Class Action</i> oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan | % | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 110,000 |
| C | SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi Yang Kompeten | 3 IKP3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten | % | 85,000 | 85,000 | 89,170 | 95,018 | 106,558 |
| | | a. IKK2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi | % | 85,000 | 85,000 | 92,780 | 116,615 | 125,690 |
| | | b. IKK3. Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi | % | 85,000 | 85,000 | 86,770 | 80,619 | 92,912 |

LAMPIRAN 5
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024 DIBANDINGKAN TARGET RENSTRA 2024

Instansi : Kementerian Perhubungan
Unit Eselon I : Badan Pengembangan SDM Perhubungan
Tahun Anggaran : 2024

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) | SATUAN | TARGET RENSTRA | REALISASI | % CAPAIAN |
|--|---|--|--------|----------------|-----------|----------------|
| A | SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 1 IKP1. Indeks RB Kementerian Perhubungan | Indeks | 80,000 | 85,260 | 106,575 |
| Rata - Rata Capaian Sasaran | | | | | | 106,575 |
| B | SP.WA.02. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum | 2 IKP2. Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat <i>Class Action</i> oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan | % | 0,100 | 0,000 | 110,000 |
| Rata - Rata Capaian Sasaran | | | | | | 110,000 |
| C | SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi Yang Kompeten | 3 Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten | % | 85,000 | 95,018 | 111,785 |
| | | a. Persentase Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi | % | 85,000 | 116,615 | 137,194 |
| | | b. Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi | % | 85,000 | 80,619 | 94,846 |
| Rata - Rata Capaian Sasaran | | | | | | 111,785 |
| Total Rata - Rata Capaian Sasaran | | | | | | 109,453 |

| PROGRAM | | ANGGARAN | |
|--|---|----------|----------------------|
| Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan | | | |
| 1. Jumlah Anggaran Tahun 2024 | : | Rp | 3.708.986.474.000,00 |
| 2. Pagu Revisi Tahun 2024 | : | Rp | 4.196.255.953.000,00 |
| 3. Jumlah Realisasi Anggaran Th.2024 | : | Rp | 3.913.125.578.051,00 |

LAMPIRAN 6
CAPAIAN KINERJA (2020-2024) DENGAN TARGET RENSTRA (2020-2024)

Instansi : Kementerian Perhubungan
Unit Eselon I : Badan Pengembangan SDM Perhubungan
Tahun Anggaran : 2024

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) | SATUAN | TARGET RENSTRA 2020-2024 | TAHUN 2020 | | | TAHUN 2021 | | | TAHUN 2022 | | | TAHUN 2023 | | | TAHUN 2024 | | | |
|--|---|------------------------------------|--|--------------------------|------------|-----------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|---------|
| | | | | | TARGET | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % | |
| A | SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 1 | IKP1. Indeks RB Kementerian Perhubungan | Indeks | 80 | 78,000 | 0,000 | 0,000 | 79,000 | 78,390 | 99,228 | 80,000 | 79,200 | 99,000 | 80,000 | 78,400 | 98,000 | 80,500 | 85,260 | 105,913 |
| | | 2 | IKP2. Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran | % | 100 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Rata - Rata Capaian Sasaran | | | | | | | 0,000 | | | 99,228 | | | 99,000 | | | 98,000 | | | 105,913 | |
| B | SP.WA.02. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum | 2 | IKP2. Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat <i>Class Action</i> oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan | Rasio | 40 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 110,000 | 100,000 | 0,000 | 110,000 | 100,000 | 0,000 | 110,000 | |
| | | Rata - Rata Capaian Sasaran | | | | | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 110,000 | | | 110,000 | | |
| C | SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi Yang Kompeten | 3 | IKP3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten | % | 85 | 85,000 | 91,336 | 107,454 | 85,000 | 87,840 | 103,341 | 85,000 | 95,314 | 112,134 | 85,000 | 110,100 | 129,529 | 85,000 | 95,018 | 111,785 |
| | | a. | IKK2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi | % | 85 | 85,000 | 117,640 | 138,400 | 85,000 | 127,650 | 150,176 | 85,000 | 134,782 | 158,567 | 85,000 | 147,610 | 173,659 | 85,000 | 116,615 | 137,194 |
| | | b. | IKK3. Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi | % | 85 | 85,000 | 73,800 | 86,824 | 85,000 | 61,300 | 72,118 | 85,000 | 69,002 | 81,179 | 85,000 | 85,100 | 100,118 | 85,000 | 80,619 | 94,846 |
| Rata - Rata Capaian Sasaran | | | | | | | 107,454 | | | 103,341 | | | 112,134 | | | 129,529 | | | 111,785 | |
| Total Rata - Rata Capaian Sasaran | | | | | | | 35,818 | | | 67,523 | | | 107,045 | | | 112,510 | | | 109,233 | |

LAMPIRAN 7
PERJANJIAN KINERJA (PK) DAN REVISI TAHUN 2024

Instansi : Kementerian Perhubungan
Unit Eselon I : Badan Pengembangan SDM Perhubungan
Tahun Anggaran : 2024

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) | SATUAN | TARGET PK AWAL | TARGET PK REVISI |
|----|---|---|--------|----------------|------------------|
| A | SP.WA.03. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 1 IKP1. Indeks RB Kementerian Perhubungan | Indeks | 80,500 | 80,570 |
| B | SP.WA.02. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum | 2 IKP2. Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan | % | 0,100 | 0,100 |
| C | SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi Yang Kompeten | 3 IKP3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten | % | 90,375 | 91,726 |
| | | a. IKK2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi | % | 93,077 | 97,441 |
| | | 1) Jumlah Lulusan Diklat yang Bersertifikat Kompetensi: | Orang | 375.654 | 438.296 |
| | | a Jumlah lulusan Diklat yang dihasilkan oleh UPT dibawah Pusbang Darat | Orang | 21.021 | 21.359 |
| | | - Lulusan Diklat Pembentukan | Orang | 1.693 | 1.693 |
| | | - Lulusan Diklat Teknis | Orang | 5.006 | 5.505 |
| | | - Lulusan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 616 | 522 |
| | | - Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 13.648 | 13.558 |
| | | - Lulusan Diklat Penjenjangan | Orang | 24 | 47 |
| | | - Lulusan Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Darat | Orang | 34 | 34 |
| | | b Jumlah lulusan Diklat yang dihasilkan oleh UPT dibawah Pusbang Laut | Orang | 340.135 | 401.689 |
| | | - Lulusan Diklat Pembentukan | Orang | 3.809 | 2.931 |
| | | - Lulusan Diklat Peningkatan | Orang | 2.256 | 23.807 |
| | | - Lulusan Diklat Pemutakhiran | Orang | 9.174 | 12.710 |
| | | - Lulusan Diklat Penyebaran/Revalidasi | Orang | 56.151 | 71.285 |
| | | - Lulusan Diklat Teknis | Orang | 185.698 | 208.659 |
| | | - Lulusan Diklat Penjenjangan | Orang | 9.159 | 11.674 |
| | | - Lulusan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 1.164 | 1.659 |
| | | - Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 72.663 | 68.903 |
| | | - Lulusan Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Laut | Orang | 61 | 61 |
| | | c Jumlah lulusan Diklat yang dihasilkan oleh UPT dibawah Pusbang Udara | Orang | 14.498 | 15.248 |
| | | - Lulusan Diklat Pembentukan | Orang | 905 | 891 |
| | | - Lulusan Diklat Teknis | Orang | 3.269 | 5.397 |
| | | - Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 9.740 | 8.075 |
| | | - Lulusan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 536 | 885 |
| | | - Lulusan Diklat Penjenjangan | Orang | 48 | 0 |
| | | 2) Jumlah Target Lulusan Diklat yang Bersertifikat Kompetensi: | Orang | 403.595 | 449.808 |
| | | a Jumlah lulusan Diklat yang dihasilkan oleh UPT dibawah Pusbang Darat | Orang | 23.125 | 23.384 |
| | | - Lulusan Diklat Pembentukan | Orang | 2.467 | 2.467 |
| | | - Lulusan Diklat Teknis | Orang | 5.601 | 6.044 |
| | | - Lulusan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 626 | 532 |
| | | - Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 14.350 | 14.260 |
| | | - Lulusan Diklat Penjenjangan | Orang | 47 | 47 |
| | | - Lulusan Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Darat | Orang | 34 | 34 |
| | | b. Jumlah lulusan Diklat yang dihasilkan oleh UPT dibawah Pusbang Laut | Orang | 363.906 | 410.212 |
| | | - Lulusan Diklat Pembentukan | Orang | 3.967 | 3.262 |
| | | - Lulusan Diklat Peningkatan | Orang | 2.256 | 3.408 |
| | | - Lulusan Diklat Pemutakhiran | Orang | 9.528 | 13.125 |
| | | - Lulusan Diklat Penyebaran/Revalidasi | Orang | 61.327 | 77.196 |
| | | - Lulusan Diklat Teknis | Orang | 199.014 | 225.434 |
| | | - Lulusan Diklat Penjenjangan | Orang | 9.538 | 12.517 |
| | | - Lulusan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 1.267 | 1.766 |
| | | - Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 76.945 | 73.440 |
| | | - Lulusan Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Laut | Orang | 64 | 64 |
| | | c Jumlah lulusan Diklat yang dihasilkan oleh UPT dibawah Pusbang Udara | Orang | 16.564 | 16.212 |
| | | - Lulusan Diklat Pembentukan | Orang | 906 | 891 |
| | | - Lulusan Diklat Teknis | Orang | 5.334 | 6.351 |
| | | - Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 9.740 | 8.075 |
| | | - Lulusan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 536 | 895 |
| | | - Lulusan Diklat Penjenjangan | Orang | 48 | 0 |
| | | b. IKK3. Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi | % | 88,574 | 87,916 |
| | | 1 Jumlah Lulusan Diklat Pembentukan pada tahun 2023 yang telah mendapat pekerjaan pada tahun 2024 ≤ 1 tahun | Orang | 4.977 | 4.940 |
| | | 2 Jumlah keseluruhan lulusan Diklat Pembentukan pada tahun 2023 | Orang | 5.619 | 5.619 |

| PROGRAM | ANGGARAN |
|--|---------------------|
| Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan | |
| 1. Jumlah Anggaran Tahun 2024 | Rp3.708.986.474.000 |
| 2. Pagu Revisi Tahun 2024 | Rp4.196.255.953.000 |
| 3. Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2024 | Rp3.913.125.578.051 |

LAMPIRAN 8
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPSDM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020 - 2024

Instansi : Kementerian Perhubungan

Unit Eselon I : Badan Pengembangan SDM Perhubungan

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) | SATUAN | TARGET | | | | |
|----|---|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| A | SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 1 IKP1. Indeks RB Kementerian Perhubungan | Indeks | 78,00 | 79,00 | 79,50 | 80,00 | 80,50 |
| | | 2 IKP2. Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| B | SP.WA.02. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum | 2 IKP2. Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat <i>Class Action</i> oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan | Rasio | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| C | SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi Yang Kompeten | 3 IKP3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten | % | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| | | a. IKK2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi | % | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| | | b. IKK3. Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi | % | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |

LAMPIRAN 9
RENCANA KINERJA TAHUNAN

Instansi : **Kementerian Perhubungan**
Unit Eselon I : **Badan Pengembangan SDM Perhubungan**
Tahun Anggaran : **2024**

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) | | TARGET | SATUAN |
|----|---|---------------------------------|--|--------|--------|
| A | SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 1 | IKP1. Indeks RB Kementerian Perhubungan | 80,500 | Indeks |
| B | SP.WA.02. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum | 2 | IKP2. Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat <i>Class Action</i> oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan | 0,100 | % |
| C | SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi Yang Kompeten | 3 | IKP3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten | 85,000 | % |
| | | a. | IKK2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi | 85,000 | % |
| | | b. | IKK3. Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi | 85,000 | % |

LAMPIRAN 10
CAPAIAN KINERJA IKK BPSDMP TAHUNAN

Instansi : Kementerian Perhubungan
Unit Eselon I : Badan Pengembangan SDM Perhubungan
Tahun Anggaran : 2024

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) | SATUAN | TARGET PK 2024 BPSDMP | TARGET PK REVISI 2024 BPSDMP | REALISASI BPSDMP | CAPAIAN (%) |
|----|---|---|--------|-----------------------|------------------------------|------------------|----------------|
| 1 | SP.WA.03. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | IKP 1 Indeks RB Kementerian Perhubungan | Indeks | 80,500 | 80,570 | 85,260 | 105,821 |
| 2 | SP.WA.02. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum | IKP 2 Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat dibandingkan Dengan Peraturan Menteri | Rasio | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 110,000 |
| 3 | SP.DC.01. Meningkatkan Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten | IKP 3 Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten | % | 90,375 | 91,726 | 110,100 | 120,032 |
| | | IKK.1 Jumlah Peserta Diklat Transportasi | Orang | 423.224 | 470.834 | 545.146 | 115,783 |
| | | - Peserta Diklat Pembentukan | Orang | 26.717 | 25.724 | 23.847 | |
| | | - Peserta Diklat Penjenjangan | Orang | 9.654 | 14.005 | 20.948 | |
| | | - Peserta Diklat Teknis | Orang | 209.949 | 240.093 | 253.273 | |
| | | - Peserta Diklat Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 2.429 | 2.694 | 3.381 | |
| | | - Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 101.035 | 95.175 | 80.986 | |
| | | - Peserta Diklat Peningkatan | Orang | 2.256 | 2.256 | 14.255 | |
| | | - Peserta Diklat Pemutakhiran | Orang | 9.528 | 13.362 | 11.295 | |
| | | - Peserta Diklat Pengukuhan | Orang | 0 | 0 | 0 | |
| | | - Peserta Diklat Penyegaran/Revalidasi | Orang | 61.327 | 77.196 | 137.008 | |
| | | - Peserta Diklat Kerjasama | Orang | 0 | 0 | 0 | |
| | | - Diklat Pembangunan Karakter | Orang | 0 | 0 | 0 | |
| | | - Pendidikan Strata II Terapan Transportasi Laut | Orang | 329 | 329 | 153 | |
| | | IKK.2 Persentase Lulusan Diklat Transportasi | % | 93,083 | 97,441 | 116,615 | 119,678 |
| | | a Jumlah Lulusan Diklat Transportasi pada tahun 2022 | Orang | 375.677 | 438.296 | 524.544 | |
| | | - Lulusan Diklat Pembentukan | Orang | 6.407 | 5.515 | 5.732 | |
| | | - Lulusan Diklat Penjenjangan | Orang | 9.254 | 11.721 | 15.082 | |
| | | - Lulusan Diklat Teknis | Orang | 193.973 | 219.561 | 252.050 | |
| | | - Lulusan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 2.316 | 3.066 | 3.349 | |
| | | - Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 96.051 | 90.536 | 80.984 | |
| | | - Lulusan Diklat Peningkatan | Orang | 2.256 | 23.807 | 18.993 | |
| | | - Lulusan Diklat Pemutakhiran | Orang | 9.174 | 12.710 | 11.294 | |
| | | - Lulusan Diklat Pengukuhan | Orang | 0 | 0 | 0 | |
| | | - Lulusan Diklat Penyegaran/Revalidasi | Orang | 56.151 | 71.285 | 136.977 | |
| | | - Lulusan Diklat Kerjasama | Orang | 0 | 0 | 0 | |
| | | - Diklat Pembangunan Karakter | Orang | 0 | 0 | 0 | |
| | | - Lulusan Diklat Teknis Fungsional | Orang | 0 | 0 | 0 | |
| | | - Lulusan Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi | Orang | 95 | 95 | 83 | |
| | | b Jumlah target lulusan Diklat Transportasi pada tahun 2022 | Orang | 403.595 | 449.808 | 449.808 | |
| | | - Lulusan Diklat Pembentukan | Orang | 7.340 | 6.620 | 6.620 | |
| | | - Lulusan Diklat Penjenjangan | Orang | 9.633 | 12.564 | 12.564 | |
| | | - Lulusan Diklat Teknis | Orang | 209.949 | 237.829 | 237.829 | |
| | | - Lulusan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM | Orang | 2.429 | 3.193 | 3.193 | |
| | | - Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat | Orang | 101.035 | 95.775 | 95.775 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---------|--|----------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | - Lulusan Diklat Peningkatan | Orang | 2.256 | 3.408 | 3.408 | |
| | | | - Lulusan Diklat Pemutakhiran | Orang | 9.528 | 13.125 | 13.125 | |
| | | | - Lulusan Diklat Pengukuhan | Orang | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - Lulusan Diklat Penyebaran/Revalidasi | Orang | 61.327 | 77.196 | 77.196 | |
| | | | - Lulusan Diklat Kerjasama | Orang | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - Diklat Pembangunan Karakter | Orang | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - Lulusan Diklat Teknis/Fungsional | Orang | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - Lulusan Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi | Orang | 98 | 98 | 98 | |
| | | IKK.3 | Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Pembentukan | % | 88,574 | 87,916 | 80,619 | 91,700 |
| | | a | Jumlah Lulusan Diklat Pembentukan pada tahun 2021 yang telah mendapat pekerjaan pada tahun 2022 ≤ 1 tahun | Orang | 4.977 | 4.940 | 4.530 | |
| | | b | Jumlah keseluruhan lulusan Diklat Pembentukan pada tahun 2021 | Orang | 5.619 | 5.619 | 5.619 | |
| | | IKK.4 | Persentase Utilitas Pemanfaatan sarana dan Prasarana Diklat SDM Perhubungan yang berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir | % | 78,068 | 80,750 | 84,642 | 104,820 |
| | | IKK 5. | Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan | Kegiatan | 268 | 528 | 427 | 80,871 |
| | | IKK 6. | Jumlah Penelitian oleh tenaga pengajar | Dokumen | 470 | 527 | 725 | 137,571 |
| | | a | Jumlah Target Penelitian pada Jurnal Nasional | Dokumen | 340 | 348 | 505 | |
| | | b | Jumlah Target Penelitian pada Jurnal Internasional | Dokumen | 130 | 179 | 220 | |
| | | IKK 7. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 3,102 | 3,291 | 3,508 | 106,594 |
| 4 | SK.WA.03.01 Meningkatkan Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan BPSDM Perhubungan | IKK.8 | Kualitas pelaksanaan kerjasama dan kemitraan BPSDMP | % | 100,000 | 87,500 | 100,000 | 114,286 |
| | | a | Jumlah dokumen kerjasama yang telah ditindaklanjuti tahun (n) | Dokumen | 6 | 21 | 45 | |
| | | b | Jumlah keseluruhan target dokumen kerjasama yang ditindaklanjuti pada tahun (n) di lingkup Sekretariat BPSDMP, Pusbang Aparatur dan BP3KSDMT | Dokumen | 6 | 24 | 45 | |
| 5 | SK.WA.03.02 Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur | IKK 26. | Jumlah Peserta Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang Kompeten | Orang | 11.790 | 13.783 | 13.783 | 100,000 |
| | | IKK 27. | Persentase Lulusan Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang Kompeten | % | 84,996 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| | | a | Jumlah Lulusan Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang Kompeten | Orang | 10.021 | 13.783 | 9.208 | |
| | | b | Jumlah target Lulusan Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang Kompeten | Orang | 11.790 | 13.783 | 9.208 | |
| 6 | SK.DL.01.02.Meningkatnya Kualitas perencanaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta lembaga yang sesuai standar | IKK.10 | Persentase Keterpaduan antara perencanaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang sesuai standar serta lembaga yang terakreditasi | % | 87,625 | 92,645 | 103,360 | 111,565 |
| | | a | Jumlah jenis Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan pada tahun (n) | | 439 | 781 | 523 | |
| | | b | Jumlah keseluruhan jenis pendidikan dan pelatihan yang ditargetkan pada tahun (n) | | 501 | 843 | 506 | |
| 7 | SK.DL.01.03. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM | IKK 11. | Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi | % | 89,558 | 88,201 | 94,389 | 107,017 |
| | | a | Jumlah Program Studi yang terakreditasi (minimal "B") atau sesuai standar | Prodi | 223 | 299 | 286 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----------|---|---|------------------|---------|---------|--------|---------|
| | | | b | Total keseluruhan Program Studi pada lembaga diklat di bawah naungan BPSDM Perhubungan. | Prodi | 249 | 339 | 303 | |
| | | IKK 12. | | Kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Transportasi | % | 95,107 | 90,429 | 85,969 | 95,068 |
| | | | a | Jumlah dokumen kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang telah ditindaklanjuti tahun (n) | Dokumen | 311 | 274 | 386 | |
| | | | b | Jumlah keseluruhan target dokumen kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang ditindaklanjuti pada tahun (n) di lingkup Satker/UPT matra darat, laut dan Udara | Dokumen | 327 | 303 | 449 | |
| 8 | SK.WA.03.03. Meningkatkan Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel | IKK.13 | | Indeks Maturitas SPIP BPSDMP | Level | 3,15 | 3,771 | 3,382 | 89,684 |
| | | IKK.14 | | Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP | Nilai | 90,57 | 88,260 | 79,520 | 90,097 |
| | | IKK.15 | | Indeks Pengelolaan aset BPSDMP | Nilai | 81,00 | 81,478 | 90,205 | 110,711 |
| | | IKK.16 | | Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP | Nilai | 90,16 | 88,687 | 89,401 | 100,805 |
| | | IKK.17 | | Indeks Perencanaan BPSDMP | Nilai | 85,44 | 86,143 | 87,921 | 102,064 |
| | | IKK.18 | | Nilai SAKIP BPSDMP | Nilai | 80,00 | 77,900 | 77,900 | 100,000 |
| | | IKK.19 | | Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran BPSDMP | Nilai | 74,85 | 74,591 | 81,066 | 108,681 |
| 9 | SK.WA.01.01 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum BPSDMP | IKK.20 | | Indeks Reformasi Hukum BPSDMP | Nilai | 76 | 76 | 76 | 100,000 |
| | | IKK.21 | | Kualitas Kebijakan BPSDMP | % | 100,000 | 100,000 | 100,00 | 100,000 |
| | | | a | Jumlah Kebijakan yang dihasilkan tahun (n) pada lembaga Pusbang Aparatur | | 2 | 2 | 2 | |
| | | | b | Total target keseluruhan target Kebijakan yang dihasilkan tahun (n) pada lembaga Pusbang Aparatur. | | 2 | 2 | 2 | |
| 10 | SK.DL.01.04. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum SDM Transportasi | IKK 22 | | Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi | % | 100,000 | 99,524 | 97,701 | 98,169 |
| | | | a | Jumlah NSPK lembaga diklat transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang dihasilkan | | 198 | 209 | 170 | |
| | | | b | Total keseluruhan target NSPK lembaga diklat di bawah naungan BPSDM Perhubungan. | | 198 | 210 | 174 | |
| 11 | SK.WA.03.04. Meningkatkan Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan | IKK 23. | | Indeks Kelembagaan BPSDMP | Nilai | 80 | 79,698 | 79,698 | 100,000 |
| | | IKK 9.2. | | Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP | Nilai | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 100,000 |
| | | IKK 24. | | Indeks tata kelola manajemen ASN BPSDMP | Nilai | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,000 |
| 12 | SK.WA.03.05 Meningkatkan Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP | IKK 25. | | Indeks SPBE BPSDMP | % | 96,800 | 97,458 | 96,396 | 98,911 |
| | | | a | Jumlah sistem informasi yang di update/dapat diakses tahun (n) | Sistem Informasi | 242 | 230 | 214 | |
| | | | b | Jumlah keseluruhan sistem informasi pada tahun (n) | Sistem Informasi | 250 | 236 | 222 | |